BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Sesuai dengan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, arah kebijakan penyelenggaraan negara dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, propenas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Propenas mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) yang lalu. Propenas berupaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi penyelenggara pembangunan di Pusat dan di Daerah (Pemerintah Daerah) untuk membuat rencana pembangunannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi pada segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hal pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan sejak Pelita I secara keseluruhan telah berhasil menciptakan kemajuan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Keberhasilan pembangunan nasional tersebut terutama dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tidak terlepas dari keuangan negara yang cukup mantap terutama karena membaiknya harga minyak yang merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar.

Meningkatnya penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar dari kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dibiayai melalui azas dekonsentrasi dalam bentuk program dan proyek sektoral. Anggaran pembangunan yang diberikan untuk proyek-proyek sektoral dan proyek-proyek Inpres serta subsidi pembangunan Dati I dan II, maupun Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Namun demikian dalam proses pembangunan selanjutnya keadaan keuangan negara yang cukup mantap itu ternyata sulit untuk dipertahankan. Memasuki dasawarsa 1980-an, perekonomian dunia mulai dilanda resesi yang terus berlangsung hingga pertengahan 1980-an. Dampak negatif dari resesi ekonomi dunia itu, juga dirasakan oleh Indonesia. Harga minyak bumi berangsur-angsur merosot dan mencapai harga terendah sebesar US$ 9.83 pada bulan Agustus 1986 **(Nasution, 1988 : 10).**

Penurunan dalam penerimaan migas menyebabkan penurunan penerimaan dalam negeri yang pada gilirannya akan menyebabkan kemampuan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan atau subsidi kepada daerah mengalami penurunan. Pada situasi yang demikian, kemudian segera dicari jalan keluar agar dana yang tersedianya terbatas itu dapat digunakan secara efisien dan efektif. Dalam kaitan ini, desentralisasi yang muncul pada saat-saat berdirinya Republik Indonesia kembali diaktualisasikan **(Radianto, 1996 : 4)**.

Desentralisasi yang berarti memberikan tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar lagi kepada daerah otonom untuk

merencanakan dan melaksanakan progam-program serta proyek-proyek sektor publik (jasa-jasa umum). Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perhatian ke arah desentralisasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kenyataan bahwa pada banyak negara, jasa-jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah pusat adalah tidak efisien dan tidak efektif. Di pihak lain, pemerintah setempat (lokal), perusahaan-perusahaan swasta dan organisasi-organisasi bukan pemerintah atau *non government organization* seringkali dianggap mampu memainkan peranan yang besar di dalam hal menyediakan jasa-jasa publik.
2. Diterimanya secara luas prinsip bahwa partisipasi rakyat merupakan unsur yang sangat hakiki dalam pembangunan.
3. Resesi ekonomi dunia yang terjadi pada akhir dasawarsa 1970-an dan awal dasawarsa 1980-an juga ikut mendorong meningkatnya kebutuhan akan desentralisasi keuangan dan pengelolaan pelayanan publik.

Tujuan desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Indonesia sebagai negara kesatuan secara yuridis formal tidak dapat dielakkan lagi, sehingga untuk menjadikan Indonesia sebagai suatu

unit kawasan ekonomi yang tangguh, tidak dapat hanya dilihat dengan menggunakan analisis ekonomi Indonesia secara makro nasional dan makro sektoral saja sebab :

1. Indonesia mempunyai 32 Provinsi, bila ditinjau berdasarkan keadaan alam/lingkungan daerah, potensi ekonomi, jumlah dan jenis kegiatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jelas berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain.
2. Tingkat kemakmuran masyarakat yang diukur berdasarkan pendapatan per kapita daerah juga sangat berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain.
3. Ruang geografis dan lokasi Provinsi juga berbeda, baik yang menyangkut luas maupun letaknya, mengingat Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang cukup besar.

Perbedaan potensi daerah, tingkat kemakmuran masyarakat, dan lokasi tersebut menyebabkan mobilitas sumber daya antar daerah akan menjadi terhambat. Untuk itu guna memperoleh wawasan nusantara sebagai kesatuan unit ekonomi yang kuat, maka jelas diperlukan pendekatan secara regional untuk memecahkan kasus demi kasus dalam rangka pembangunan ekonomi daerah. Bila persoalan pembangunan ekonomi daerah sudah beres, maka niscaya akan lebih membantu dan memperkuat pembangunan ekonomi secara nasional, sehingga wawasan nusantara sebagai kesatuan unit ekonomi akan segera dapat terbentuk dalam waktu yang relatif sangat singkat **(Zadjuli, 1985 : 10-11).**

Pembangunan ekonomi nasional selama ini lebih berfokus pada pertumbuhan, ternyata tidak membuat banyak daerah di Indonesia berkembang dengan baik. Proses pembangunan dan peningkatan kemakmuran sebagai hasil daripada pembangunan selama 30 tahun lebih itu, lebih terkonsentrasi di pusat atau Jawa. Pada tingkat nasional, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun cukup tinggi dan tingkat pendapatan per kapita naik terus setiap tahun. Namun jika dilihat pada tingkat regional, kesenjangan pembangunan ekonomi antara daerah/Provinsi semakin membesar **(Tambunan, 2000 : 15)**.

Tabel 1.1.
PERKEMBANGAN PDB NASIONAL DAN PDRB SULAWESI SELATAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 1996-2000

TAHUN	PDB NASIONAL (MILYAR RP)	PDRB SUL-SEL (MILYAR RP)	% PDRB SUL-SEL TERHADAP PDB NASIONAL
1996	532.630,80	11.833,10	2,22
1997	624.337,10	13.538,00	2,17
1998	989.573,04	21.950,76	2,22
1999	1.119.441,95	24.064,89	2,15
2000	1.290.684,22	27.772,14	2,15

Sumber : BPS, PDRB Sulawesi Selatan, 2001 : 7

Paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi harus dirubah sebagai kelanjutan dari proses reformasi. Reformasi ekonomi, baik sistemnya maupun kebijakan dan strateginya yang dipicu oleh krisis ekonomi mulai pertengahan tahun 1997, dewasa ini sedang mencari bentuknya. Semua pihak sepakat bahwa hasil akhir dari proses reformasi itu harus berupa tatanan ekonomi

nasional yang lebih adil dan lebih merata dari tatanan yang berlaku selama ini **(Mubyarto, 2000 : 35)**.

Perubahan-perubahan dalam paradigma pembangunan antara lain dari:

1. Sentralisasi dengan pemerintahan ditingkat pemerintah pusat kepada desentralisasi dengan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat.
2. Pola pengambilan keputusan dari atas (*top down*) menjadi dari bawah (*bottom up*).
3. Pendekatan pembangunan sektoral ke pembangunan regional holistik.
4. Pembangunan dengan wilayah negara (*public sphere*) yang dominan ke wilayah masyarakat madani (*civil society sphere*) yang dominan.
5. Pola pembangunan berorientasi ekonomi ke pola pembangunan menyeluruh total ekonomi-sosial-politik-budaya-agama **(Salim, 2000: 109-110)**

Proses perubahan yang cepat ini, UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberi otonomi luas kepada daerah membuka sumber-sumber penerimaan daerah. Konstelasi hubungan keuangan pusat dan daerah selama ini menyebabkan relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan atau

kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, mendominasi konfigurasi APBD.

Tabel 1.2.
DISTRIBUSI PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENERIMAAN TAHUN 1998/1999-1999/2000

JENIS PENERIMAAN	1998/1999	1999/2000
PENERIMAAN DAERAH	100,00	100,0
1. Sisa lebih perhitungan tahun lalu	2,40	4,19
2. Pendapatan Asli Daerah	11,14	9,82
❑ Pajak Daerah	5,36	4,95
❑ Retribusi Daerah	4,03	3,54
❑ Bagian Laba Usaha Daerah	0,29	0,27
❑ Penerimaan Lain-lain	1,46	1,06
3. Pendapatan dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	85,66	85,69
❑ Bagi Hasil Pajak	11,39	10,11
❑ Bagi Hasil Bukan Pajak	1,75	1,88
❑ Subsidi Daerah Otonom	48,97	49,66
❑ Bantuan Pembangunan	23,26	23,06
❑ Penerimaan Lainnya	0,29	0,98
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	0,80	0,30

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2001 : xxiii

Sumber-sumber penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola pusat, sedangkan sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi). Pola hubungan seperti ini membuat pemerintah daerah tingkat I sangat tergantung pada pusat. Data APBN tahun 1990-an menunjukkan bahwa struktur penerimaan pemerintah daerah tingkat I (Provinsi) didominasi oleh transfer pemerintah pusat (bantuan dan sumbangan). Pada pertengahan

dekade 1990-an, porsi ini mencapai hampir 50 persen dari total penerimaan daerah tingkat I. Ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pusat, juga dapat dilihat pada berbagai indikator lainnya di antaranya rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap pengeluarannya.

Tabel 1.3.
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH DI INDONESIA
DAN BEBERAPA NEGARA LAINNYA, TAHUN 1997

NEGARA	SAHAM DAERAH DALAM (%)		RASIO A/B (%)
	PENGELUARAN PUSAT (A)	PENDAPATAN PUSAT (B)	
Cina	64	64	100
Brasil	22	37	60
Argentina	35	37	95
India	35	54	65
Kolombia	18	32	56
Korea Selatan	18	38	47
Indonesia	7	22	32

Sumber : Bank Dunia, 1997 dalam (Tambunan, 2000 : 15)

Menurut laporan Bank Dunia tahun 1997 mengenai pembangunan ekonomi di Indonesia, porsi daerah dalam total pengeluaran nasional adalah sekitar 7 persen, sementara porsi penerimaannya sebesar 22 persen, sehingga rasionya sekitar 32 persen (Tabel 1.3). Hal ini mencerminkan betapa kecilnya peranan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.

Tujuan pokok UU No.22 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintahan

ADLN - Perpustakaan Unair

negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan tujuan pokok UU No.25 Tahun 1999 adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, dan mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Penerapan kedua undang-undang ini dimungkinkan menimbulkan berbagai masalah di daerah. Hal ini disebabkan karena daerah harus berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri, karena selama ini daerah-daerah tidak dimungkinkan untuk mandiri. Khusus mengenai UU No.25 Tahun 1999, ada suatu masalah besar yang diperkirakan pasti akan muncul dengan diberlakukannya UU tersebut, yaitu kemampuan keuangan atau kapasitas/potensi fiskal daerah. Hal ini menjadi sangat penting karena sangat menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi. Artinya, daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan terbesar **(Tambunan, 2000 : 15)**.

Selain itu, penerapan kedua undang-undang ini menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan daerah di Indonesia. Salah satu aspek yang penting berkaitan dengan pelaksaaan otonomi daerah tersebut adalah implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan antar daerah. Aspek pemerataan dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, tetapi juga dapat ditinjau

menurut antar daerah. Secara interpersonal sangat baik apabila pendapatan antar individu atau kelompok anggota masyarakat sudah merata. Sementara itu pemerataan antar daerah amat baik apabila kesenjangan pendapatan antar daerah, baik antar Provinsi maupun antar kabupaten/kota dapat diperkecil.

Data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) BPS tahun 1998 menunjukkan masih adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang cukup tinggi antara kelompok kaya dalam masyarakat (diwakili oleh kelompok profesional, manajerial di daerah perkotaan) dengan kelompok miskin (diwakili oleh buruh tani di pedesaan). Berdasarkan data SNSE tersebut, rasio antara kelompok pendapatan kaya dengan kelompok pendapatan miskin di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bila tahun 1990 rasio tersebut adalah 4,5, maka tahun 1998 rasio tersebut menjadi 9,5. Dari data tersebut, salah satu faktor yang menimbulkan peningkatan kesenjangan pendapatan ini adalah dikuasainya faktor produksi modal yang relatif besar pada kelompok pendapatan kaya. Sekitar 70 persen pendapatan yang dimiliki masyarakat berasal dari pendapatan dari modal.

Situasi ini tidak berbeda jauh bila dikaitkan dengan kesenjangan yang terjadi antar daerah. Kesenjangan antar daerah terlihat makin memburuk, baik bila ditinjau dari berbagai indikator; pendapatan per kapita antar daerah, konsumsi per kapita antar daerah, maupun banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan menggunakan indeks Williamson (Tabel 1.4) diperoleh suatu perhitungan bahwa koefisien indeks relatif masih besar, menunjukkan adanya

ketidakmerataan pendapatan per kapita antar daerah dalam periode 1995-1997 **(Mahi, 2000: 1 - 3)**.

Tabel 1.4.
PDRB PER KAPITA PROVINSI, POPULASI, INDEKS WILLIAMSON TAHUN 1995-1997
(PDRB PER KAPITA MENURUT HARGA KONSTAN, 1993 DALAM JUTAAN RUPIAH)

PROVINSI	1995		1996		1997	
	PDRB PER KAPITA	POPULASI	PDRB PER KAPITA	POPULASI	PDRB PER KAPITA	POPULASI
Aceh	2.908	3.847.000	2.906	3.945.100	2.120	4.016.000
Sumatera Utara	1.957	11.115.000	2.097	11.306.300	2.153	11.541.000
Sumatera Barat	1.632	4.323.000	1.733	4.390.000	1.796	4.454.000
Riau	4.816	3.900.000	4.882	4.057.200	4.946	4.097.000
Jambi	1.220	2.370.000	1.279	2.458.700	1.320	2.476.000
Sumatera Selatan	1.736	7.208.000	1.824	7.413.000	1.868	7.532.000
Bengkulu	1.134	1.409.000	1.157	1.464.200	1.189	1.476.000
Lampung	0.962	6.658.000	1.016	6.806.200	1.042	6.908.000
DKI Jakarta	6.655	9.113.000	7.083	9.341.400	7.376	9.420.000
Jawa Barat	1.594	39.207.000	1.701	40.117.500	1.755	40.554.000
Jawa Tengah	1.316	29.653.000	1.401	29.881.400	1.435	30.051.000
Yogyakarta	1.626	2.917.000	1.754	2.914.600	1.789	2.958.000
Jawa Timur	1.685	33.844.000	1.801	34.124.300	1.879	34.508.000
Bali	2.280	2.896.000	2.442	2.924.400	2.559	2.953.000
Nusa Tenggara Barat	0.811	3.646.000	0.862	3.707.700	0.886	3.796.000
Nusa Tenggara Timur	0.691	3.577.000	0.738	3.640.900	0.753	3.735.000
Kalimantan Barat	1.667	3.636.000	1.799	3.732.300	1.903	3.801.000
Kalimantan Tengah	2.218	1.627.000	2.394	1.685.900	2.537	1.700.000
Kalimantan Selatan	1.873	2.893.000	2.012	2.960.300	2.100	2.997.000
Kalimantan Timur	7.898	2.314.000	8.147	2.429.400	8.489	2.431.000
Sulawesi Utara	1.235	2.649.000	1.331	2.688.300	1.380	2.730.000
Sulawesi Tengah	1.054	1.938.000	1.108	1.997.000	1.132	2.047.000
Sulawesi Selatan	1.159	7.558.000	1.233	7.693.100	1.264	7.828.000
Sulawesi Tenggara	0.928	1.587.000	0.950	1.643.400	0.983	1.672.000
Maluku	1.333	2.087.000	1.392	2.141.700	1.422	2.169.000
Papua	3.156	1.943.000	3.437	2.020.900	3.541	2.046.000
Indonesia	1.934	194.755.0000	2.057	198.342.900	2.120	200.782.000
Williamson Index						
Vw	0.716		0.709		0.713	
Vum	0.886		0.864		0.870	

Keterangan : Timor Timur dikeluarkan, tidak termasuk 6 Provinsi baru.
Sumber : Mahi, 2000 : 2

Makin luas otonomi yang diberikan kepada suatu daerah, makin besar tanggung jawab daerah dan tentu saja makin besar biaya penyelenggaraannya. Itulah sebabnya UU No.25 Tahun 1999 menyertai UU No.22 Tahun 1999 karena mengatur pajak-pajak apa yang mulai harus dilimpahkan kepada daerah baik dalam pemungutannya maupun dalam perolehan dan pemanfaatannya. Kemampuan pembiayaan

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsinya melayani masyarakat setempat disebut tingkat kemandirian pemerintah daerah. Tingkat kemandirian pemerintah daerah itu dikaitkan dengan besar kecilnya kemampuan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indeks kemampuan rutin (IKR). IKR adalah rasio PAD terhadap belanja rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD **(Mubyarto, 2001 : 93)**.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tanggal 1 Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumberdaya alam menanggapinya dengan sedikit rasa khawatir dan was-was.

Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekwensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah. Di samping itu, alasan klasik seperti kesiapan sumberdaya manusia (SDM) di daerah, masih lemahnya struktur dan infrastruktur daerah memang merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan dialami oleh beberapa pemerintah daerah. Beberapa pihak bahkan ada yang khawatir bahwa otonomi daerah hanya akan memindahkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta inefisiensi dari pemerintah

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

pusat ke daerah, mengancam kelestarian lingkungan, dan memungkinkan munculnya raja-raja kecil di daerah. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal harus disukseskan karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia (**Mardiasmo, 2001 : 1-2**)

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga segala gerak perekonomian nasional akan mempengaruhi kondisi perekonomian lokal. Perubahan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan, menyebabkan strategi pembangunan nasional lebih mempertimbangkan potensi dan dinamika perkembangan daerah dan wilayah. Diterapkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, dimaksudkan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah. Dengan demikian daerah harus berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri dalam kemampuan keuangan atau kapasitas/potensi fiskal daerah. Hal ini menjadi sangat penting karena menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi. Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam upaya memperbaiki posisi fiskal daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD merupakan bagian keuangan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 1.5
PENERIMAAN DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DATI II DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 1999/2000 (DALAM RIBU RUPIAH)

NO.	DAERAH TINGKAT II (KABUPATEN/KOTA)	PENERIMAAN (A)	PAD (B)	B/A (%)
01	Selayar	27.281.804	1.094.516	4,01
02	Bulukumba	55.205.640	3.095.425	5,61
03	Bantaeng	29.257.505	1.654.064	5,65
04	Jeneponto	43.964.637	1.303.021	2,96
05	Takalar	41.312.861	1.640.305	3,97
06	Gowa	87.474.906	5.036.205	5,76
07	Sinjai	46.276.016	3.588.381	7,75
08	Maros	45.659.263	3.474.794	7,61
09	Pangkajene Kepulauan	62.747.905	6.354.592	10,13
10	Barru	45.268.852	1.366.980	3,02
11	Bone	107.211.244	4.265.558	3,98
12	Soppeng	51.866.791	2.463.424	4,75
13	Wajo	64.125.532	4.345.826	6,78
14	Sidenreng Rappang	50.273.091	3.146.619	6,26
15	Pinrang	67.073.567	2.493.049	3,72
16	Enrekang	35.629.513	1.420.335	3,99
17	Luwu	128.124.222	6.560.954	5,12
18	Tana Toraja	59.662.553	2.991.831	5,01
19	Polewali Mamasa	67.381.191	2.333.718	3,46
20	Majene	47.760.163	867.418	1,82
21	Mamuju	51.424.982	2.256.713	4,39
22	Kota Makassar	132.287.816	28.522.197	21,56
23	Kota Pare-pare	38.372.465	4.347.604	11,33

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Tingkat II, 2001 : 603-650
(Diolah Kembali)

Berdasarkan Tabel 1.5. tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah pada seluruh daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Porsi PAD terhadap penerimaan daerah yang paling rendah adalah Kabupaten Majene yaitu sebesar 1,82 persen, sedangkan yang paling tinggi adalah Kota Makassar yaitu sebesar 21,56 persen. Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan pusat pemerintahan daerah dan pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan, sehingga menunjukkan aktivitas ekonomi dan aktivitas pembangunan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah tingkat II yang

lain. Salah satu indikator penting dalam melihat potensi dan dinamika perekonomian daerah adalah PAD. Dari PAD dapat terlihat langsung besarnya penerimaan dan aktivitas pembangunan daerah. Semakin besar nilai PAD, semakin ringan beban pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

Tabel 1.6.
PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN
TAHUN 1996-2000

TAHUN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU		ATAS DASAR HARGA KONSTAN	
	JUMLAH (MILYAR RP)	PERTUMBUHAN (%)	JUMLAH (MILYAR RP)	PERTUMBUHAN (%)
1996	11.833,10	14,03	9.485,86	8,31
1997	13.538,00	14,41	9.893,42	4,30
1998	21.950,76	62,14	9.366,23	-5,33
1999	24.064,89	9,63	9.631,08	2,83
2000	27.772,14	15,11	10.101,95	4,89

Sumber : BPS, PDRB Sulawesi Selatan, 2001 : 11.

Jika pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan diukur untuk setiap repelita, maka selama repelita VI rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 4,63 persen, tidak terlalu jauh dibawah repelita IV sebesar 6,41 persen dan repelita V sebesar 7,64 persen. Pada tahun 1998 terjadi pertumbuhan negatif atau kontraksi –5,33 persen (atau -14 pada tingkat nasional). Tetapi dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan ada dua kabupaten yaitu Bantaeng dan Wajo yang mengalami pertumbuhan positif masing-masing 1,95 persen dan 6,06 persen. Kota Makassar yang merupakan barometer ekonomi Sulawesi Selatan yang menyumbang 23 persen dari PDRB Sulawesi Selatan tahun 1998, juga menunjukkan pertumbuhan positif 3,30 persen selama tahun 1996-1998.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini akan menganalisis sejauh mana Kemandirian Pemerintah Daerah Dalam Manajemen Pembangunan Ekonomi Memasuki Era Otonomi Daerah di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Tujuan pokok Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan tujuan pokok Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, dan mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Penerapan kedua undang-undang ini menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan daerah di Indonesia. Salah satu aspek yang penting berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan antar daerah. Aspek pemerataan dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, tetapi juga dapat ditinjau menurut antar daerah. Secara interpersonal, sangat baik apabila pendapatan antar individu atau kelompok anggota masyarakat sudah merata. Sementara itu

pemerataan antar daerah amat baik bila kesenjangan pendapatan antar daerah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota dapat diperkecil.

Aspek lain dari penerapan kedua Undang-Undang tersebut adalah timbulnya berbagai masalah di daerah. Hal ini disebabkan karena daerah harus berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri. Khusus mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, terdapat suatu masalah yang akan muncul yaitu kemampuan keuangan atau kapasitas/potensi fiskal daerah. Hal ini menjadi penting karena sangat menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi. Artinya, daerah otonom, harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi dapat ditentukan dengan beberapa pendekatan yaitu :

1. Besarnya proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD).
2. Besarnya proporsi PAD terhadap pengeluaran pembangunan (PP).
3. Besarnya proporsi PAD terhadap pengeluaran rutin (PR).

Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, maka kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi ditentukan oleh besarnya sumbangan (share) PAD terhadap anggaran penerimaan

dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, PAD merupakan faktor yang sangat menentukan kemandirian suatu daerah dalam memasuki era otonomi daerah.

Meningkatnya penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan adanya kecenderungan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah pokok sebagai berikut :

1. Apakah bantuan atau subsidi (BD) yang diterima oleh pemerintah daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
2. Apakah pengeluaran pembangunan (PP) yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan PAD?
3. Apakah pengeluaran rutin (PR) yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan PAD?
4. Apakah produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan PAD?
5. Apakah jumlah penduduk (POP) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan PAD?

ADLN - Perpustakaan Unair

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum menganalisis tentang kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah. Kemandirian pemerintah daerah disebut juga derajat desentralisasi fiskal daerah, yakni kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan sendiri. Hal ini menjadi sangat penting karena sangat menentukan mampu atau tidaknya suatu daerah untuk berotonomi. Oleh karena itu, ketergantungan kepada bantuan pusat, harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Sejalan dengan tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka secara spesifik penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh faktor bantuan atau subsidi yang diterima oleh pemerintah daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut.
2. Menganalisis pengaruh faktor pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa terhadap peningkatan PAD daerah tersebut.

3. Menganalisis pengaruh faktor pengeluaran rutin yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa terhadap peningkatan PAD daerah tersebut.
4. Menganalisis pengaruh faktor produk domestik regional bruto daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa terhadap peningkatan PAD daerah tersebut.
5. Menganalisis pengaruh faktor jumlah penduduk daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa terhadap peningkatan PAD daerah tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Ditinjau dari sudut pengembangan ilmu, penelitian ini akan memberikan manfaat tentang pengembangan teori keuangan daerah dikaitkan dengan teori pembangunan daerah (regional). Berdasarkan dengan hal tersebut, akan ditemukan hubungan antara keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang selanjutnya dapat ditentukan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.
2. Bermanfaat bagi perencana dan mengambil keputusan pada tingkat daerah dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat pada era otonomi daerah.
3. Bermanfaat sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya pada skala yang lebih luas.

BAB 2
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah dan desentralisasi mempunyai tempat masing-masing. Istilah otonomi daerah lebih cenderung pada aspek politik kekuasaan negara (*political aspect*), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada aspek administrasi negara (*administrative aspect*). Namun, jika dilihat dari konteks berbagi kekuasaan (*sharing of power*), dalam prakteknya, kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan.

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peranserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong otoaktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur

dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya **(Rasyid, 2000 : 780)**.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menyertai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memuat desentralisasi fiskal yang mengatur pajak-pajak apa yang mulai harus dilimpahkan kepada daerah baik dalam pemungutannya maupun dalam perolehan dan pemanfaatannya. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut terdiri dari; (i) dana alokasi umum (DAU); (ii) dana alokasi khusus (DAK); (iii) Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan (iv) bagi hasil. Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998, dalam pasal 4 menyebutkan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan pendapatan masyarakat di daerah.

Terdapat beberapa alasan yang mendukung desentralisasi fiskal antara lain :

a. Untuk mengalokasikan barang-barang dan jasa-jasa publik yang bermanfaat dan eksernalitasnya berskala regional dan lokal.
b. Pemerintah daerah atau lokal lebih tepat dalam menginterpretasikan kebutuhan rakyat di daerahnya.
c. Memungkinkan kebebasan individu dan tanggung jawab politik secara lebih besar.

Dewasa ini perhatian kepada desentralisasi fiskal sudah demikian mengglobal. Negara-negara maju memformulasikan kembali struktur

hubungan keuangan intrapemerintahan agar lebih serasi dengan kenyataan pasca negara sejahtera (*post welfare state*). Negara-negara yang sedang mengalami transisi di Eropa Timur dan Tengah saat ini sedang sibuk-sibuknya membenahi sistem keuangan pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Banyak negara berkembang juga berputar haluan ke berbagai bentuk desentralisasi fiskal sebagai salah satu cara meloloskan diri dari berbagai jebakan ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan makroekonomi, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi, yang telah menyebabkan mereka jatuh terperosok akhir-akhir ini (**Bird dan Vaillancourt, 1998 : 1**).

Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang dianggap sebagai obat mujarab sebagai penyembuh semua penyakit, atau malah sebagai wabah penyakit menular dan menjadi tambahan beban berat yang sudah dipikul. Beberapa pakar menekankan perlunya desentralisasi fiskal untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas, dan peningkatan mobilitas dana. Sebaliknya, pakar yang lain mengatakan bahwa tak satupun dari manfaat-manfaat tersebut akan berhasil dicapai oleh negara-negara yang preferensi penduduknya hampir tidak mungkin diakomodasi dalam anggaran pemerintah, dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah mendekati nihil. Dari perspektif ini, desentralisasi kelihatannya cenderung meningkatkan biaya, mengurangi efisiensi pelayanan pemerintah, dan mungkin akan menyebabkan

kesenjangan yang lebih parah, serta terjadinya ketidakstabilan makro ekonomi.

Secara umum, bukanlah hal yang sulit untuk mendukung dan merinci paparan kedua sisi yang berseberangan tersebut. Dalam kaitannya dengan efisiensi, misalnya, visi ilmu ekonomi standar menegaskan bahwa tersedianya paket pengeluaran pajak yang berbeda di daerah yang berlainan, yang disertai dengan adanya mobilitas individual, sudah cukup menjamin terjadinya efisiensi produksi antar daerah dalam pengadaan layanan jasa-jasa pemerintah. Dalam nuansa yang sama, bukti empiris dari sejumlah negara mendukung pendapat bahwa pelayanan masyarakat setempat yang dikontrol daerah cenderung dapat dilakukan dengan biaya lebih rendah dibandingkan bila dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, keberhasilan memetik manfaat-manfaat ini membutuhkan prasyarat-prasyarat yang jarang terdapat di negara-negara berkembang, seperti: kapasitas administratif pemerintah daerah yang baik dan pejabat-pejabat daerah yang responsif dan bertanggung jawab atas besarnya otoritas keuangan mereka (**Bahl dan Linn, 1994**) dalam (**Bird dan Vaillancourt, 1998 : 2**).

Ada tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan daerah adalah sebagai berikut :

1. Dekonsentrasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah (desentralisasi administratif).

2. Delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah pusat.
3. Devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah (desentralisasi politik).

Seberapa jauh desentralisasi dapat dinilai dengan jelas, sebagian tergantung pada apakah yang sudah dilakukan lebih bersifat dekonsentrasi, delegasi, atau devolusi. Hal ini tergantung apakah seseorang mengamatinya dari atas ke bawah (*top down*) atau dari bawah ke atas (*bottom up*). Pendekatan desentralisasi fiskal dari bawah ke atas umumnya menekankan nilai politis, misalnya, perbaikan pemerintahan dalam kaitannya dengan kemauan menerima saran dan partisipasi politik lokal, dan efisiensi alokasi dalam arti perbaikan kesejahteraan. Sedangkan dari atas ke bawah (*top down*), misalnya, meringankan beban pusat dengan mengalihkan defisit ke bawah. Langkah ini mungkin merupakan sebagian dari keinginan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan alokasi dengan lebih efisien melalui pendelegasian atau desentralisasi kewenangan ke pemerintah daerah (**Bird dan Fiszbein) dalam (Bird dan Vaillancourt, 1998 : 238**).

Desentralisasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

1. *Deconcentration*, yaitu pelimpahan wewenang kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintah pusat.

2. *Delegation*, yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign authority*).
3. *Devaluation*, yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan, dan pihak pemerintah daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh pusat. Dalam hal tertentu, apabila pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya melaksanakan tugas, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menggali sumber-sumber penerimaan dan mengatur penggunaannya.
4. *Privatization*, yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi non pemerintah atau sektor swasta. Hal ini biasanya dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi organisasi tersebut untuk ikut ambil bagian secara nyata dalam proses pembangunan nasional. Gagasan ini lebih menonjol dalam rangka debirokratisasi dalam arti pengambilan keputusan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan melibatkan organisasi non pemerintah.

Pelaksanaan desentralisasi ternyata berkorelasi nyata dengan lima faktor sebagai berikut :

1. Umur negara, yaitu semakin mapan (*established*) suatu negara, semakin tinggi derajat desentralisasinya.
2. Besarnya Produk Nasional Bruto (PNB), yaitu negara yang memiliki PNB yang besar juga menunjukkan tingkat desentralisasi yang tinggi.
3. Tingkat perkembangan media massa, yaitu negara-negara yang memiliki media massa yang tersebar luas dalam memiliki kebebasan juga merupakan negara dengan tingkat desentralisasi yang tinggi.
4. Tingkat industrialisasi, yaitu negara dengan tingkat industrialisasi yang relatif tinggi juga menunjukkan tingkat desentralisasi yang tinggi.
5. Jumlah pemerintah daerah atau jumlah Provinsi, yaitu negara-negara yang memiliki lebih banyak Provinsi atau pemerintah daerah, juga memiliki kewenangan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia tersebut, juga menunjukkan tidak kuatnya korelasi antara tingkat desentralisasi dengan (1) jumlah dan tingkat kepadatan penduduk serta luas suatu negara, (2) tingkat urbanisasi, dan (3) struktur konstitusi dan komposisi kelompok etnis penduduk. Pada pihak lain, terdapat korelasi yang kuat antara tingkat desentralisasi dengan faktor-faktor ekonomi dan teknologi. Hal ini membuktikan bahwa desentralisasi dari berbagai tipe, hanya dapat terwujud bila kesatuan nasional telah tinggi. Atau, dengan kata lain kesatuan nasional merupakan persyaratan utama bagi terwujudnya

desentralisasi. Desentralisasi lebih merupakan permasalahan ideologis yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kemandirian, demokrasi, partisipasi rakyat, dan pertanggungjawaban pemerintah serta aparatnya kepada rakyat secara keseluruhan.

Semakin maju suatu negara dalam proses pembangunannya, maka dorongan untuk desentralisasi semakin meluas, dan pada saat itu akan semakin tampak keterbatasan aparat pemerintah dalam mensikapi permasalahan-permasalahan nasional. Pada saat itulah, tindakan desentralisasi akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan lebih sistematis. Desentralisasi pada akhirnya merupakan indikator dari kedewasaan sistem politik, sosial, ekonomi, dan sistem birokrasi suatu negara.

Desentralisasi mempunyai beberapa keuntungan, antara lain adalah :

1. Menyebarkan pusat pengambilan keputusan (*decongestion*). Apabila semua masalah diletakkan di tangan seseorang atau sekelompok pengambil keputusan saja, maka dapat dipahami akan terjadi pemusatan (*congestion*) wewenang pada satu pengambil keputusan saja, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.
2. Kecepatan dalam pengambilan keputusan (*speed*). Tidak semua masalah perlu diputuskan secara sentral, maka pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting terutama di negara

berkembang di mana transportasi dan komunikasi merupakan penghambat utama dalam melakukan koordinasi antar daerah.

3. Pengambilan keputusan yang lebih realistis dan lebih sesuai dengan kondisi obyektif dan permasalahan di suatu daerah.
4. Penghematan (*economic efficiency*). Seringkali lebih ekonomis mempekerjakan tenaga lokal setempat daripada mengirimkan pejabat dari pusat ke daerah yang memerlukan biaya perjalanan dan sebagainya.
5. Keikutsertaan masyarakat lokal (*local participation*). Sentralisasi akan mudah menimbulkan perasaan masa bodoh pada masyarakat lokal, karena menganggap semua kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh pemerintah pusat, tanpa mereka harus berusaha sendiri dan akan menjadikan masyarakat lokal merasa tidak ada kaitan antara pajak yang mereka bayarkan dengan pelayanan yang mereka terima. Atau sebaliknya, masyarakat lokal merasa bahwa kebutuhan mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, walaupun dalam kenyataannya pengeluaran pemerintah pusat untuk daerah yang bersangkutan relatif besar.
6. Solidaritas nasional (*national solidarity*). Pendapat umum mengatakan bahwa kesatuan nasional dapat dibina melalui perencanaan sentral dan bukan memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk merencanakan pendidikan pelaksanaan pembangunannya, tetapi desentralisasi akan dapat menghilangkan kesenjangan dan kecemburuan tersebut terakumulasi secara terus menerus akan

berpotensi pada timbulnya disintegrasi nasional suatu bangsa **(Litvack, et al, 1998 : 99-101).**

Desentralisasi dalam hubungan keuangan antara pusat dengan daerah merupakan isu yang sangat penting. Selama ini, Undang-Undang yang mengatur pokok-pokok hubungan keuangan antara pusat dan daerah tidak merumuskan dengan jelas pedoman yang dijadikan pegangan. Selain itu, penjelasan tentang Undang-Undang tersebut tidak diatur secara terperinci, sehingga terjadi pembiasan dalam pembagian wewenang antara pusat dan daerah. Dengan adanya desentralisasi di sektor keuangan daerah, diharapkan akan tercipta sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih sempurna yang didasarkan atas suatu pembagian wewenang dan tugas yang lebih jelas dan tegas antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2001.

2.2. Kemandirian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik membutuhkan dana (*fiscal needs*) sebanding dengan kegiatan yang harus dijalankan. Kebutuhan fiskal daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bantuan atau subsidi pemerintah pusat. PAD adalah penerimaan yang sumbernya diserahkan untuk dikelola sepenuhnya oleh

pemerintah daerah yang terdiri dari; pajak daerah, retribusi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dinas-dinas, dan penerimaan lain yang syah.

Kemandirian pemerintah daerah mempunyai pengertian yang sama dengan derajat desentralisasi fiskal daerah dan/atau kinerja pemerintah daerah. Kemandirian pemerintah daerah adalah kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Perbandingan antara PAD terhadap total penerimaan daerah (TPD) merupakan salah satu cara untuk menentukan kemandirian pemerintah daerah atau derajat desentralisasi fiskal daerah atau disebut juga kinerja pemerintah daerah. Menurut **Smith (1973 : 22), Uppal (1986 : 1); Mubyarto (2001 : 101), Makhfatih (1997 : 1); Yuliati (2001 : 14); Reksohadiprodjo (2001 : 155),** kemandirian pemerintah daerah, atau derajat desentralisasi fiskal daerah, atau kinerja pemerintah daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio subsidi atau bantuan terhadap total penerimaan daerah, rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk daerah (BHPBP) terhadap total penerimaan daerah (TBD), rasio PAD terhadap belanja rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut, kemandirian pemerintah daerah ditentukan oleh kemampuan meningkatkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain yang syah (misalnya; hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jenis penerimaan daerah yang berhubungan langsung dengan peranan masyarakat, dengan demikian secara teoritis, jenis penerimaan ini akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, dan tingkat inflasi pada suatu daerah **(Kirana, 2000 : 72-73)**. Oleh karena itu, jumlah penduduk, kegiatan ekonomi (yang dicerminkan oleh besar kecilnya jumlah PDRB), dan tingkat inflasi merupakan faktor yang menentukan besarnya penerimaan PAD.

Bantuan atau subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (BD) merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu atau mendorong peningkatan PAD. Hakikat bantuan atau subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Untuk itu, daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan PAD **(Mahi, 2000 : 8-9)**. Oleh karena itu, bantuan atau subsidi merupakan faktor yang menentukan besarnya penerimaan PAD.

Adanya kebebasan/keleluasaan di dalam menggunakan bantuan atau subsidi pemerintah pusat, daerah betul-betul dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan PAD. Secara teoritis, bantuan atau subsidi dalam bentuk bantuan umum (*block grants*) lebih

memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggunakannya sesuai dengan prioritas daerah yang bersangkutan. Penggunaan bantuan/subsidi tersebut untuk memperbaiki infrastruktur perekonomian daerah, akan mendorong peningkatan penerimaan PAD **(Arsjad, 1990 : 225)**.

Dengan demikian, pengeluaran pembangunan (PP) merupakan faktor yang menentukan besarnya penerimaan PAD. Selanjutnya pengeluaran rutin (PR) yang diperuntukkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Dengan demikian, pengeluaran rutin merupakan faktor yang menentukan besarnya penerimaan PAD.

Sesuai dengan tugas-tugas pelayanan publik yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan fiskal daerah adalah fungsi dari panjang jalan dan jembatan daerah, jumlah penduduk, panjang saluran irigasi, luas tanah kritis, dan lain-lain.

Untuk membiayai pendidikan misalnya, **Musgrave** dan **Musgrave (1984 : 531)** merumuskan bahwa kebutuhan fiskal untuk suatu daerah adalah:

$$N_j = N_s Z_j \qquad (1)$$

di mana : N_j adalah kebutuhan fiskal di daerah j untuk pendidikan
N_s adalah biaya pendidikan, misalnya gaji guru dan sebagainya untuk biaya pendidikan tersebut
Z_j adalah target penduduk seperti usia anak sekolah

dapat dikatakan bahwa besarnya kebutuhan fiskal suatu daerah tergantung besarnya tugas-tugas dan pelayanan publik yang harus

dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Besarnya bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditentukan oleh posisi fiskal (*fiscal position*) suatu daerah. Posisi fiskal suatu daerah dapat diketahui dengan menggunakan konsep-konsep rasio pajak (*tax ratio*), upaya pengumpulan pajak (*tax effort*), kapasitas pajak (*taxable capacity*), kebutuhan fiskal (*fiscal needs*), indeks penampilan pajak (*tax performance index*), dan elastisitas pajak (**Musgrave dan Musgrave, 1984 : 530-534; Uppal, 1986 : 17-19; Bahl, (1971 : 571-584; Suparmoko, 2000 : 323).**

Posisi fiskal disebut kuat kalau kapasitas pajak lebih tinggi dari kebutuhan, dan posisi fiskal disebut lemah kalau terjadi sebaliknya. Tingkat pelayanan publik dapat disediakan dengan rasio yang lebih rendah dari penerimaan pajak terhadap basis pajak, yang berarti upaya pajak rendah (*low tax effort*). Dapat juga terjadi tingkat standar upaya pajak akan meningkatkan pelayanan publik yang relatif tinggi terhadap kebutuhan.

Kapasitas pajak disuatu daerah dapat dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut :

$$T_{cj} = t_s . B_j \qquad (2)$$

di mana : T_{cj} adalah kapasitas pajak di daerah j
t_s adalah standar tarif pajak (tax rate)
B_j adalah basis pajak di daerah j

Jadi posisi fiskal di daerah j atau Pj adalah pembagian persamaan (2) dengan persamaan (1), yaitu :

$$P_j = {T_{cj}}/{N_j} = {t_s B_j}/{N_s Z_j} \quad (3)$$

Berdasarkan persamaan (3), posisi fiskal adalah rasio kapasitas pajak terhadap kebutuhan fiskal. Bila Pj mempunyai nilai lebih besar dari pada satu (Pj > 1), maka posisi fiskal di daerah itu lemah atau rendah (**Musgrave dan Musgrave, 1984 : 531; Chelliah dan Sinha, 1982 : 7-8**).

Posisi fiskal dapat juga diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap kapasitas pajak (**Suparmoko, 2000 : 324**). Posisi fiskal adalah sama dengan upaya pengumpulan pajak (*tax effort*), dengan demikian dapat dirumuskan persamaannya sebagai berikut :

$$T_{ej} = {T_{rj}}/{ts} \cdot B_j = {T_{rj}}/{T_{cj}} \quad (4)$$

di mana : T_{ej} adalah upaya pengumpulan pajak di daerah j
T_{rj} adalah penerimaan pajak di daerah j

Nilai T_e yang akan diperoleh berkisar antara nol sampai satu. Untuk menentukan posisi fiskal di suatu daerah apakah lemah atau kuat, tergantung pada standar yang digunakan. Secara sederhana dapat dikatakan, bila nilai T_e mendekati satu, maka posisi fiskal dapat disebut kuat, dan bila nilai T_e mendekati nol, maka posisi fiskal disebut lemah.

Berdasarkan persamaan (4), dapat dihitung posisi fiskal antar daerah dan antar jenis pajak. Untuk tujuan ini perlu dihitung standar T_e terlebih dahulu, standar atau "*benchmark*" (standar T_e untuk berbagai daerah atau berbagai pajak). Bila T_e suatu daerah atau suatu pajak diatas standar, maka pajak di daerah itu atau pajak itu lebih kuat dan sebaliknya (**Musgrave dan Musgrave, 1984 : 531; Chelliah dan Sinha, 1982 : 7**).

Elastisitas pajak di suatu daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah itu, merupakan salah satu cara untuk mendeteksi posisi pajak di suatu daerah atau jenis pajak tertentu, dengan formulasi :

$$E = \frac{d(T_r)}{d(Y)} \cdot \frac{Y}{T_r} \qquad (5)$$

di mana : E adalah elastisitas pajak di daerah itu atau jenis pajak tertentu
Y adalah PDRB pada harga berlaku atau harga konstan
d adalah perubahan

Apabila elastisitas pajak sudah diketahui, maka dapat diketahui pula kepekaan perubahan pajak terhadap PDRB. Jika E > 1 berarti setiap perubahan dalam PDRB sebesar satu persen, akan mengakibatkan perubahan dalam penerimaan pajak daerah lebih besar dari satu persen. Ini mengandung arti pajak di daerah itu elastis, atau pajak di daerah itu kuat. Bila E < 1 berarti setiap perubahan dalam PDRB sebesar satu persen, akan mengakibatkan perubahan dalam penerimaan pajak lebih kecil dari satu persen. Ini berarti pajak di daerah itu tidak elastis, atau posisi pajak di daerah itu tidak kuat atau lemah (**Uppal, 1985 : 79**).

Menurut **Reksohadiprodjo (2001 : 154-157)** kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) di suatu daerah dapat diketahui dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$C_j = t_s B_j \qquad (6)$$

di mana : C_j adalah kapasitas fiskal di daerah j
t_s adalah tarif fiskal standar
B_j adalah basis fiskal di daerah j

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah disebut upaya fiskal (*fiscal effort*) dengan formulasi sebagai berikut :

$$E_j = \frac{T_j B_j}{t_s B_j} = \frac{t_j}{t_s} \qquad (7)$$

di mana : t_j adalah tarif fiskal
t_s adalah standar fiskal
E_j adalah upaya fiskal

(1) Untuk derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah digunakan ukuran :

a. $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$

b. $\frac{\text{Bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$

c. $\frac{\text{Sumbangan daerah (SD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$

TPD = PAD + BHPBP + SD, kalau hasilnya tinggi, derajat desentralisasi besar (mandiri)

(2) Kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dapat diketahui dengan menghitung indeks pelayanan publik per kapita (IPPP)

$$\text{IPPP} = \frac{\text{Pengeluaran aktual per kapita untuk jasa-jasa publik (PPP)}}{\text{Standar kebutuhan fiskal daerah}} \times 100\ \%$$

PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan per kapita masing-masing daerah

$$SKF = \frac{\text{Jumlah pengeluaran daerah/jumlah penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten dan Kota}}$$

Kalau hasilnya tinggi, kapasitas fiskalnya tinggi

(3) Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), C_j diperoleh dengan formulasi

$$Cj = \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/jumlah penduduk}}{\text{Kapasitas fiskal standar (KFS)}} \times 100\%$$

$$SKF = \frac{\text{Jumlah PDRB/penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten dan Kota}}$$

Kalau hasilnya tinggi, kapasitas fiskalnya tinggi

(4) Upaya fiskal (tax effort) dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$UPPAD_j = \frac{PAD_j}{\text{Kapasitas atau potensi PAD}}, \text{ atau}$$

$$UPPAD_j = \frac{PAD_j}{PDRB_j \text{ (tanpa migas)}}$$

Selanjutnya dihitung tingkat PAD standar ($TPAD_S$) sebagai berikut:

$$TPAD_S = \frac{\text{Jumlah PAD/PDRB}}{\text{Jumlah Kabupaten dan Kota}}$$

Sedangkan indeks kinerja PAD adalah sebagai berikut :

$$IKPAD = \frac{UPPAD}{TPAD_S} \times 100\ \%$$

Makin tinggi hasilnya, maka makin besar upaya pajaknya. Ini juga menunjukkan posisi fiskal daerah.

Cara lain untuk menentukan posisi fiskal daerah adalah dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. Semakin elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD di daerah tersebut semakin baik. Formulasi yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$\epsilon = \frac{\Delta TR}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{TR} \qquad (8)$$

di mana : ϵ adalah elastisitas
Y adalah PDRB
Δ adalah perubahan
TR adalah penerimaan pajak

2.2.1. Bantuan dan Subsidi (Grants-in-aid)

Bantuan antar unit pemerintahan (*intergovernmental grants*) adalah bantuan atau subsidi dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. **Browning dan Browning (1979 : 423)** membagi bantuan dalam dua bentuk, yaitu bantuan bersyarat (*conditional grants*) dan bantuan tidak bersyarat (*non conditional grants*). **Musgrave dan Musgrave (1984 : 538-541)** membagi bantuan dalam bentuk yang sesuai (*matching grants*) dan bantuan yang tidak sesuai (*non matching grants*), serta bantuan umum (*general grants*) dan bantuan selektif (*selective grants*).

Kedua cara pembagian tersebut dapat dikatakan tidak berbeda, karena bantuan bersyarat dibagi lagi dalam bentuk bantuan yang sesuai

dengan bantuan tetap. Besarnya bantuan yang sesuai tergantung pada pengeluaran dari unit pemerintah daerah yang menerima bantuan tersebut untuk program tertentu. Misalnya pemerintah pusat menanggung empat puluh persen biaya dan pemerintah daerah menanggung enam puluh persen untuk melaksanakan program tertentu. Bantuan tetap adalah suatu bentuk bantuan atau subsidi yang tetap kepada daerah yang menerima bantuan itu.

Jenis-jenis bantuan dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu :

1. **Kelompok pertama**, formulasinya adalah :

$$A_i = a_0 + a_1(P_i / P_t) \qquad (9)$$

di mana : A_i adalah jatah untuk daerah i
P_i adalah arget kelompok penduduk di daerah i, misalnya anak umur sekolah di daerah tersebut.
P_t adalah total target penduduk nasional
a adalah konstanta yang dimasukkan, misalnya penyediaan biaya administrasi dan lain-lain

Formulasi bantuan di atas didasarkan pada basis penduduk dan tidak kapasitas pajak daerah, jadi kriterianya sangat kasar.

2. **Kelompok kedua**, penyediaan bantuan disesuaikan dengan kapasitas pajak di suatu daerah dan dihubungankan dengan tingkat bantuan yang sesuai, tidak hanya memperhatikan target penduduk semata-mata.
3. **Kelompok ketiga** adalah sama dengan sistem bantuan pada kelompok pertama, yaitu hanya memperhatikan basis penduduk saja.
4. **Kelompok keempat**, penjatahan bantuan didasarkan pada jumlah maksimum dana yang tersedia dan disesuaikan dengan bantuan pendapatan per kapita, sesuai rumus:

$$A_i = a_i \frac{P_i\left(1 - 1/2Y_i / Y_t\right)^2}{P_j\left(1 - 1/2Y_j / Y_t\right)^2} \qquad (10)$$

di mana : Ai adalah dasar penjatahan untuk daerah i
ai adalah konstanta penyesuaian yang tetap
Pi adalah jumlah penduduk di daerah i
Pj adalah jumlah penduduk nasional
Yi adalah pendapatan per kapita di daerah i
Yt adalah pendapatan per kapita nasional

5. **Kelompok kelima**, merupakan sistem bantuan berdasarkan penjatahan, dan tidak mengikuti jumlah penduduk serta kapasitas pajak daerah.
6. **Kelompok enam** adalah bantuan berdasarkan pendapatan per kapita di suatu daerah, sesuai rumus :

$$F_i = 1 - 1/2Y_j / Y_t \qquad (11)$$

di mana : F_i adalah variabel dengan tingkat yang sesuai untuk daerah i

Tanpa mempelajari secara lebih mendetail dari berbagai formulasi bantuan, tidak dapat menentukan jatah yang tepat dan komponen yang sesuai untuk masing-masing formulasi tersebut sebagai upaya untuk mencapai pelayanan yang sama kepada masyarakat antar satu dengan yang lain daerah (**Ahmad, 1989 : 37-38**).

Secara umum bantuan (*grant*) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibedakan ke dalam :

1. Bantuan umum atau blok (*general grant//block grant/unconditional grant*) yaitu bantuan kepada pemerintah daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat tertentu dalam arti daerah dapat

menggunakan/ mengalokasikannya kepada penggunaan-penggunaan yang dikehendaki oleh daerah yang bersangkutan.

2. Bantuan khusus (*specific grant/conditional grant*), yaitu bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa-jasa publik yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Adapun perbedaan keduanya adalah terletak pada dampak yang ditimbulkannya. Untuk menjelaskan perbedaan tersebut, dapat digunakan analisis grafik sebagai berikut :

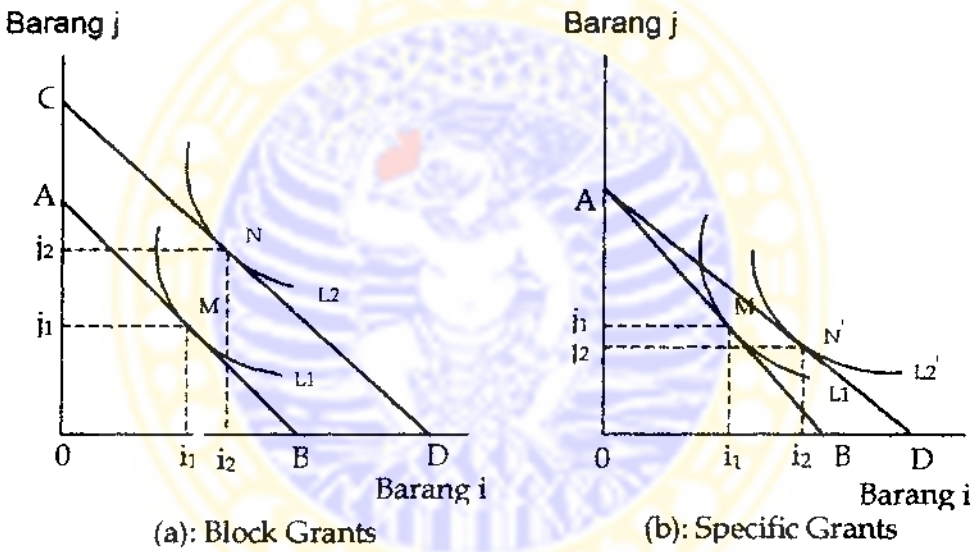

Gambar 2.1. Bantuan Umum (*block grants*), dan Bantuan Khusus (*specific grants*)
Sumber : Nanga, 1991 : 22

Posisi pemerintah daerah sebelum ada bantuan adalah dititik M dan jumlah barang i dan barang j yang dikonsumsi masing-masing adalah i_1 dan j_1. Apabila pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk *block grants*, maka *budget line* akan bergeser dari AB menjadi CD dan posisi pemerintah daerah kini berada pada titik N dan jumlah barang i dan

barang j yang dikonsumsi menjadi i2 dan j2. Jadi konsumsi pemerintah daerah baik untuk barang i maupun barang j meningkat. Hal ini menunjukkan pula bahwa kepuasan dari pemerintah daerah kini bertambah karena berada pada *indifference curve* yang lebih tinggi yaitu L2, dimana L2 > L1.

Sebaliknya, apabila bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk *specific grants*, maka dampak yang ditimbulkan adalah berupa penurunan harga (biaya produksi barang i dan karena itu *budget line* bergerak dari AB ke AD'). Posisi pemerintah daerah sekarang berada di titik N' dan jumlah barang i yang dikonsumsi menjadi i2'. Jadi *specific grants* berhasil menaikkan produksi barang i. Selain itu, *specific grants* juga meningkatkan kepuasan pemerintah daerah karena sekarang berada pada *indifference curve* yang lebih tinggi yaitu L2' dimana L2' > L1.

Namun demikian, dampak dari *specific grants* ini terhadap produksi barang j tidak dapat diprediksi secara langsung, karena hal ini sangat tergantung pada bentuk *indifference* curve maupun *income* dan *price elasticity of demand* dari barang i dan j. *Price effect* dari subsidi atau bantuan cenderung menurunkan produksi barang j, tetapi *income effect* adalah kebalikannya. Artinya, cenderung meningkatkan produksi barang j tersebut. Dalam beberapa kasus seperti tampak dalam Gambar (2.1.b), efek netto yang ditimbulkan adalah penurunan secara absolut di dalam produksi barang j.

Jadi perbedaan di antara kedua jenis bantuan tersebut adalah bahwa *block grants* dampaknya terhadap produksi atau konsumsi dapat

diprediksi secara langsung, sedangkan *specific grants* tidak dapat. Selain itu, kalau *block grants* hanya menghasilkan *income effect*, sedangkan *specific grants* menghasilkan *income effect*, *substitution effect*, dan *price effect* (**Nanga, 1991 : 21-24**).

Sesuai atau tepatnya kedua bantuan ini, tergantung pada tujuan pemberian bantuan itu sendiri. Apabila tujuan pemberian bantuan tersebut adalah untuk mendorong jenis-jenis pengeluaran tertentu oleh pemerintah penerima, maka bantuan atau subsidi dalam bentuk *conditional matching gants* atas pengeluaran tersebut adalah lebih sesuai/tepat. Tetapi apabila tujuan pemberian bantuan adalah semata-mata untuk pengalihan daya beli (*transfer of purchasing power*) dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, maka bantuan dalam bentuk *unconditonal grants* adalah lebih sesuai/tepat **(Boadway dan Waldasin, 1984 : 527).**

2.2.2. Bantuan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Di Indonesia, bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua kelompok besar, yaitu :

1. Subsidi/Perimbangan Keuangan daerah Otonom

Subsidi Daerah Otonom (SDO) merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk mengamankan pengeluaran pemerintah daerah yang terbesar yaitu gaji pegawai daerah otonom. Distribusi subsidi tersebut kepada daerah-daerah dilakukan berdasarkan kebijakan Menteri Dalam Negeri yang diperhitungkan dari data pegawai negeri di masing-masing daerah. SDO terdiri dari belanja

pegawai, belanja non pegawai yang diarahkan, dan belanja non pegawai yang ditetapkan. Belanja non pegawai yang ditetapkan terdiri dari dua kategori, yaitu subsidi/bantuan dan ganjaran.

2. Bantuan Pembangunan Daerah (Bantuan Inpres)

Bantuan Inpres ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu bantuan umum yang terdiri dari bantuan pembangunan daerah tingkat I (Provinsi), daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), dan Desa. Bantuan khusus yang terdiri dari bantuan penunjang jalan dan jembatan kabupaten, bantuan pembangunan sekolah dasar, bantuan pembangunan sarana kesehatan, dan bantuan penghijauan dan reboisasi (**Nanga, 1991: 24-25**).

Bantuan pembangunan dalam bentuk bantuan umum, pemerintah daerah berwenang menentukan untuk apa bantuan itu digunakan, asal saja dipakai untuk sektor-sektor yang tepat, sesuai dengan program yang telah disetujui sebelumnya. Sedangkan bantuan yang bersifat khusus, pemerintah pusat menetapkan prioritas dan pembagian dana, sementara pemerintah daerah hanya berwenang dalam hal penentuan lokasi proyek dan cara melaksanakannya (**Devas, 1988 : 30**).

Bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sesungguhnya merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu atau mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, dan bukan sebaliknya. Hakikat bantuan/subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Untuk itu, daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana

bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan PAD.

Adanya kebebasan/keleluasaan di dalam menggunakan bantuan dari pemerintah pusat, daerah betul-betul dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan PAD. Secara teoritis bantuan/subsidi dalam bentuk bantuan umum (*block grants*) lebih memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggunakannya sesuai dengan prioritas daerah yang bersangkutan. Sedangkan bantuan khusus (*specific grants*) merupakan bantuan yang diatur secara ketat oleh pemerintah pusat (**Arsjad, 1990 : 255**).

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana dampak bantuan pemerintah pusat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD akan digunakan sebagai ukuran besarnya sumbangan (share) bantuan umum terhadap total bantuan pemerintah pusat. Artinya, makin besar sumbangan bantuan umum terhadap total bantuan pemerintah pusat, makin tinggi keleluasaan daerah dalam menggunakan dana-dana bantuan itu, sehingga dapat meningkatkan PAD yang selanjutnya dapat meningkatkan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Tabel 2.1.
KATEGORI BANTUAN PUSAT KEPADA DAERAH
TAHUN 1986/1987-1996/1997
(MILYAR RUPIAH)

JENIS BANTUAN	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91	91/92	92/93	93/94	96/97
Bantuan Umum	592.2	602.4	713.2	706.0	1058.4	1434.7	1867.1	2202.8	3864.3
Inpres Desa	98.8	98.8	122.0	112.0	180.8	249.9	326.5	390.2	127.6
Inpres Dati I	220.4	223.6	267.2	270.0	391.8	590.8	825.1	1029.6	2692.5
Inpres Dati II	280.0	280.0	324.0	324.0	486.0	594.0	715.5	783	999.3
Inpres Desa Tertinggal									44.9
Bantuan Spesifik	3176.5	2907.2	3262.9	4087.1	5365.2	6396.1	7551.4	8652.7	9666.1
SDO	2514.8	2594.5	2860.1	3551.2	4102.4	4554.0	5269.3	6028.9	9012.5
Inpres Spesifik	661.7	312.7	402.8	535.9	1262.8	1642.1	2282.1	2623.8	653.6
Inpres SD	408.8	99.7	112.5	100.0	369.5	521.7	669.1	747.9	256.1
Inpres Kesehatan	79.3	72.0	91.1	122.2	177.8	268.9	339.5	393.3	180.1
Inpres Reboisasi	41.3	15.9	16.2	16.2	33.1	74.6	97.3	104.3	15.1
Inpres Jalan	120.8	122.1	180.0	294.5	679.4	974.8	1173.2	1373.3	202.3
Inpres Pasar	11.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.1	3.0	5.0	0
TOTAL	3775.7	3509.6	3976.1	4973.1	6423.6	7830.8	9418.5	10855.5	13530.0
Bantuan Umum (%)	15,9	17.2	17.9	14.7	16.5	18.3	19.8	20.3	28.6
Bantuan Spesifik (%)	84,1	82.2	82.1	85.3	83.5	81.7	80.2	79.7	71.4

Sumber : Mahi, 2000 : 9

Selain Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan Instruksi Presiden (Inpres), terdapat pula Dana Daftar Isian proyek (DIP), yang merupakan alokasi sektoral dari pusat langsung ke daerah. Diantara ketiga jenis alokasi pusat ke daerah, alokasi dana DIP merupakan yang terbesar.

Tabel 2.2.
RASIO ALOKASI PUSAT KE DAERAH TERHADAP PDB
TAHUN 1983 – 1993 (%)

TAHUN	SDO	INPRES	DIP	TOTAL ALOKASI TERHADAP PDB
1983	2.0	1.7	4.2	7.9
1985	2.5	1.5	6.0	10.0
1987	2.1	0.7	6.2	9.0
1989	2.1	0.7	4.4	7.2
1991	2.0	1.5	4.8	8.3
1993	2.2	1.7	6.0	9.9
Rata-rata	2.2	1.3	5.2	8.7

Sumber : Panggabean (1997) dalam Mahi, 2000 : 9.

Berdasarkan Tabel 2.1. dapat dilihat bahwa pada masa lalu, peranan bantuan khusus sangat mendominasi keuangan daerah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa selama ini bantuan yang diterima oleh pemerintah daerah, penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menetapkan prioritas dan pembagian dana, sementara pemerintah daerah hanya berwenang dalam hal penentuan lokasi proyek dan cara melaksanakannya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 di seluruh wilayah Republik Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2001, menyebabkan terjadinya perubahan pada bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bantuan pemerintah pusat berubah menjadi dana perimbangan.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Sejalan dengan kewajiban tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Pengertian tersebut mengandung dua komitmen yaitu; (1) bahwa dalam pelaksanaan ekonomi daerah ingin diwujudkan suatu bentuk keadilan horizontal dan keadilan vertikal, serta (2) berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya pemerintah yang

bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah ini merupakan alat utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan; (1) kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan, (2) perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan sebagai derivasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (UU-PKPD) yang dilakukan melalui dana perimbangan, terdiri dari :

a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) perseorangan, dan penerimaan sumber daya alam (SDA).
b. Dana alokasi umum (DAU)
c. Dana alokasi khusus (DAK)

Tabel 2.3.
PERSENTASE BAGI HASIL PENERIMAAN NEGARA KEPADA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH UU-PKPD

NO	JENIS PENERIMAAN	SEBELUM UU-PKPD			SESUDAH UU-PKPD			
		PUSAT	DATI I	DATI II	PUSAT	PROP.	KAB/ KOTA	PEMERATAAN KAB/KOTA LAINNYA
1.	PBB	10	16,2	64,8	-	16,2	64,8	10
2.	BPHTB	20	16	64	-	16	64	20
3.	IHH	55	30	15	20	16	64	-
4.	IHPH/PSDH	55	30	15	20	16	32	32
5.	Iuran tetap/landrent	20	16	64	20	16	64	-
6.	Royalti pertambangan umum	20	16	64	20	16	32	32
7.	Perikanan	100	-	-	20	-	-	80
8.	Minyak	100	-	-	85	3	6	6
9.	Gas Alam	100	-	-	70	6	12	12
10.	Dana Reboisasi	100	-	-	60	-	40	-
11	PPh	100	-	-	80	8	12	-

Sumber : Sidik, 2001 : 94

Perubahan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekwensi dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 membawa implikasi pada bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Dilakukan penyerahan sepenuhnya belanja rutin daerah (sebelumnya disebut SDO) kepada pemerintah daerah. Ini berarti dana rutin daerah berubah, dari dana yang memiliki ciri-ciri khusus (penggunaannya ditentukan pemerintah daerah).
2. Perubahan dana SDO yang bersifat bantuan khusus untuk kebutuhan rutin menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), ini berarti bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besar kecilnya organisasi dan jumlah pegawai yang mendukungnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bantuan umum (*block grants*) atau sering juga disebut dengan istilah bantuan tidak bersyarat (*unconditional grants*), adalah jenis transfer antar tingkat pemerintahan (*intergovernmental grants*) yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Jenis bantuan ini dapat pula dipandang sebagai mekanisme transfer daya beli (*purchasing power transfer*) dari satu tingkat pemerintah ke tingkat yang lain. Karena sifatnya untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, sementara jenis fungsi yang dijalankan tersebut sama pada tiap daerah, maka jenis bantuan seperti ini lebih cocok digunakan untuk mendukung jasa-jasa publik yang tersebar secara merata di seluruh wilayah negara.

Ciri khusus yang menjadi kekuatan utama jenis bantuan umum ini adalah dapat meningkatkan sumberdaya lokal, sekaligus mempertahankan pilihan fiskal (*fiscal choice*) yang ada dalam kewenangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam mengalokasikan dana yang diterima ke dalam berbagai kemungkinan pengeluaran yang sesuai dengan pilihan dan kepentingan daerah yang bersangkutan. Namun, jenis bantuan ini mengandung resiko apabila staf pelaksana di daerah adalah orang-orang yang memiliki kelemahan dalam hal kualitas dan motivasi, sehingga dana yang ada digunakan untuk membiayai program yang kurang menguntungkan bagi masyarakat setempat.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, Tentang Dana Perimbangan, tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) terutama adalah untuk; (a) *horizontal equity*, dan (b) *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (*sufficiency*), terutama untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan pembiayaan (*fiskal need*) dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia (*fiscal capacity*). Kecukupan (*sufficiency*) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kewenangan, beban, standar pelayanan minimum (SPM).

Henley, et al, (1992 : 107) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk bantuan umum (*block grants*) kepada pemerintah daerah, yaitu :

a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*).
b. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*)
c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
d. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada dua faktor, yaitu; (1) faktor murni, dan (2) faktor penyeimbang. Faktor murni adalah perhitungan DAU berdasarkan formula yang digunakan. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah. Dimasukkannya faktor penyeimbang dalam perhitungan DAU adalah karena adanya kelemahan dalam faktor murni. Perhitungan DAU dengan menggunakan formula murni menunjukkan bahwa banyak daerah yang mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara beberapa daerah mengalami lonjakan penerimaan yang luar biasa.

Untuk menghindari efek negatif, misalnya kesenjangan antara daerah yang justru semakin lebar, maka digunakan faktor penyeimbang. Pendekatan atas faktor dilakukan dengan memperhitungkan Dana Rutin Daerah (DRD) dan Dana Pembangunan Daerah (DPD) untuk masing-masing daerah yang diterima tahun sebelumnya. Alasan digunakan DRD dan DPD sebagai faktor penyeimbang adalah sebagai berikut :

a. Pada dasarnya DAU merupakan pengganti DRD/DPD, dalam pengertian bahwa bentuk transfer dari pusat kepada daerah selain bagi hasil pajak dan bukan pajak yang ada selama ini adalah DRD dan DPD.
b. Apabila DAU yang dialokasikan untuk suatu daerah lebih kecil dari penerimaan transfer sebelumnya, dikhawatirkan akan memberikan dampak psikologis maupun dampak teknis finansial yang kurang baik.

c. DRD merupakan ukuran beban belanja pegawai, karena selama ini pegawai daerah digaji melalui Subsidi Daerah Otonom (SDO). Selain itu, DAU mempunyai sifat yang kurang lebih sama dengan DRD karena akan diterimakan secara rutin setiap bulan.

Metode kebutuhan DAU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Kebutuhan DAU Daerah = Kebutuhan Daerah – Potensi Ekonomi Daerah. (12)

Potensi ekonomi daerah, terdiri atas Variabel-variabel sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor primer dan sumber daya alam (SDA), dengan rumus indeks SDA daerah yaitu :

$$\frac{\text{PDRB Sektor Sumber Daya Alam Daerah / PDRB Daerah}}{\text{Jumlah PDRB Sektor SDA Seluruh Daerah / PDRB Seluruh Daerah}}$$

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri dan Jasa Lainnya, dengan rumus indeks Industri Daerah yaitu :

$$\frac{\text{PDRB Sektor Non Primer Daerah / PDRB Daerah}}{\text{Jumlah PDRB Sektor Non Primer Daerah / PDRB Seluruh Daerah}}$$

c. Besarnya angkatan kerja, dengan rumus indeks sumber daya manusia (SDM) daerah yaitu :

$$\frac{\text{Angkatan Kerja Daerah / Populasi Daerah}}{\text{Angkatan Kerja Indonesia / Populasi Indonesia Daerah}}$$

Sehingga potensi ekonomi daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan Daerah Rata-rata} \times \frac{\text{Indeks SDA + Indeks Industri + Indeks SDM}}{3} \quad (13)$$

Penerimaan daerah rata-rata dapat diperoleh dengan rumus :

$$\text{Penerimaan Daerah Rata-rata} \times \frac{\text{PAD Seluruh Daerah + Bagi Hasil Pajak Seluruh Daerah}}{\text{Pajak Daerah}} \quad (14)$$

Kebutuhan daerah, terdiri atas variabel-variabel sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk, dengan rumus Indeks Penduduk yaitu :

$$\frac{\text{Populasi Daerah}}{\text{Populasi Daerah Rata-rata}}$$

2. Luas Wilayah, dengan rumus Indeks Luas Wilayah yaitu :

$$\frac{\text{Luas Daerah Rata-rata}}{\text{Luas Daerah}}$$

3. Indeks Harga bangunan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Indeks Konstruksi Daerah}}{100}$$

4. Jumlah Penduduk Miskin, dengan rumus Indeks Kemiskinan Relatif Daerah, yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Daerah}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Daerah Rata-rata}}$$

Kebutuhan Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pengeluaran Daerah Rata-rata} \times \frac{\text{Indeks Penduduk + Indeks Luas Daerah + Indeks Harga Bangunan + Indeks Kemiskinan Relatif}}{4} \quad (15)$$

$$\text{Pengeluaran Daerah Rata-rata} \times \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Seluruh Daerah}}{\text{Jumlah Daerah}} \quad (16)$$

Setelah dihitung Kbutuhan Daerah dan Potensi Penerimaan Daerah, maka selanjutnya dihitung Kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah dengan rumus sebagai berikut :

Kebutuhan DAU Suatu Daerah = Kebutuhan Daerah – Potensi Penerimaan Daerah (17)

Selanjutnya dapat ditentukan Bobot DAU suatu daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot DAU Suatu Daerah} = \frac{\text{Kebutuhan DAU Suatu Daerah}}{\text{Kebutuhan DAU Seluruh Daerah}} \quad (18)$$

Dengan demikian, jumlah DAU untuk suatu daerah dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah DAU Suatu Daerah} = \frac{\text{Bobot Daerah Yang Bersangkutan}}{\text{Jumlah Bobot Seluruh Daerah}} \quad (19)$$

Di lain pihak, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bantuan khusus (*specific grants*) atau sering juga disebut dengan istilah bantuan bersyarat (*conditional grants*), merupakan jenis transfer yang memiliki persyaratan tertentu yang terkait di dalam bantuan tersebut. DAK diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah. Tujuan bantuan ini adalah untuk mendorong pemerintah daerah dalam menambah barang dan jasa publik tertentu yang bersifat strategis. Jadi, bantuan khusus ini dapat menjamin bahwa pemerintah daerah akan menyediakan jasa publik yang sesuai dengan program pemerintah pusat,

tanpa harus membebani keuangan pemerintah daerah. DAK diberikan untuk kegiatan investasi yang merupakan prioritas nasional, atau suatu kondisi khusus daerah, misalnya daerah transmigrasi **(Mahi, 2000 : 8; Sidik, 2001 : 98).**

2.3. Manajemen Pembangunan Ekonomi Daerah

Setiap negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan (*governance*) yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah.
2. Sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara pengembangan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan-kepentingan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai hal harus dilakukan. Salah satu di antaranya adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab fiskal, politik, dan administrasi kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Di Indonesia, lingkungan legal dan regulasi pokok untuk desentralisasi terangkum dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketiga undang-undang itu tidak berdiri sendiri secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan daerah otonom yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif secara berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal mendasar dalam undang-undang ini adalah komitmen untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu, dibutuhkan otonomi yang utuh dan bulat, di mana daerah diberi kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah pada seluruh fungsi-fungsi pemerintahan yang telah disentralisasikan.

Salah satu syarat diperlukan (*necessary condition*) untuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah terdefenisinya sumber-sumber pembiayaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur tentang pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 diatur tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta bagian daerah dari pajak perseorangan.

Bagi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Badan Eksekutif dan Badan Legislatif Daerah adalah langkah

penting untuk mampu mengoptimalkan peluang-peluang yang ada dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu aspek penting yang harus dikelola dengan baik untuk dapat mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya adalah manajemen keuangan daerah. Hal ini penting karena sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi.

Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah yang merupakan inti dari manajemen pembangunan ekonomi daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah yang dicerminkan dalam struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintah daerah dan disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan memberikan sanksi atas tindakan penggelapan pajak.

Pada pihak lain, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi namun ditingkatkan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, peningkatan prosedur pengendalian dimaksudkan untuk pengendalian ke dalam pemerintah daerah. Aspek utama manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapatkan perhatian adalah manajemen pendapatan asli daerah dan manajemen dana perimbangan.

Sistem pemerintahan yang sentralistik yang dialami oleh bangsa Indonesia selama masa orde lama dan orde baru memberikan pelajaran bahwa pendekatan sentralistik dalam pembangunan telah menimbulkan efek-efek yang negatif yaitu telah memasung kreatifitas daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Selain itu, sentralisasi telah menyebabkan pemerintah daerah semakin kuat tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Kedua hal tersebut cukup membuat pemerintah dan masyarakat daerah tidak berdaya membangun daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah menghitung potensi

pendapatan asli daerah yang riil yang dimiliki daerah. Untuk itu perlu metode perhitungan potensi pendapatan asli daerah yang sistematis dan rasional.

Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) tidak hanya menyangkut peningkatan pendapatan asli daerah. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Oleh akrena itu tidak perlu dibuat dikotomi antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan. Peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya. Anggaran yang dibuat dengan jumlah yang besar namun tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan masalah yaitu adanya kebocoran anggaran. Yang penting adalah upaya mengoptimalkan anggaran, karena peran pemerintah daerah nantinya lebih bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah. Masyarakat daerah sendiri (termasuk Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi) yang akan banyak berperan membangun daerahnya sesuai dengan kepentingan dan prioritas mereka (**Mardiasmo, 2001 : 5-6**).

2.4. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dan lembaga-lembaga yang terkait. Pembangunan ekonomi juga dapat dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena dengan kenaikan pendapatan ini

ADLN - Perpustakaan Unair

merupakan suatu penerimaan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pembangunan ekonomi terjadi dalam bentuk :

a. Peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.
b. Pertumbuhan PDB tersebut dibarengi dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonomi **(Kamaluddin, 1998 : 10).**

Salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi adalah peningkatan produksi, karena itu proses pembangunan menghendaki perubahan pada komposisi produksi dan perubahan pada pola pembangunan (alokasi) sumber daya produksi di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan dalam kerangka kelembagaan secara menyeluruh. Dengan demikian, pembangunan adalah suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktur ekonomi, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan **(Djojohadikusumo, 1994 : 6).**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar berskala nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada, dan akan didirikan di daerah tersebut.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

3. Teori Lokasi (*Location Theory*)

Ahli ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah yaitu lokasi, lokasi dan lokasi. Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimum-kan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri yang lama menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar.

Tentu saja banyak variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas suatu lokasi, misalnya, upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas pendidikan dan latihan, kualitas pemerintah

daerah, serta sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, seringkali masyarakat berusaha untuk memanipulasi biaya dari faktor-faktor tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan atau industri. Keterbatasan teori lokasi ini adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

4. Teori Tempat Sentral (*Central Place Theory*)

Teori ini menganggap ada hirarki tempat (*hierarchy of Place*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan perbedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga atau berbatasan. Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa, sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman.

5. Teori Kausasi Kumulatif (*Cumulative Causation Theory*)

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antar daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif

dibanding daerah-daerah lainnya. Hal ini yang disebut **Myrdal (1957)** dalam (**Arsyad 1999 : 118**) sebagai *backwash effects*.

6. Teori Daya Tarik (*Attraction Theory*)

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi daerah yang paling banyak digunakan. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif (**Arsyad, 1999 : 115-118**).

2.4.2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut, dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Ahli ekonomi telah menyadari bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat apabila terjadi perubahan, dan tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat sehingga diperlukan campur tangan pemerintah. Pentingnya campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah.

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah,

mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, dan kalau hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Apabila pembangunan ekonomi diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, maka cenderung untuk memperbesar ketidakmerataan antar daerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk pada daerah tertentu.

Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah yang lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, dan perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut. Perpindahan modal cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah yang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah yang kurang berkembang, permintaan investasi rendah karena pendapatan masyarakat rendah. Perubahan yang timbul yang merugikan daerah karena adanya ekspansi ekonomi dari suatu daerah disebut *backwash effects*. Di samping ada hal-hal yang merugikan, ada juga keuntungan bagi daerah-daerah di sekitar mana ekspansi ekonomi terjadi, misalnya terjualnya hasil produksi daerah dan kesempatan kerja baru. Pengaruh yang menguntungkan ini, oleh **Myrdal (1957)** disebut *spread effects*.

Hirschman (1958) dalam **(Arsyad, 1999 : 129)** mengatakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Daerah di suatu negara dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika

perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik karena terjadi proses penetesan ke bawah (*trickling down effects*). Sebaliknya jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh, berarti terjadi proses pengkutuban (*polarization effects*).

Campur tangan pemerintah (perencanaan) untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai peranan yang sangat besar. Di samping mencegah jurang kemakmuran antar daerah dan melestarikan budaya setempat, dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Ada tiga implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional (horisontal dan vertikal) di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya, administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas, biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada tingkat tersebut.

Menurut **Blakely (1989)** ada enam tahap dalam proses perencanaan pembangunan daerah yaitu:

Tabel 2.4.
TAHAPAN DAN KEGIATAN DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHAP	KEGIATAN
I	Pengumpulan dan Analisis Data 1. Penentuan basis ekonomi 2. Analisis struktur tenaga kerja 3. Evaluasi kebutuhan tenaga kerja 4. Analisis peluang dan kendala pembangunan 5. Analisis kapasias kelembagaan
II	Pemilihan Strategi Pembangunan Daerah 1. Penentuan tujuan dan kriteria 2. Penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan 3. Penyusunan strategi
III	Pemilihan Proyek-Proyek Pembangunan 1. Identifikasi proyek 2. Penilaian viabilitas proyek
IV	Pembuatan Rencana Tindakan 1. Prapenilaian hasil proyek 2. Pengembangan input proyek 3. Penentuan alternatif sumber pembiayaan 4. Identifikasi struktur proyek
V	Penentuan Rincian Proyek 1. Pelaksanaan studi kelayakan secara rinci 2. Penyiapan rencana usaha 3. Pengembangan, monitoring, dan evaluasi program
VI	Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan Implementasi 1. Penyiapan skhedul implementasi rencana proyek 2. Penyusunan program secara keseluruhan 3. Targeting dan marketing aset-aset masyarakat 4. Pemacaran kebutuhan keuangan

Sumber : **Arsyad, 1999 : 134**

Sementara itu, **Bendavid Val (1991)** dalam (**Arsyad, 1999 : 135**) menyajikan suatu model tahap-tahap perencanaan yang berbeda dengan Blakely, mengatakan bahwa :

1. Pengumpulan dan analisis data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus menerus berfungsi mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.

2. Semua tahap dalam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus dimana tujuan-tujuan secara priodik ditinjau kembali, sasaran-sasaran dirumuskan kembali, dan seterusnya.
3. Suatu rencana yang sudah disosialisasikan bukanlah merupakan akhir dari suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan-kepentingan praktis.

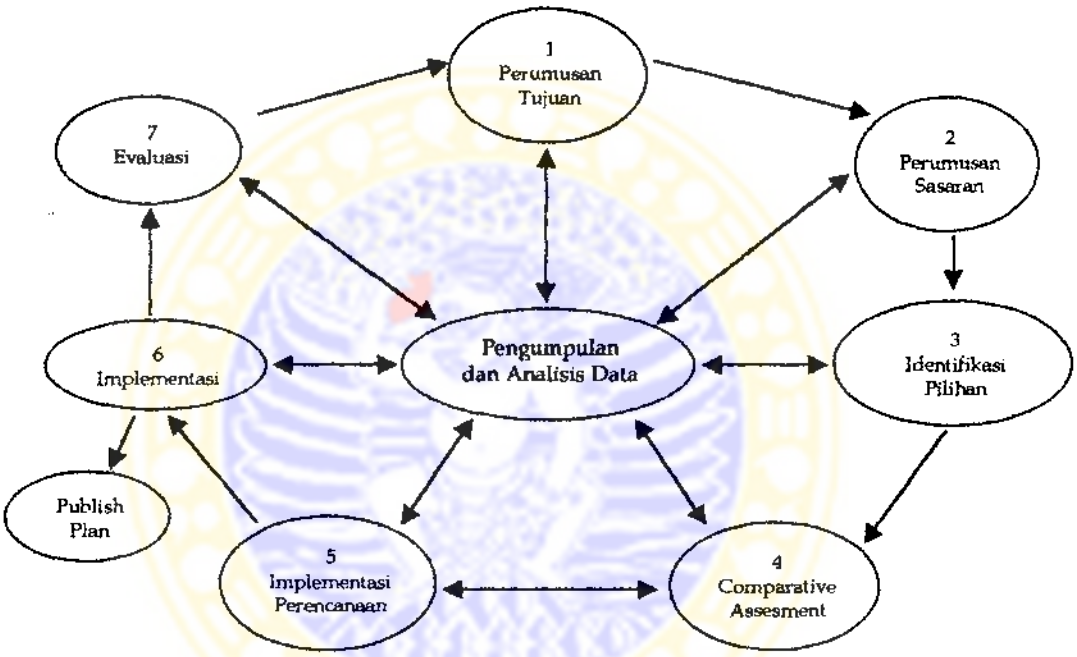

Gambar 2.2. Skema Perencanaan Model Ideal
Sumber : Arsyad, 1999 : 135

2.4.3. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia

Di Indonesia, sistem perencanaan pembangunan ekonomi daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, akan terjadi peningkatan peranserta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, keinginan masyarakat untuk

mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, dalam arti kehidupan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang lebih merata, mandiri, terbuka, dan berkembangnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan.

Strategi pembangunan nasional lebih mempertimbangkan potensi dan dinamika perkembangan daerah dan wilayah. Perencanaan pada tingkat nasional hanya akan diarahkan pada penciptaan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah. Di samping itu, perhatian nasional juga ditujukan kepada peningkatan kapasitas daerah/wilayah khusus dalam rangka interaksi antar wilayah atau daerah.

Pemerintah pusat hanya akan melakukan program pembangunan yang memiliki karakter kepentingan nasional (*national interest*) atau bersifat strategis (*national strategic*) dalam rangka memelihara kepentingan nasional dalam suatu negara kesatuan. Misalnya, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur lintas wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah, antar daerah, antar kelompok, dan antar penduduk. Masing-masing daerah otonom mempunyai wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di daerahnya (**Bratakusuma, 2000 : 81**).

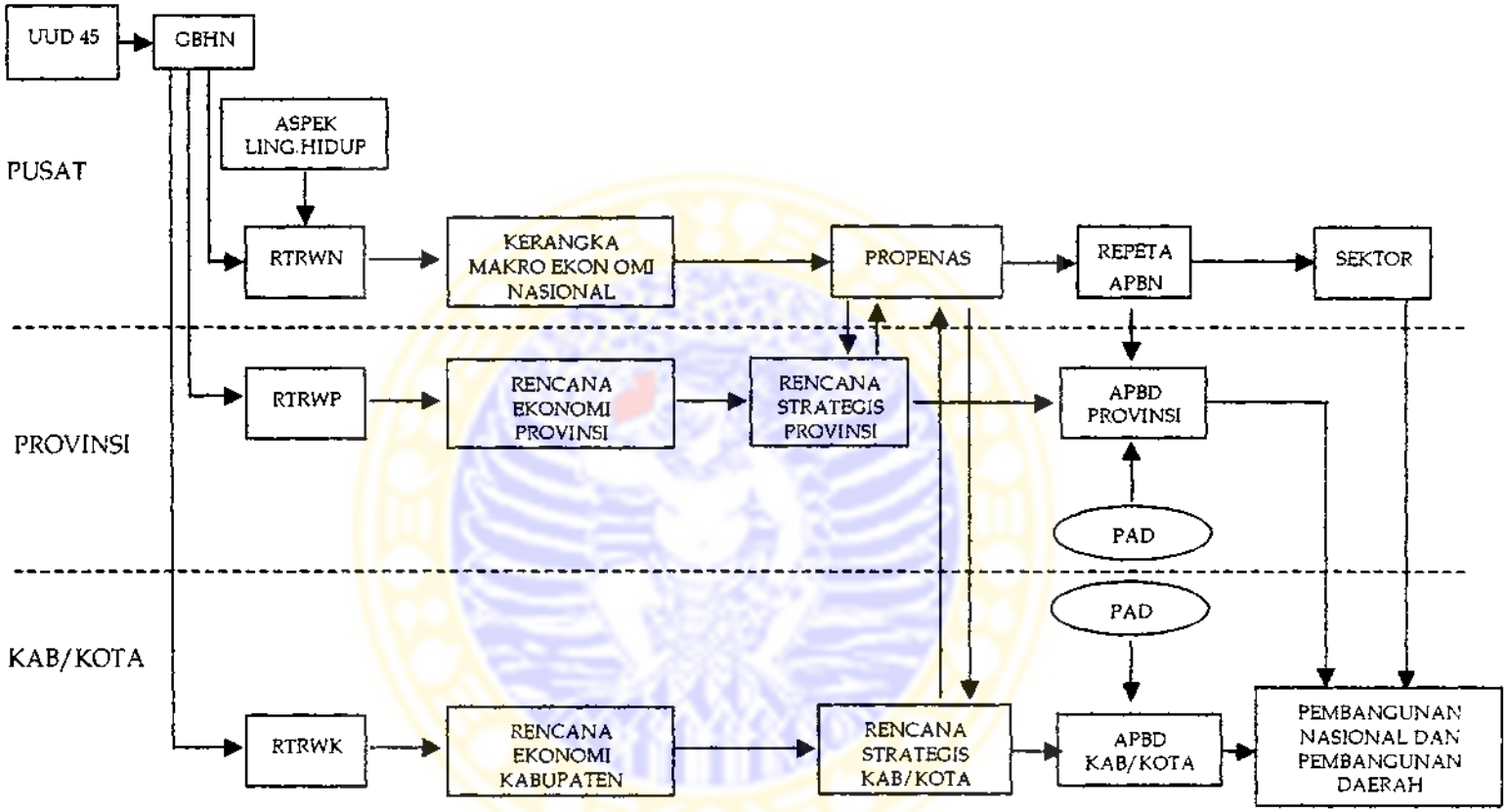

Gambar 2.3. Diagram Sistem Perencanaan Pembangunan Di Indonesia

Keterangan : RTRWN = Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP = Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
RTRWK = Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Sumber : Bratakusuma, 2000 : 85

2.4.4. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut **Kim (1997 : 155-168)**, peranan pemerintah daerah di dalam pertumbuhan ekonomi adalah sangat besar dan nyata. Penelitian yang dilakukannya di Korea, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan penerimaan lain selain pajak daerah berpengaruh negatif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sementara investasi pemerintah memiliki pengaruh nyata dan positif yang lebih besar. Adapun implikasi kebijakan yang penting adalah harus mendorong peran pemerintah daerah, otonomi daerah terus dikenalkan, dan pemerintah pusat seharusnya menstransfer sumber pendapatan yang besar kepada pemerintah daerah.

Miller dan Russek (1997 : 213-237) setelah melakukan penelitian dengan menguji hubungan antara struktur fiskal dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah di Amerika Serikat. Dikemukakan bahwa permasalahan anggaran yang dihadapi, karena pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan dengan jalan meningkatkan pajak, dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa penerimaan pajak berpengaruh nyata dan positif jika penerimaan pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur, dan berpengaruh negatif jika penerimaan pajak itu digunakan untuk pembayaran transfer pemerintah (*transfer payment*).

Pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan ekonomi daerah menurut **Djojohadikusumo (1994 : 28)** berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi

masyarakat. **Kamaluddin (1998 : 10)** menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto (PDB/PDRB) tanpa memperhatikan apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah perubahan dalam struktur ekonomi (dan struktur masyarakat serta kelembagaan yang menyertainya) berlangsung atau tidak.

Paham pertumbuhan ekonomi digunakan dalam teori dinamika sebagaimana dikembangkan oleh para pemikir ekonomi Keynesian dan Neo-Klasik. Pendekatan ini merupakan perpaduan serangkaian dinamika dengan berpangkal pada pengertian dasar mengenai fungsi produksi, yaitu hubungan antara hasil produksi total di satu pihak, dan di pihak lain suatu kombinasi dari sejumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

Hasil produksi total merupakan fungsi dari berbagai kombinasi faktor produksi. **John Maynard Keynes, Roy F.Harrod,** dan **Evsey Domar** (teori Neo-Klasik) mengatakan bahwa, hanya ada dua faktor produksi yang penting bagi pembentukan atau pertumbuhan *output* (Q), yakni barang kapital (K) dan tenaga kerja (L). Teori pertumbuhan Neo-Klasik ini didasarkan pada fungsi produksi **Cobb-Douglas**, yaitu :

$$Y_t = T_t K_t^{\alpha} L_t^{\beta} \qquad (20)$$

di mana : Y_t adalah jumlah produksi pada periode t
T_t adalah tingkat teknologi pada periode t
K_t adalah jumlah stok modal pada periode t
L_t adalah jumlah tenaga kerja pada periode t
α, β adalah produktivitas tenaga kerja dan modal

Selanjutnya fungsi produksi ini dikembangkan dengan menambah dua faktor produksi, yakni *input* antara atau material produksi (M) dan energi (E). Dengan empat macam faktor produksi tersebut, maka fungsi produksi atau model pertumbuhan ekonomi digambarkan dalam bentuk :

$$Q = F(K, L, M, E) \tag{21}$$

Model pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik ini memiliki suatu kelemahan yang serius. Dalam model ini, teknologi dan ilmu pengetahuan dianggap konstan atau kurang penting (dianggap suatu koefisien yang konstan) sehingga produktivitas tenaga kerja dan kapital tidak bisa ditingkatkan. Padahal, sumber pertumbuhan ekonomi yang terpenting adalah peningkatan produktivitas (bukan jumlah) dari faktor produksi yang digunakan dan ini mencerminkan adanya suatu progres teknologi **(Tambunan, 1999 : 61).**

Pemikir ekonomi Neo-Klasik yang lain, **Kaldor** menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang diarahkan pada pertumbuhan sektoral, yang mencakup sektor produksi komoditi primer dan sekunder (industri). Sedangkan kegiatan pada sektor tertier (jasa-jasa) merupakan fungsi dari perkembangan industri. Selanjutnya dikatakan oleh **Kaldor** dalam **Djojohadikusumo (1994 : 50)** bahwa pertumbuhan industri adalah adanya perbedaan pada laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di antara berbagai kawasan, regional, dan internasional.

Teori yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dalam proses pembangunan, dikemukakan oleh pemikir ekonomi Keynesian yaitu **Roy**

F.Harrod dan **Evsey Domar** dalam **(Zadjuli, 1985 : 46)** bahwa, teori **Harrod** menekankan pada sisi penawaran (*supply side*) yang dibentuk dalam persamaan sebagai berikut :

$$G = \frac{S}{C} \tag{22}$$

di mana : G adalah Pertumbuhan *output* (pendapatan).
S adalah perbandingan antara tabungan bersih terhadap pendapatan secara keseluruhan.
C adalah perbandingan antara kapital terhadap *output*.

Selanjutnya model pertumbuhan ekonomi **Domar** dalam **(Zadjuli, 1985 : 52)** mengatakan bahwa, tingkat keseimbangan pertumbuhan ekonomi akan terjadi bila tersedianya kapital yang dapat digunakan secara sepenuhnya dalam keadaan kesempatan kerja penuh (*full employment*) pada harga yang stabil. Namun demikian, pada suatu saat akan terjadi pula hal yang sebaliknya yaitu *disequilibrium* dalam pertumbuhan ekonomi karena kurangnya kapital.

Inti model pertumbuhan ekonomi **Harrod-Domar** adalah suatu relasi jangka pendek antara peningkatan investasi (pertumbuhan kapital) dan pertumbuhan ekonomi. Dua variabel fundamental dari model ini adalah pembentukan kapital atau investasi dan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Jika Y adalah pendapatan (output), K stok kapital, dan I investasi, maka ICOR adalah $\Delta K/\Delta Y$, penambahan kapital dibagi pertumbuhan *output*, sama seperti $I/\Delta Y$, dan $\Delta K = I$.

Model **Harrod-Domar** ini adalah suatu modifikasi yang didasari oleh model pertumbuhan **Domar** dan model pertumbuhan **Harrod**. Model

pertumbuhan **Domar** lebih memfokuskan pada laju pertumbuhan investasi ($\Delta I/I$). Di dalam model ini, investasi ditetapkan harus tumbuh atas suatu persentase yang konstan.

$$\frac{\Delta I}{I} = \left[\frac{1}{ICOR}\right]\alpha \tag{23}$$

Karena α (*the marginal propensity to save*), yakni rasio dari pertumbuhan tabungan (S) terhadap peningkatan pendapatan, dan ICOR kedua-duanya konstan. Sedangkan penekanan model pertumbuhan Harrod lebih kepada pertumbuhan pendapatan (*output*) jangka panjang (*growth path*). Di dalam modelnya, laju pertumbuhan keseimbangan (*warranted growth*) yang membuat besarnya tabungan yang direncanakan ditetapkan selalu sama besarnya dengan investasi yang direncanakan yaitu :

$$sY_t = ICOR(Y_t - Y_{t-1}) \tag{24}$$

$$\frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y} = \frac{s}{ICOR} \tag{25}$$

Model ini tidak saja menekankan pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pentingnya tabungan nasional sebagai sumber utama pembiayaan investasi tersebut. Oleh karena itu, model ini sangat relevan sebagai salah satu alat analisis empiris untuk kasus Indonesia maupun untuk tiap-tiap daerah di Indonesia.

Selain model-model pertumbuhan yang telah disebutkan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari perubahan atau pertumbuhan pada sisi permintaan agregat (*aggregate demand*) dan sisi penawaran agregat (*aggregate supply*). Pertumbuhan ekonomi yang

diakibatkan oleh pertumbuhan kedua sisi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

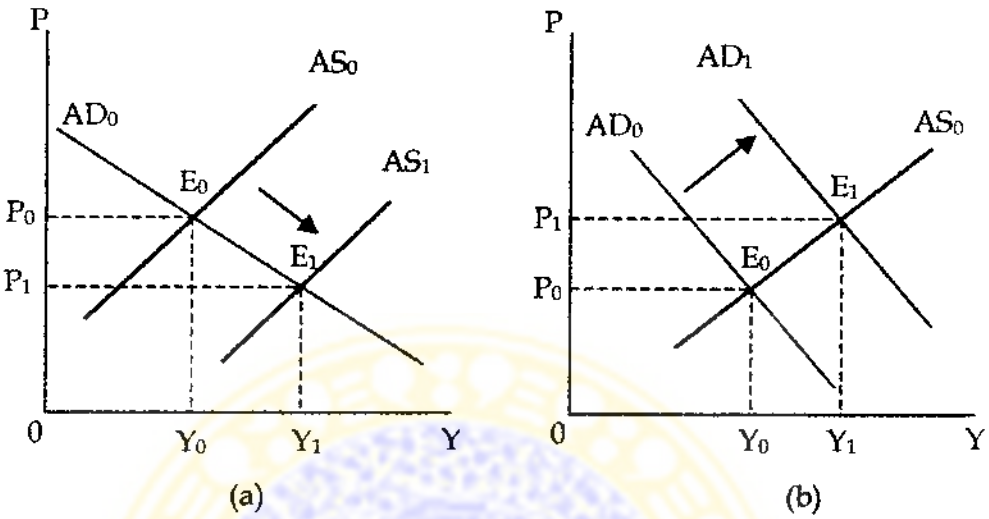

Gambar 2.4. Keseimbangan Perekonomian
Sumber : Tambunan, 1999 : 104

Titik perpotongan antara kurva permintaan agregat (AD) dan kurva penawaran agregat (AS) adalah titik keseimbangan (*equilibrium*) perekonomian yang menghasilkan sejumlah *output* tertentu dan tingkat harga umum tertentu. *Output* agregat yang dihasilkan dalam suatu negara dan pada waktu tertentu disebut Produk Domestik Bruto (PDB), dan untuk daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang selanjutnya membentuk pendapatan nasional/regional (Y). Pada panel (a) dapat dilihat, bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh bergesernya kurva penawaran agregat (AS1), atau pergeseran kurva permintaan agregat (AD1) pada panel (b).

Pergeseran kurva AD ke kanan, mencerminkan peningkatan permintaan dalam perekonomian. Sisi permintaan agregat (atau

penggunaan PDB/PDRB), terdiri dari konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto (X-M). Sedangkan pergeseran kurva AS kekanan, oleh Mazhab Neo-Klasik disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja (L) dan kapital (K), di mana teknologi dianggap konstan dan oleh karenanya produktivitas juga konstan. Persentase pertambahan *output* bisa lebih besar (*increasing returns to scale*), lebih kecil (*decreasing returns to scale*), atau sama (*constant returns to scale*) dengan persentase pertumbuhan jumlah dari kedua faktor produksi tersebut.

Pada pihak lain, pemikir teori modern mengenai pertumbuhan ekonomi mempunyai sejumlah perbedaan yang mendasar dengan Mazhab Neo-Klasik. Menurutnya, faktor produksi tenaga kerja tidak dilihat dari aspek kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Kualitas tenaga kerja tidak saja dilihat dari pendidikan/keterampilan, tetapi juga kesehatan. Demikian juga halnya dengan kapital, kualitasnya (yang mencerminkan progres teknologi) lebih penting daripada kuantitasnya (akumulasi kapital). Kewirausahaan, termasuk kemampuan untuk melakukan inovasi, merupakan salah satu faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi.

Keseimbangan dalam perekonomian, merupakan persamaan antara sisi permintaan agregat dan sisi penawaran agregat. Dalam model ekonomi makro dari **Keynes** digambarkan sebagai berikut :

$$Y = C + I_b + G + X - M \tag{26}$$

di mana : Y adalah sisi penawaran agregat (total output/PDB)
C adalah cY, Konsumsi rumah tangga yang besarnya ditentukan oleh tingkat pendapatan dan MPC (*Marginal Propensity to Consume*).
I_b adalah -ir + I_a, Investasi yang ditentukan oleh tingkat bunga dan faktor yang bersifat otonom
G adalah G_a, Pengeluaran pemerintah, tercermin dalam APBN
M adalah mY + M_a, Impor, ditentukan oleh pendapatan, MPM (*Marginal Propensity to Import*), dan faktor yang bersifat otonom.
X adalah X_a, Besarnya ekspor

Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah, secara sederhana dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tahun tertentu dibanding dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, dan besarnya peranan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, digunakan model regresi berganda, dan diestimasi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

2.5. Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dalam perekonomian nasional merupakan fenomena dunia. Suatu hal yang wajar apabila dalam suatu negara terdapat beberapa daerah terbelakang, dibandingkan dengan daerah lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain adalah, struktur sosial ekonomi dan distribusi spasial dari sumber daya bawaan (*endowment factor*).

Pada umumnya ketimpangan antar daerah lebih tajam terjadi pada negara-negara sedang berkembang, karena kekakuan sosial-ekonomi

(*socio-economic rigidities*), dan imobilitas faktor (*factor immobilities*). Dalam mengatasi masalah ketimpangan tersebut, hampir semua negara berusaha menerapkan kebijakan khusus untuk pembangunan daerah terbelakang.

Di dalam membahas ketimpangan pembangunan antar daerah, ada dua teori yang perlu diperhatikan, yaitu *generative growth theory* dan *competitive growth theory*.

Generative growth theory menyatakan bahwa, pada saat perekonomian nasional bertumbuh mantap (*steady growth*), banyak persoalan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan. Beberapa daerah tumbuh lebih cepat daripada daerah lain. Namun demikian, sejauh semua daerah menikmati pertumbuhan ekonomi, masalah distribusi dan redistribusi menjadi tidak terlalu penting. Dengan perkataan lain, laju pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih cepat, kalau laju pertumbuhan ekonomi daerah terbelakang dapat ditingkatkan.

Competitive growth theory berdasarkan pada asumsi bahwa, laju pertumbuhan ekonomi nasional, ditentukan oleh beberapa kekuatan eksogen. Kemudian laju tersebut seolah-olah "**dibagi**" kepada beberapa daerah. Situasi ini terjadi apabila laju pertumbuhan ekonomi nasional rendah. Pertumbuhan ekonomi beberapa daerah berlangsung dengan mengorbankan pertumbuhan lain.

Kedua teori tersebut, masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, permasalahan yang sebenarnya adalah apa yang sebaiknya menjadi arah kebijaksanaan

dalam situasi *generative*, dan apa yang menjadi kebijaksanaan dalam situasi *competitive* agar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dapat dicapai.

Untuk menganalisis ketimpangan pembangunan antar daerah, digunakan **Williamson Index**, dengan formulasi sebagai berikut :

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum\left(Y_j - \bar{Y}\right)^2 \cdot \frac{f_j}{n}}{\bar{Y}}} \qquad 0 < V_w < 1 \qquad (27)$$

di mana : V_w adalah Williamson Index
f_j adalah populasi di daerah j
Y_j adalah pendapatan per kapita di daerah j
n adalah populasi total
$\bar{Y}$ adalah pendapatan rata-rata seluruh daerah

Williamson Index bergerak dari 0-1. Jika indeks mendekati 0, berarti sangat merata, dan sebaliknya bila indeks mendekati 1, berarti sangat timpang.

Untuk lebih menggambarkam ketimpangan antar daerah yang sebenarnya, maka pendapatan regional daerah ke j diberi bobot dengan indeks biaya hidup di daerah tersebut. Dengan demikian, formulasi **Williamson Index** menjadi :

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum\left(R_j - \bar{R}\right)^2 \cdot \frac{f_j}{n}}{\bar{R}}} \qquad 0 < V_w < 1 \qquad (28)$$

di mana : R_j adalah Y_j/I_j
I_j adalah indeks biaya hidup daerah ke j
$\bar{R}_j$ adalah Rj rata-rata **(Budiharsono, 1989 : 81-83)**

2.6. Beberapa Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan hubungan fiskal antar unit-unit pemerintahan, telah banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi, yang pada umumnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Di samping itu, ada beberapa pendekatan yang mempelajari posisi fiskal antar negara dan antar daerah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dan sistem pajak representatif (*representative tax system*). Namun demikian, penelitian mengenai posisi fiskal daerah yang berfokus pada kemandirian pemerintah daerah, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, belum banyak dilakukan. Hal tersebut menjadi sangat penting setelah diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

2.6.1. Uppal dan Suparmoko (1986)

Studi yang dilakukannya ialah menganalisis perpajakan di Indonesia, antara lain masalah hubungan keuangan antar unit pemerintah. **Uppal** dan **Suparmoko** menemukan bahwa sebanyak 76 persen penerimaan Provinsi berasal dari bantuan pemerintah pusat, dan 87 persen penerimaan Kabupaten/Kotamadya berasal dari pemerintah pusat pada tahun 1980/1981-1984/1985. Ini menunjukkan bahwa sentralisasi struktur fiskal tinggi, dan distribusi bantuan antar Provinsi sangat tidak merata. Bantuan pemerintah pusat berhubungan negatif dengan upaya pengumpulan pajak dan kebutuhan fiskal daerah. Seharusnya bantuan

pusat berhubungan positif dengan upaya pengumpulan pajak dan kebutuhan fiskal daerah sesuai dengan teori.

2.6.2. Hirawan (1986)

Penelitian yang dilakukannya ialah menganalisis keuangan daerah. Ia mengatakan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah tidak terlepas dari tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah tersebut. Fenomena umum di negara-negara berkembang, bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pusat menunjukkan tendensi yang meningkat. Bagi Indonesia tampaknya perlu adanya perubahan hubungan perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pemerintah daerah memperoleh bagian dari sumber-sumber pajak utama seperti dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai melalui mekanisme bagi hasil (*sharing tax*).

2.6.3. Kristiadi (1986)

Studi yang dilakukannya mengenai upaya peningkatan pendapatan daerah. Ia menemukan bahwa biaya pemungutan pajak relatif lebih tinggi dari hasil pajak, karena jenis pajak daerah kurang potensil. Masalah-masalah lebih lanjut yang perlu diatasi adalah organisasi dan perundang-undangan struktur perpajakan, serta perlu koordinasi dan efisiensi pemungutan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah desentralisasi fiskal, sebenarnya sudah dikenal sejak pemerintah Hindia Belanda.

2.6.4. Bawazier (1988)

Penelitiannya menyangkut hubungan fiskal antara pusat dan daerah di Indonesia. Ia mengemukakan bahwa keuangan daerah sangat tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Pada umumnya pajak daerah belum memenuhi kriteria "pajak yang baik". Bantuan pemerintah pusat dalam bentuk berbagai proyek Inpres belum sanggup mengobati disparitas dan terdapat ketidak seimbangan bantuan antar daerah.

2.6.5. Sanders (1977)

Sander menganalisis keuangan daerah di Indonesia, terutama membahas Alokasi Devisa Otomatis (ADO) kepada pemerintah daerah tingkat I. Masing-masing daerah tingkat I menerima sepuluh persen devisa dari hasil ekspor melalui pelabuhan di daerah mereka. Alokasi dana pembangunan untuk daerah melalui ADO mempunyai beberapa kelemahan, misalnya daerah dengan fasilitas pelabuhan yang baik, menerima devisa yang lebih banyak, walaupun kurang menghasilkan komoditas ekspor. Selain itu, terdapat hambatan perdagangan antar daerah, dan terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah karena perbedaan penerimaan devisa otomatis yang sangat menyolok.

2.6.6. Musgrave dan Musgrave (1984)

Penelitian yang dilakukannya mengenai kebijakan perpajakan untuk pemerintah Indonesia. Mereka mengemukakan perlu adanya suatu perubahan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah-masalah dasar yang dipertanyakan adalah bagaimana cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ukuran-ukuran apa

yang digunakan dalam menentukan pemberian subsidi atau bantuan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pelayanan publik yang dilimpahkan kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah.

2.6.7. Lains (1974)

Studi yang dilakukannya adalah keuangan dan pembangunan daerah dengan memilih Provinsi Sumatera Barat sebagai kasus. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tampak bahwa kemampuan pembiayaan dengan dana asli daerah sangat kecil. Atau dengan kata lain, sebagian besar pembangunan daerah dibiayai oleh pemerintah pusat. Kurangnya penerimaan asli daerah karena pajak-pajak yang diserahkan ke daerah kurang potensil dan tergolong "**kurus**". Sedangkan pajak-pajak yang tergolong "**gemuk**" menjadi hak pusat misalnya, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Ia menyarankan perlu adanya desentralisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta sistem perpajakan, yaitu pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

Dalam menentukan bantuan kepada daerah, **Lains** mengemukakan formula bantuan sebagai berikut :

$$G_t^i = \frac{P_t^i \cdot Y_t / Y_t^i \cdot E_t^i / E_t}{\sum P_t^i \cdot Y_t^i / Y_t \cdot E_t^i / E_t} \cdot F_t^d \qquad (29)$$

$$E_t^i = T_t^i / P_t^i \cdot Y_t^i$$

$$E = T_t / P_t \cdot Y_t$$

di mana: G^i_t adalah jumlah bantuan keuangan yang akan diterima oleh Provinsi i pada tahun t
P^i_t adalah jumlah penduduk di Provinsi i pada tahun t
P_t adalah jumlah penduduk Indonesia pada tahun t
Y_t adalah pendapatan per kapita nasional pada tahun t
Y^i_t adalah pendapatan per kapita daerah di Provinsi i pada tahun t

T^i_t adalah penerimaan pajak pusat di Provinsi i pada tahun t
T_t adalah total penerimaan pajak pusat di Indonesia pada tahun t
F^d_t adalah dana yang tersedia untuk didistribusikan pada tahun t

2.6.8. Booth (1977)

Booth meneliti tentang perbandingan pajak antar Provinsi, kapasitas pajak dan kebutuhan pembangunan daerah di Indonesia. Ia mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia sangat terdesentralisasi dan kurang tekanan pada peningkatan kapasitas pajak pada unit pemerintah yang lebih bawah. Oleh karena itu, perlu sistem perpajakan yang lebih desentralisasi sesuai dengan pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Formulasi alokasi bantuan pemerintah pusat menurut Booth adalah :

$$G = f(T, Y) \qquad (30)$$
$$dG / dT > 0$$
$$dG / dY < 0$$

di mana : G adalah besarnya bantuan kepada daerah
T adalah upaya pengumpulan pajak daerah
Y adalah kapasitas pajak masing-masing daerah

2.6.9. Sung Tai Kim (1997)

Penelitiannya dilakukan di Korea tentang peranan Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan pemerintah daerah di dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah sangat nyata. Selanjutnya dikatakan, bahwa pajak daerah dan penerimaan lain selain pajak daerah berpengaruh negatif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sementara investasi pemerintah daerah dan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah

mempunyai pengaruh nyata dan positif yang lebih besar. Adapun implikasi kebijakan yang penting adalah harus mendorong peran pemerintah daerah, otonomi daerah terus dilanjutkan, dan pemerintah pusat seharusnya mentransfer sumber penerimaan yang besar kepada pemerintah daerah.

2.6.10. Stephen M.Miller and Frank S.Russek (1997)

Melakukan penelitian dengan menguji hubungan antara struktur fiskal dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah di Amerika Serikat. Dikemukakan, bahwa permasalahan anggaran yang dihadapi disebabkan oleh peningkatan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan, bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, jika pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur, dan berpengaruh negatif jika digunakan untuk pembayaran transfer pemerintah (*transfer payment*).

2.6.11. Alisjahbana (2000)

Studi yang dilakukannya mengenai implementasii UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah (UU-PKPD) terhadap penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Asumsi yang digunakan ialah; (a) DAU merupakan transfer pemerintah pusat yang bersifat umum dan merupakan ekuivalen dari pengaturan lama berupa Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan Inpres pembangunan, (b) perhitungan DAU dilakukan dengan menggunakan bobot daerah: jumlah penduduk (bobot : 22,5 %); luas

wilayah (bobot : 22,5 %); PDRB non migas (bobot : 22,5 %); rasio PAD/APBD (bobot : 22,5 %); pemerataan (bobot : 10 %). Pemilihan bobot ini didasarkan atas kriteria kebutuhan obyektif daerah otonom dan potensi ekonomi daerah. PDRB non migas digunakan sebagai salah satu variabel yang mencerminkan potensi ekonomi daerah, khususnya daerah-daerah dengan basis ekonomi di luar sektor migas. Pertimbangan digunakannya PDRB non migas disebabkan nilainya akan lebih mencerminkan kinerja ekonomi di luar sektor sumberdaya alam (SDA), sedangkan kontribusi SDA daerah yang kembali ke daerah sudah diperhitungkan dalam bagian daerah dari SDA.

Besarnya DAU yang dialokasikan ke daerah berdasarkan UU PKPD yaitu 25 % dari penerimaan dalam negeri. Dari sejumlah tersebut, 90 % untuk daerah Kabupaten/Kota, dan 10 % untuk daerah Provinsi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa, terjadi perubahan komposisi penerimaan transfer Pemerintah Dati I dan Dati II secara signifikan. Transfer bantuan umum (*block grants*) yang diterima Pemerintan Dati I mengalami penurunan rata-rata 75 % - 80 % dibandingkan dengan pengaturan lama. Sebaliknya, transfer bantuan umum yang diterima Pemerintah Dati II meningkat antara 180 % - 223 %.

2.6.12. Sjafrizal (2000)

Sjafrizal melakukan studi mengenai ketimpangan ekonomi daerah di Indonesia. Perhitungan didasarkan pada produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa migas untuk periode tahun 1971-1998. Perhitungan ketimpangan ekonomi daerah di Indonesia, dilakukan dengan mengguna-

kan **Indeks Williamson (1965)**. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi daerah di Indonesia adalah cukup tinggi dengan indeks ketimpangan berkisar antara 0,396-0,671. Selain itu, terdapat adanya tendensi peningkatan ketimpangan ekonomi daerah yang terus menerus sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1998.

Pengecualian hanya terlihat untuk tahun 1998 dimana terjadi sedikit penurunan tingkat ketimpangan dari 0,671 pada tahun 1997 menjadi 0,605 pada tahun 1998. Hal ini, disebabkan terjadinya krisis ekonomi nasional dimana daerah-daerah maju dengan tingkat konsentrasi industri yang tinggi mengalami kemunduran ekonomi yang sangat tajam. Sementara daerah yang kurang maju yang umumnya adalah daerah pertanian ternyata tidak mengalami kemunduran yang tinggi. Akibatnya perbedaan antara daerah maju dan daerah yang kurang maju menjadi sedikit berkurang.

BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan alur pemikiran secara sistimatis yang dimulai dengan pendekatan empirik perekonomian nasional terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan hal tersebut, akan ditemukan suatu fenomena yang turut mempengaruhi kinerja perekonomian nasional dan daerah akibat adanya globalisasi ekonomi dan krisis ekonomi. Dengan demikian, maka pada tingkat daerah diperlukan paradigma baru pembangunan ekonomi yakni; berupa regionalisasi ekonomi, pendekatan manajemen pembangunan yang tadinya banyak dilakukan secara terpusat, berubah dengan menggunakan pendekatan desentralisasi.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan daerah di Indonesia. Salah satu aspek yang penting berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan antar daerah.

Implikasi penerapan kedua Undang-Undang tersebut, adalah timbulnya berbagai masalah di daerah. Hal ini disebabkan karena daerah harus berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri. Kemampuan keuangan atau kapasitas/potensi fiskal daerah menjadi sangat penting,

karena sangat menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi. Artinya, daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk mengetahui sejauh mana permasalahan-permasalahan tersebut, maka digunakan pendekatan kemandirian daerah atau derajat desentralisasi fiskal daerah yang dikemukakan oleh **Smith (1973 : 22), Uppal (1986: 1)**, dan **Mubyarto (2001 : 101), Makhfatih (1997: 1), Yuliati (2001: 14)**, dan **Reksohadiprodjo (2001: 155)**. Pendekatan ini menekankan kepada dua komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi dapat diketahui dengan menghitung rasio antara besarnya PAD dengan total penerimaan daerah, rasio antara besarnya PAD dengan besarnya pengeluaran pembangunan (PP), dan rasio antara besarnya PAD dengan besarnya pengeluaran rutin (PR). Rasio antara PAD dengan pengeluaran rutin disebut juga Indeks Kemampuan Rutin (IKR).

Bertitik tolak pada pengertian tersebut, maka kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan meningkatkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah (BUMD), penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain yang syah (misalnya hibah, dana darurat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah merupakan jenis penerimaan daerah yang berhubungan langsung dengan peranan masyarakat. Dengan demikian, penerimaan ini akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi (yang dicerminkan oleh besar kecilnya jumlah PDRB) pada suatu daerah (**Kirana, 2000 : 72-730**). Oleh karena itu, jumlah penduduk dan PDRB merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

Bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (BD) merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu atau mendorong peningkatan PAD. Hakikat bantuan atau subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Untuk itu, daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan PAD (**Mahi, 2000 : 8-9**). Oleh karena itu, bantuan atau subsidi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

Adanya keleluasaan/kebebasan di dalam menggunakan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat, daerah betul-betul dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan PAD. Secara teoritis, bantuan atau subsidi dalam bentuk bantuan umum (*block grants*) lebih memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggunakannya sesuai dengan prioritas daerah yang bersangkutan.

Penggunaan bantuan atau subsidi tersebut adalah untuk memperbaiki infrastruktur perekonomian daerah, akan mendorong peningkatan penerimaan PAD (**Arsyad, 1990: 225**). Dengan demikian, pengeluaran pembangunan (PP) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Selanjutnya pengeluran rutin (PR) yang diperuntukkan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Dengan demikian, pengeluaran rutin merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD pada suatu daerah.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melihat kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi menurut teori-teori sebelumnya, pada hakikatnya menekankan pada aspek efisiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Sebab, dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia selama ini, pembiayaan pembangunan bagi kebanyakan daerah, masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sendiri selama ini, selain disebabkan oleh faktor sumberdaya manusia dan kelembagaan, juga disebabkan oleh batasan hukum.

Masih diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengalokasikan sebagian besar jenis-jenis pajak yang "**gemuk**" bagi pemerintah pusat,

ADLN - Perpustakaan Unair

merupakan salah satu penyebab keterbatasan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaannya. Kondisi semacam ini, jelas tidak akan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diharapkan. Penyelenggaraan otonomi perlu diimbangi dengan kemampuan untuk menggali dan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi masing-masing daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (*public services*).

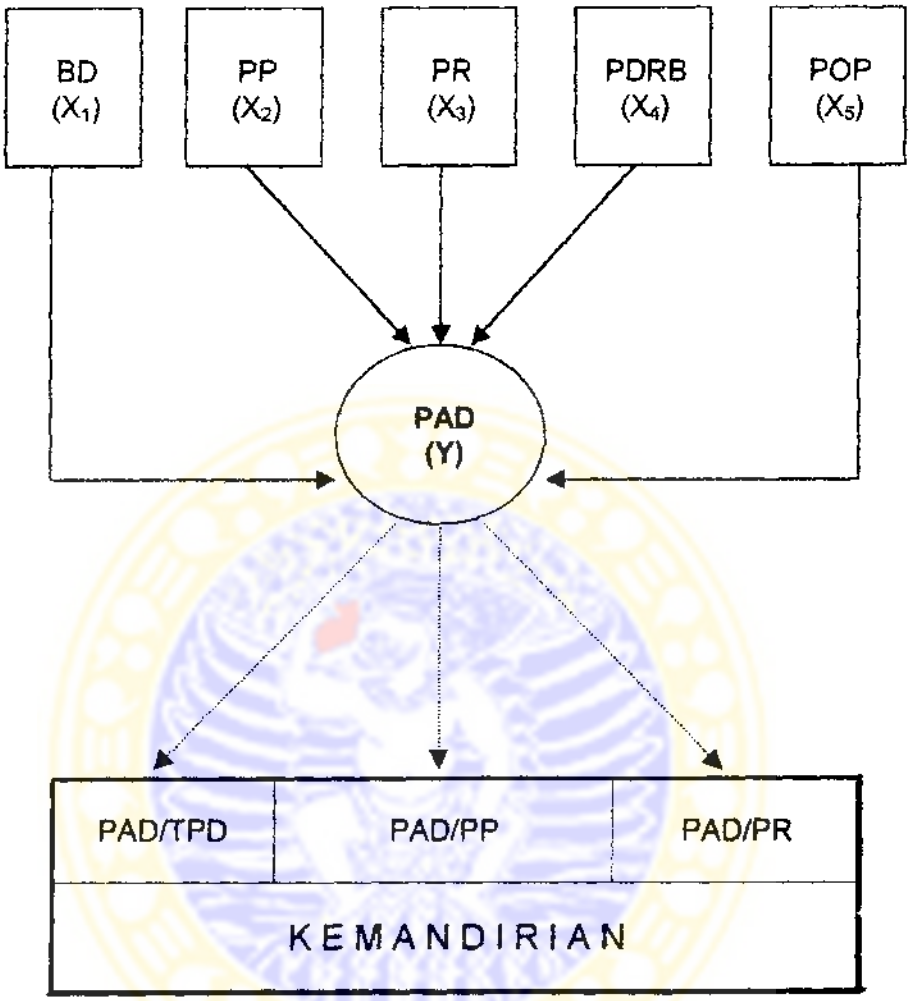

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Pemikiran

Berdasarkan pada kerangka konsep pemikiran (Gambar 3.1), dikemukakan 3 pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah, yaitu :

1. Perbandingan atau rasio antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah (TPD). Apabila rasio ini lebih besar atau sama dengan 1 atau ≥ 1, maka disebut mandiri. Jika rasio ini lebih kecil dari 1 atau < 1, dan mendekati 0, maka disebut kurang mandiri. Jika rasio ini lebih kecil dari 1 atau < 1, dan mendekati 1, maka disebut kemandirian sedang.
2. Perbandingan atau rasio antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan pengeluaran pembangunan (PP). Apabila rasio ini lebih besar atau sama dengan 1 atau ≥ 1, maka disebut mandiri. Jika rasio ini lebih kecil dari 1, dan mendekati 0, maka disebut kurang mandiri. Jika rasio ini lebih kecil dari 1 atau < 1, dan mendekati 1, maka disebut kemandirian sedang
3. Perbandingan atau rasio antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan pengeluaran rutin (PR). Apabila rasio ini lebih besar atau sama dengan 1 atau ≥ 1, maka disebut mandiri. Jika rasio ini lebih kecil dari 1, dan mendekati 0, maka disebut kurang mandiri. Jika rasio ini lebih kecil dari 1 atau < 1, dan mendekati 1, maka disebut kemandirian sedang Rasio antara PAD dengan PR disebut juga Indeks Kemampuan Rutin (IKR).

Bertitik tolak pada pendekatan-pendekatan tersebut, dapat diketahui bahwa, indikator utama kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) atau posisi fiskal daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus berupaya seoptimal mungkin meningkatkan kemampuan keuangan sendiri dengan cara meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi sangat penting karena sangat menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi.

Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai indikator utama yang sangat menentukan kemandirian pemerintah daerah, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Bantuan atau subsidi (BD)
2. Pengeluaran pembangunan (PP)
3. Pengeluaran rutin (PR)
4. produk domestik regional bruto (PDRB)
5. Jumlah penduduk (POP)

Bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sesungguh-nya merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu atau mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada daerah tersebut, dan bukan sebaliknya. Hakikat bantuan atau subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Untuk itu, daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada

sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengeluaran pembangunan yang diperuntukkan kepada perbaikan sarana dan prasarana, serta infrastruktur perekonomian daerah, akan mendorong peningkatan PAD. Selanjutnya, pengeluaran rutin yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, dapat mendorong peningkatan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan PAD.

PAD berhubungan langsung dengan peranan masyarakat, dengan demikian, PAD akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi suatu daerah.

3.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bantuan atau subsidi (BD) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.
2. Pengeluaran pembangunan (PP) yang dianggarkan oleh pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.
3. Pengeluaran rutin (PR) yang dianggarkan oleh pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

BAB 4
METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ilmu-ilmu sosial pada umumnya terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu penelitian eksploratif (*explorative research*), penelitian deskriptif (*descriptive research*), dan penelitian penjelasan (*explanatory research*). Berdasarkan pada pengelompokan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian penjelasan (*explanatory research*). Karena penelitian ini menjelaskan hubungan dan pengaruh dari beberapa variabel bebas (*independent variables*) terhadap satu variabel terikat (*dependent variable*). Selanjutnya, penelitian ini termasuk juga penelitian deskriptif, karena memuat beberapa penjelasan-penjelasan yang digambarkan dengan menggunakan tabel, gambar, dan grafik.

Penelitian ini didukung dengan teori-teori dan metode-metode analisis untuk menjawab permasalahan yang diajukan antara lain, analisis mengenai kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah, dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) atau posisi fiskal daerah.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah merupakan dasar pemikiran pelaksanaan penelitian ini. Penerapan kedua undang-undang tersebut pada seluruh wilayah Republik Indonesia dimulai pada

tanggal 1 Januari 2001. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kemampuan pemerintah daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa untuk meningkatkan penerimaannya sendiri di dalam memasuki era otonomi daerah dengan menggunakan data runtun waktu (*time series*) mulai dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2000.

4.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

4.2.1. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (ditaksir). Populasi tersebut dibedakan menjadi populasi sampling dan populasi sasaran (**Palte, 1978 : 12**).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, ditetapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berada pada Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan populsi dalam penelitian ini.

4.2.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara cermat untuk mewakili populasi (**Emory dan Cooper, 1991 : 82**)

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampel yang secara langsung (sengaja) menentukan sampel dan besarnya sampel. Pemilihan metode ini dengan pertimbangan bahwa, semua Kabupaten dan Kota di Provinsi

Sulawesi Selatan mempunyai karakteristik yang hampir sama dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah. Untuk itu, diambil sampel Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Pemilihan kedua daerah ini sebagai sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa, Kota Makassar merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Sedangkan Kabupaten Gowa merupakan daerah percontohan otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1995.

4.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan merupakan data runtun waktu (*time series*) yang dikumpulkan dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Bantuan atau Subsidi (BD)
3. Pengeluaran Pembangunan (PP)
4. Pengeluaran Rutin (PR)
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
6. Jumlah penduduk

Data tersebut diperoleh dari :

1. Badan Pusat Statistik
2. Dinas Pendapatan Daerah
3. Kantor Daerah

4.4. Variabel Penelitian

4.4.1. Klasifikasi Variabel

Variabel adalah suatu sifat yang dapat memiliki bermacam-macam nilai (**Kerlinger, 1990 : 49**). Identifikasi variabel ini didasarkan atas kajian teoritis dan empiris sebagai acuan kerangka berfikir deduktif dan eksplorasi melalui kajian empiris untuk kesimpulan induktif.

Sesuai dengan kerangka konseptual, variabel dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu; variabel pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bantuan atau subsidi (BD), pengeluaran pembangunan (PP), pengeluaran rutin (PR), produk domestik Regional Bruto (PDRB), dan jumlah penduduk (POP) sebagai variabel bebas (*independent variables*). Selain itu, digunakan variabel anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang memuat total penerimaan daerah (TPD) sebagai pembanding.

4.4.2. Definisi Operasional Variabel

Batasan atau definisi operasional variabel adalah pengertian dan rumusan dari variabel, maka untuk mengoperasionalkannya perlu diberikan pengertian sebagai berikut :

4.4.2.1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*explanatory variable*) adalah variabel yang dapat menjelaskan nilai variabel lain yang disebut variabel terikat atau variabel yang dijelaskan. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bantuan atau Subsidi (X1)

Bantuan antar unit pemerintahan (*intergovernment grants*) adalah bantuan atau subsidi dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. Bantuan atau subsidi yang diberikan terdiri dari tiga kelompok yaitu :

a. Subsidi daerah otonom (SDO) terdiri dari; belanja pegawai, belanja non pegawai yang diarahkan, dan belanja non pemerintah yang ditetapkan. Belanja non pegawai yang ditetapkan terdiri dari dua kategori, yaitu bantuan dan ganjaran.

b. Bantuan Inpres, yaitu bantuan umum yang terdiri dari bantuan pembangunan daerah tingkat I (Provinsi), bantuan pembangunan daerah tingkat II (Kabupaten/Kota), dan bantuan pembangunan desa. Bantuan khusus terdiri dari bantuan penunjang jalan dan jembatan kabupaten, bantuan pembangunan sekolah dasar, bantuan pembangunan sarana kesehatan, dan bantuan penghijauan dan reboisasi.

c. Dana daftar isin proyek (DIP), dana ini merupakan alokasi sektoral, dari pusat langsung ke daerah.

Nilai keseluruhan bantuan atau subsidi tersebut, merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu atau mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hakikat bantuan atau subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Untuk itu, daerah penerima bantuan perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana

bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Pengeluaran Pembangunan (X2)

Pengeluaran pembangunan (PP) merupakan jenis pengeluaran daerah yang digunakan untuk memperbaiki sarana-sarana ekonomi dan infrastruktur perekonomian daerah, sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui proses *multiplier* dan *accelerator.*

3. Pengeluaran Rutin (X3)

Pengeluaran rutin (PR) merupakan jenis pengeluaran daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

4. Produk Domestik Regional Bruto (X4)

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator pembangunan ekonomi suatu daerah. Semakin besar nilai PDRB menunjukkan kemajuan pembangunan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Dengan demikian, PDRB mempunyai efek ganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, secara dinamis melalui proses keterkaitan antar sektor dan antar wilayah.

5. Jumlah Penduduk (X5)

Jumlah penduduk (POP) berhubungan langsung dengan seluruh aktifitas ekonomi. Dengan demikian jumlah penduduk mempunyai

pengaruh terhadap jumlah wajib pajak yang kemudian berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

4.4.2.2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang nilainya dijelaskan oleh variabel lain atau oleh variabel bebas. Variabel terikat atau variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Pendapatan dari dinas-dinas
4. Hasil dari perusahaan daerah
5. Lain-lain pendapatan daerah yang syah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Variabel terikat ini mencerminkan potensi dan dinamika perekonomian daerah. Semakin besar nilai PAD, menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk berotonomi juga tinggi. Dengan demikian, daerah tersebut mempunyai kemandirian yang tinggi dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah.

4.4.2.3. Variabel Pembanding

Variabel pembanding ini digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif kemampuan pembiayaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsinya melayani masyarakat (*public service*).

Variabel pembanding dalam penelitian ini adalah total penerimaan daerah (TPD) yang secara langsung dapat dilihat dalam struktur anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD). Total penerimaan daerah terdiri dari :

1. Sisa lebih perhitungan tahun lalu
2. Pendapatan asli daerah
3. Bagi hasil pajak (pendapatan dari pajak-pajak pusat yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah) dan bagi hasil bukan pajak.
4. Bantuan atau subsidi
5. Pinjaman pemerintah daerah.

4.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

4.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengambil Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian.

Kota Makassar dijadikan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa, Kota Makassar adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, sehingga menjadi barometer pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Kabupaten Gowa dijadikan lokasi penelitian karena daerah ini merupakan proyek percontohan otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1995.

4.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2000.

4.6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Penyelesaian teknik regresi, menggunakan bantuan program SPSS versi 10.1.

Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y adalah pendapatan asli daerah (PAD)

X_1 adalah bantuan atau subsidi (BD)

X_2 adalah pengeluaran pembangunan (PP)

X_3 adalah pengeluaran rutin (PR)

X_4 adalah produk domestik regional bruto (PDRB)

X_5 adalah jumlah penduduk (POP)

B_0 adalah titik potong (*intercept*) atau konstanta

B_1-B_5 adalah koefisien regresi (*slope*)

e adalah faktor kesalahan (*error term*)

4.6.1. Beberapa Pengujian

Penggunaan model persamaan regresi linier berganda ini adalah untuk mengetahui hubungan atau asosiasi (korelasi) antara masing-masing variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Selanjutnya, untuk

mengetahui pengaruh masing-masing maupun secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Untuk itu dilakukan beberapa pengujian untuk menetapkan seberapa baik model tersebut secara nyata dan cocok. Semua pengujian ditetapkan pada taraf kepercayaan (*level of significance*) 95 % atau alpha (α) = 5% atau kesediaan untuk menerima kesalahan sebesar 5 %.

Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. *Goodness of Fit* (Mutu Penjajagan)

Pengujian *goodness of fit* dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau asosiasi (korelasi) antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Ukuran yang digunakan untuk *goodness of fit* dari model linier adalah R^2 atau koefisien determinasi (karena variabel yang digunakan merupakan angka interval, maka digunakan koefisien korelasi Pearson). R^2 yang mempunyai nilai nol (0) tidak harus berarti tidak ada hubungan atau asosiasi antara variabel-variabel, akan tetapi hanya menunjukkan tidak adanya hubungan linier.

Besarnya angka koefisien korelasi berkisar pada 0 (tidak ada korelasi sama sekali) atau tidak ada hubungan linier, dan 1 (korelasi sempurna). Tanda negatif (-) menunjukkan adanya arah yang berlawanan, sedangkan tanda positif (+) menunjukkan arah yang sama. Untuk mengetahui apakah angka koefisien korelasi benar-benar signifikan, atau dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, maka dilakukan uji hipotesis.

H_O : Tidak ada hubungan antara variabel-variabel atau = 0

H_A : Ada hubungan antara variabel-variabel atau ≠ 0

Pengujian dilakukan dua sisi karena akan diketahui ada atau tidak ada hubungan atau asosiasi (korelasi), dan bukan lebih besar atau lebih kecil. Apabila didasarkan pada probabilitas, maka :

H_0 diterima, Jika probabilitas > 0,05

H_0 ditolak, Jika probabilitas ≤ 0,05

2. Uji Regresi Berganda

Uji regresi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing dan secara bersama-sama variabel bebas (*independent variables*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t (*student's test*) dan uji F (*fisher test*).

Hipotesis :

H_0 : Koefisien regresi tidak signifikan atau $B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = B_5 = 0$

H_A : Koefisien regresi signifikan atau $B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = B_5 \neq 0$

a. Membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel

H_0 diterima, Jika statistik t_{hitung} < statistik t_{tabel}

H_0 ditolak, Jika statistik t_{hitung} > statistik t_{tabel}

b. Berdasarkan probabilitas

H_0 diterima Jika probabilitas > 0,05

H_0 ditolak Jika probabilitas ≤ 0,05

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara bersama-sama variabel bebas (*independent variables*) terhadap variabel

terikat (*dependent variable*) dengan menggunakan uji F, dianalisis dengan menggunakan ANOVA (*Analysis of variance*).

H_0 diterima, Jika statistik F_{hitung} < statistik F_{tabel}

H_0 ditolak, Jika statistik F_{hitung} ≥ statistik F_{tabel}

3. Uji Durbin-Watson (DW = d statistics)

Pengujian **Durbin-Watson** dilakukan untuk mendeteksi adanya otokorelasi (*autocorrelation*) di antara variabel-variabel bebas atau variabel penjelas (pelanggaran asumsi klasik). Pengujian dilakukan melalui beberapa prosedur sebagai berikut :

a. Hipotesis

H_0 : Tidak ada otokorelasi

H_A : Ada otokorelasi positif (+) dan otokorelasi negatif (-)

b. Tidak ada otokorelasi positif untuk hipotesis nol apabila :

$d \leq d_L$: H_0 ditolak

$d > d_U$: H_0 diterima

$d_L \leq d \leq d_U$: Tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*)

c. Tidak ada otokorelasi negatif untuk hipotesis nol apabila :

$d \geq 4 - d_L$: H_0 ditolak

$d < 4 - d_U$: H_0 diterima

$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_U$: Tidak dapat disimpulkan

d. Tidak ada otokorelasi positif atau negatif (dua arah) untuk hipotesis nol apabila :

$d < d_L$: H_0 ditolak

$d > 4 - d_L$: H_0 ditolak

$d_U < d < 4 - d_U$: H_0 diterima

$d_L \leq d \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$: Tidak dapat disimpulkan **(Koutsoyiannis, 1985 : 212 –215)**

4. Backward Elimination

Penggunaan *backward elimination* adalah untuk mengetahui adanya *multikolinieritas* di antara variabel-variabel bebas (pelanggaran asumsi klasik). Pengujian dilakukan dengan cara mengeluarkan (*removed*) satu per satu variabel yang tidak layak masuk dalam regresi. Tahapan-tahapan mengeluarakan variabel yang tidak layak, akan diikuti oleh perubahan Adjusted R Square (R^2 yang disesuaikan). Semakin tinggi R^2 yang disesuaikan, semakin baik bagi model regresi. Selain itu, apabila pada tahapan-tahapan mengeluarkan variabel yang tidak layak terjadi penurunan *Standard Error of Estimate*, maka model regresi akan menjadi lebih baik (variabel bebas bertindak sebagai prediktor yang baik terhadap variabel terikat).

Selain R^2 yang disesuaikan dengan *standar error of estimate*, dalam pengujian *backward elimination* digunakan pula batas toleransi (*tolerance*) dan variance inflation factor (VIF). Semua variabel yang dimasukkan dalam model regresi harus mempunyai toleransi di atas 0,0001. Sedangkan nilai VIF yang lebih besar dari 5 menunjukkan indikasi adanya persoalan *multikolinieritas* antara variabel bebas (korelasi yang besar di antara variabel bebas). Persoalan *multikoliniertitas* dalam model regresi dapat juga dideteksi melalui *Eigenvalue* dan *Condition Index*. Jika *Eigenvalue* mendekti nol (0), maka ada indikasi terjadinya *multikolinieritas*. Jika *Condition Index* mempunyai angka melebihi 15, maka ada persoalan

multikoliniertitas, dan jika lebih besar dari 30, maka persoalan *multikolinieritas* benar-benar serius.

5. Forward Elimination

Pengujian adanya *multikolinieritas* dengan menggunakan *forward elimination* dilakukan dengan cara memasukkan variabel bebas ke dalam model persamaan regresi secara satu per satu (tidak sekaligus seperti pada pengujian *backward elimination*. Untuk regresi berganda digunakan *Adjusted* R^2 (R^2 yang disesuaikan) sebagai koefisien determinasi. Apabila penambahan variabel bebas menyebabkan R^2 yang disesuaikan bertambah besar, maka semakin baik model regresi tersebut, karena variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat menjadi lebih besar. Selanjutnya, penambahan variabel bebas ke dalam model regresi, dan menyebabkan terjadinya penurunan *Standard Error of Estimate* sampai lebih kecil dari standar deviasi variabel terikat, maka morel regresi lebih baik dalam bertindak sebagai prediktor variabel terikat daripada rata-rata variabel terikat itu sendiri.

Prosedur pengujian forward elimination untuk menentukan adanya persoalan *multikolinieritas*, digunakan juga batas toleransi, *Variance Inflation Factor* (VIF), *Eigenvalue*, dan *Condition Index* seperti pada pengujian *backward elimination*.

6. Stepwise Method

Metode pengujian ini paling sering dipakai dalam analisis regresi. Pengujian-pengujian yang dilakukan hampir sama dengan *forward elimination*, perbedaannya terletak pada cara memasukkan variabel dalam

model. Pada *Stepwise Method*, variabel bebas yang telah dimasukkan dalam model regresi dapat dikeluarkan lagi dari model. Tahapan-tahapan pengujian dimulai dengan memasukkan variabel bebas yang memiliki korelasi paling kuat dengan variabel terikat. Setiap kali memasukkan variabel bebas yang lain, dilakukan pengujian untuk tetap memasukkan variabel bebas atau mengeluarkannya. Analisis pengujian ini, sama dengan analisis pada pengujian *backward elimination* maupun *forward elimination* (**Santoso, 2002 : 324-371**).

BAB 5
HASIL PENELITIAN

5.1. Data Penelitian

Data yang digunakan untuk menganalisis kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Total Penerimaan Daerah (TPD)
3. Bantuan atau Subsidi (BD)
4. Pengeluaran Pembangunan (PP)
5. Pengeluaran Rutin (PR)
6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
7. Jumlah Penduduk (POP)

Data tersebut merupakan data sekunder yang dikumpulkan secara runtun waktu (*time series*) mulai dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 (20 tahun).

Pendapatan asli daerah menunjukkan potensi dan dinamika perekonomian daerah. Semakin besar nilai pendapatan asli daerah, semakin besar kapasitas fiskal daerah tersebut. Hal ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk berotonomi juga tinggi. Dengan demikian, daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang besar, memiliki kemandirian dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah.

Total penerimaan daerah, menunjukkan keseluruhan penerimaan yang diterima oleh daerah yang terdiri dari: (i) Sisa lebih perhitungan tahun lalu, (ii) Pendapatan asli daerah, (iii) Bagi hasil pajak dan bukan pajak, (iv) Bantuan atau subsidi, (v) Pinjaman daerah.

Pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin, merupakan keseluruhan pengeluaran daerah. Pengeluaran ini tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selanjutnya produk domestik regional bruto menunjukkan perkembangan pembangunan ekonomi yang dicapai oleh daerah. Sedangkan penduduk merupakan input yang mengelola aktivitas produksi atau sumberdaya manusia produktif yang menentukan keberhasilan aktivitas produksi tersebut.

Tabel 5.1.
PERKEMBANGAN PAD, TPD, BD, PP, PR, PDRB DAN POP
KOTA MAKASSAR, TAHUN 1981-2000

Tahun	PAD (Rp.000)	BD (Rp.000)	TPD (Rp.000)	PP (Rp.000)	PR (Rp.000)	PDRB (Rp.000)	POP (Jiwa)
1981	2.750.867	4.263.670	7.661.127	4.858.901	6.124.494	359.821.720	712.219
1982	2.989.556	5.616.405	8.997.575	3.412.500	7.205.414	362.721.150	725.105
1983	3.148.912	6.007.110	9.826.432	3.947.712	8.272.615	370.552.750	731.402
1984	3.207.732	8.091.462	11.653.376	2.248.868	9.350.302	386.424.990	736.159
1985	3.913.361	9.504.051	13.686.093	2.269.522	11.298.212	441.843.110	748.611
1986	4.872.454	10.997.826	16.347.221	3.521.444	12.492.017	511.130.550	778.593
1987	6.770.848	13.913.681	20.775.692	4.547.892	16.117.314	568.780.750	806.129
1988	6.516.590	14.086.244	23.105.140	5.351.760	16.665.572	649.590.120	812.957
1989	5.953.547	15.302.411	22.017.352	7.752.123	17.780.744	683.018.850	822.013
1990	6.899.052	18.342.278	30.505.876	9.376.521	20.984.018	794.239.540	944.372
1991	7.595.081	21.841.181	34.257.511	11.858.226	22.305.464	621.366.780	971.947
1992	8.441.725	26.026 778	38.895.513	13.315.167	25.513.412	1.029.086.400	1.000.328
1993	9.568.931	40.256.485	56.270.168	23.510.590	32.470.869	1.171.124.550	1.019.948
1994	10.953.438	42.844.177	59.530.246	16.616.981	42.252.963	1.968.402.980	1.040.201
1995	13.893.043	53.081.550	78.617.511	31.246.359	46.427.827	2.311.698.150	1.077.445
1996	18.434.410	51.354.956	83.622.989	27.515.350	54.854.108	2.781.323.410	1.107.267
1997	21.864.110	51.794.309	101.266.125	37.614.391	62.679.117	3.214.750.350	1.137.575
1998	25.679.320	61.268.151	105.622.198	30.009.875	70.930.566	5.023.720.560	1.154.020
1999	25.183.686	85.224.937	112.819.783	25.901.347	83.806.032	5.521.703.180	1.191.456
2000	28.522.197	97.916.864	132.287.816	19.939.209	108.559.014	6.232.665.870	1.112.688

Sumber : Bagian Keuangan Kota Makassar
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar
BPS Kota Makassar Dalam Angka
BPS, Statistik Keuangan Pemda Tingkat II (Kabupaten/Kota)
(Data Diolah)

Data tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi pemerintah daerah, potensi , dan dinamika perekonomian daerah Kota Makassar.

Tabel 5.2.
PERKEMBANGAN PAD, TPD, BD, PP, PR, PDRB, DAN POP
KABUPATEN GOWA TAHUN 1981-2000

Tahun	PAD (Rp 000)	BD (Rp 000)	TPD (Rp 000)	PP (Rp. 000)	PR (Rp 000)	PDRB (Rp 000)	POP (Jiwa)
1981	130.414	2.712.600	2.997.432	622.470	1.668.517	65.317.310	364.322
1982	140.315	2.916.475	3.017.272	972.435	1.875.725	74.197.820	366.172
1983	205.414	3.007.212	3.301.572	447.305	2.572.449	79.277.150	367.445
1984	143.380	3.202.658	3.373.798	186.230	3.077.843	82.775.640	368.552
1985	311.104	6.592.524	7.034.682	2.913.965	3.743.212	98.041.890	372.581
1986	772.535	6.047.999	6.965.723	2.795.057	4.075.985	107.874.480	377.097
1987	878.412	5.356.438	6.609.522	310.711	6.290.153	123.538.450	395.776
1988	878.976	5.891.685	6.820.579	137.511	6.669.396	151.442.170	400.272
1989	655.607	9.300.250	10.700.280	3.747.300	6.952.980	188.166.080	429.157
1990	660.568	9.835.991	11.128.947	1.795.627	8.443.963	221.175.450	431.293
1991	786.680	13.115.075	15.695.353	5.495.003	9.436.150	251.108.980	435.714
1992	997.019	18.080.482	20.691.927	9.494.728	10.505.208	287.101.540	436.711
1993	1.168.593	19.743.106	22.936.218	9.737.504	12.985.107	368.650.400	444.327
1994	2.079.151	23.857.769	27.871.455	10.638.069	16.622.693	428.975.010	447.314
1995	1.993.776	24.625.534	28.988.558	10.797.581	18.166.111	459.787.560	471.525
1996	4.032.643	26.961.068	34.282.898	11.434.588	21.298.092	547.881.920	474.407
1997	5.875.133	33.163.630	43.216.897	13.703.509	27.273.262	629.178.840	480.401
1998	6.780.327	46.495.454	59.018.294	24.662.414	31.183.791	889.269.740	484.280
1999	7.375.571	60.744.649	17.860.892	31.159.762	39.100.649	1.011.418.860	497.401
2000	5.036.205	78.927.401	87.474.906	33.954.003	52.770.803	1.154.062.380	507.505

Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Gowa
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
BPS, Kabupaten Gowa Dalam Angka
BPS, Statistik Keuangan Pemda Tingkat II (Kabupaten/Kota)
(Data diolah)

5.2. Analisis dan Hasil Penelitian

5.2.1. Kota Makassar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah berada pada Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, pemerintah daerah Kota Makassar harus berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri. Hal ini menjadi sangat penting karena sangat menentukan mampu tidaknya Kota Makassar untuk berotonomi. Artinya,

daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan terbesar dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada hakekatnya mencerminkan penerimaan daerah pada satu sisi, dan pengeluaran daerah pada sisi yang lain. Pada sisi penerimaan terdapat beberapa komponen penerimaan daerah yang terdiri dari :

1. Sisa lebih perhitungan tahun lalu
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
    a. Hasil pajak Daerah
    b. Hasil retribusi daerah
    c. Pendapatan dari dinas-dinas
    d. Hasil dari perusahaan daerah (BUMD)
    e. Lain-lain pendapatan daerah yang syah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi hasil pajak atau pendapatan dari pajak-pajak pusat yang hasilnya sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah (*assigned revenues*) dan bukan pajak (BHPBP), yang terdiri dari :
    a. Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh)
    b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    c. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    d. Iuran Hasil Hutan (IHH)

e. Royalti Emas/Batu Bara

f. Sewa Tanah

g. Royalti Minyak Bumi dan Gas Alam, dan

h. Royalti Perikanan

4. Bantuan atau subsidi, terdiri dari :

   a. Subsidi Daerah Otonom (SDO)

   b. Bantuan Inpres (Instruksi Presiden)

   c. Dana Daftar Isian Proyek (DIP)

5. Pinjaman daerah, terdiri dari :

   a. Pinjaman Dalam Negeri

   b. Pinjaman Luar Negeri

Penjumlahan keseluruhan komponen-komponen penerimaan daerah tersebut, merupakan Total Penerimaan Daerah (TPD). TPD merupakan pembanding untuk mengetahui kemandirian pemerintah daerah Kota Makassar dalam memasuki era otonomi daerah.

Kemandirian pemerintah daerah Kota Makassar dalam manajemen pembangunan ekonomi ditentukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu :

1. Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah (TPD).
2. Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengeluaran pembangunan (PP), dan
3. Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengeluaran rutin (PR).

Tabel 5.3.
RASIO ANTARA PAD DENGAN TPD, PAD DENGAN PP DAN PAD DENGAN PR KOTA MAKASSAR, 1981-2000

Tahun	PAD/TPD (Rp 000)	PAD/PP (Rp 000)	PAD/PR (Rp 000)
1981	0.35906818	0.56615004	0.44915824
1982	0.33226241	0.87606036	0.41490412
1983	0.32045324	0.79765494	0.38064288
1984	2.27526203	1.42637629	0.34306186
1985	0.28593704	1.72431067	0.34636993
1986	0.30363226	1.38365227	0.39004541
1987	0.32590240	1.48878821	0.42009779
1988	0.28204070	1.21764908	0.39102108
1989	0.27040249	0.76798923	0.33483115
1990	0.22615485	0.73577950	0.32877650
1991	0.22170557	0.64049049	0.34050316
1992	0.21626466	0.63174010	0.32969816
1993	0.17005335	0.40700514	0.29469279
1994	0.18399786	0.65917136	0.25923479
1995	0.17671690	0.44462917	0.29923957
1996	0.22044667	0.66996821	0.33606252
1997	0.21590744	0.58126981	0.34882606
1998	0.24312427	0.85569566	0.36203461
1999	0.22322047	0.97229252	0.30049968
2000	0.21560713	1.43045779	0.26167153
Rata-rata	0.25340800	0.91385654	0.34656859

Sumber : Tabel 5.1.
(Data diolah)

Hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa:

a. Jika dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD), maka pemerintah daerah Kota Makassar mempunyai tingkat kemandirian yang masih rendah (belum mandiri). Dengan kata lain, kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri masih rendah. Apabila kemandirian pemerintah daerah Kota Makassar dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah dilihat dari tahun ke tahun, maka yang paling rendah terjadi pada tahun 1993 yaitu sebesar 0,1700 atau 17,01 %, sedangkan yang paling tinggi terjadi pada tahun

ADLN - Perpustakaan Unair

memasuki era otonomi daerah adalah berupaya seoptimal mungkin menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan atau kapasitas fiskal daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan daerah. Dengan demikian, meningkatnya penerimaan daerah Kota Makassar yang bersumber dari pendapatan asli daerah, menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pemerintah daerah Kota Makassar memiliki kemandirian dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis yang telah diajukan, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dianalisis dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 10.1.

Hasil-hasil perhitungan yang diperoleh (Lampiran 1) adalah sebagai berikut :

1. Nilai R kuadrat (*R square*) adalah sebesar 0,994. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 99,4% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dapat dijelaskan oleh variabel bantuan atau subsidi, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, produk domestik regional bruto, dan penduduk. Sedangkan sisanya sebanyak 0,6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Dengan demikian, model yang digunakan secara nyata cocok (*goodness of fit*).
2. *Standard Error of Estimate* sebesar Rp. 787535.4621 ribu (satuan yang dipakai oleh variabel terikat atau Pendapatan Asli Daerah) lebih

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

kecil dari *Standard Deviation* Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.8422711.3438 ribu. Hal ini berarti model regresi lebih bagus dalam bertindak sebagai prediktor Pendapatan Asli Daerah daripada rata-rata Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

3. Nilai F_{hitung} sebesar 431.858 dengan tingkat signifikansi 0,000 (diperoleh dari uji ANOVA). Nilai F_{hitung} 431.858 > nilai F_{tabel} 2,96 dan probabilitas 0,000 < α (0,05), maka model regresi yang digunakan dapat menjelaskan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, bantuan atau subsidi, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, produk domestik regional bruto, dan penduduk, secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Nilai DW (*d statistics*) hitung sebesar 1,275 > d_L tabel 0,56 {$d_{L\ (0,05)}$ (n – k) = 0,56}. Hal ini menunjukkan bahwa, tidak terdapat indikasi adanya otokorelasi di antara variabel-variabel bebas (variabel penjelas) yang dimasukkan dalam model. Dengan kata lain, tidak terdapat otokorelasi antara bantuan atau subsidi, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk. Dengan demikian, model yang digunakan lolos dari uji pelanggaran asumsi klasik.
5. Hasil persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = -3134111 - \underset{(-4,323)}{0,204X_1} + \underset{(3,379)}{0,137X_2} + \underset{(4,227)}{0,248X_3} + \underset{(4,460)}{0,002441X_4} + \underset{(1,659)}{6,261X_5}$$

$R^2 = 0,994$

F = 431.858

(signifikan) terhadap pendapatan asli daerah (PAD), di mana H_0 ditolak (t_{hitung} 3,379 > t_{tabel} 1,76) dan probabilitas 0,004 < 0,05 (apabila X_1, X_3, X_4 dan X_5 konstan).

d. Koefisien regresi X_3, sebesar 0,248 memberikan arti bahwa, apabila pengeluaran rutin bertambah sebesar Rp 1000, menyebabkan pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 248. Pengeluaran rutin berpengaruh positif dan nyata (signifikan) terhadap pendapatan asli daerah, di mana H_0 ditolak (t_{hitung} 4,227 > t_{tabel} 1,76) dan probabilitas 0,007 < 0,001 (apabila X_1, X_2, X_4 dan X_5 konstan).

e. Koefisien regresi X_4 sebesar 0,002441 memberikan arti bahwa, apabila produk domestik regional bruto (PDRB) bertambah sebesar Rp 1000, menyebabkan pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 2,44. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan nyata (signifikan) terhadap pendapatan asli daerah, di mana H_0 ditolak (t_{hitung} 4,460 > t_{tabel} 1,76) dan probabilitas 0,001 < 0,05 (apabila X_1, X_2, X_3 dan X_5 konstan).

f. Koefisien regresi X_5 sebesar 6,261 memberikan arti bahwa, apabila penduduk bertambah 1 (satu) orang, menyebabkan pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 6,261. Penduduk berpengaruh positif tetapi tidak nyata (tidak signifikan) terhadap pendapatan asli daerah, di mana H_0 diterima (t_{hitung} 1,659 < t_{tabel} 1,76) dan probabilitas 0,119 > 0,05 (apabila X_1, X_2, X_3, dan X_4 konstan).

5.2.2. Kabupaten Gowa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah berada pada Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Gowa harus berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri. Hal ini menjadi sangat penting karena sangat menentukan mampu tidaknya Kabupaten Gowa untuk berotonomi. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten Gowa harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ketergantunagn kepada bantuan pusat harus seminima mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada hakekatnya mencerminkan penerimaan daerah pada satu sisi, dan pengeluaran daerah pada sisi yang lain. Pada sisi penerimaan terdapat beberapa komponen penerimaan daerah yang terdiri dari :

1. Sisa lebih perhitungan tahun lalu
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
   a. Hasil pajak daerah
   b. Hasil retribusi daerah
   c. Pendapatan dari dinas-dinas
   d. Hasil dari perusahaan daerah

ADLN - Perpustakaan Unair

e. Lain-lain pendapatan daerah yang syah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi hasil pajak atau pendapatan dari pajak-pajak pusat yang hasilnya sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah (*assigned revenues*) dan bulan pajak (BHPBP) yang terdiri dari :
   a. Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh)
   b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
   c. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
   d. Iuran Hasil Hutan (IHH)
   e. Royalti emas/batu bara
   f. Sewa tanah
   g. Royalti minyak bumi dan gas alam, dan
   h. Royalti perikanan.
4. Bantuan atau subsidi, terdiri dari :
   a. Subsidi Daerah Otonom (SDO)
   b. Bantuan Inpres (Instruksi Presiden)
   c. Dana Daftar Isian Proyek (DIP)
5. Pinjaman daerah, terdiri dari :
   a. Pinjaman dalam negeri
   b. Pinjaman luar negeri

Penjumlahan keseluruhan komponen-komponen penerimaan daerah tersebut, merupakan total penerimaan daerah (TPD). Total penerimaan daerah merupakan pembanding untuk mengetahui

kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah.

Kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah dapat diketahui dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu :

1. Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD).
2. Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Pembangunan (PP)
3. Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Rutin (PR).

Tabel 5.4.
RASIO ANTARA PAD DENGAN TPD, PAD DENGAN PP DAN PAD DENGAN PR KABUPATEN GOWA, 1981-2000

Tahun	PAD/TPD (Rp 000)	PAD/PP (Rp 000)	PAD/PR (Rp 000)
1981	0.04350857	0.20951049	0.07816162
1982	0.04650392	0.14429242	0.07480574
1983	0.06221702	0.45922580	0.07985153
1984	0.04249809	0.76990817	0.04658305
1985	0.04422431	0.10676312	0.08311151
1986	0.11090521	0.27639329	0.18953332
1987	0.13290098	2.82710299	0.13964874
1988	0.12887117	6.39204136	0.13179244
1989	0.06127007	0.17495450	0.09429151
1990	0.05935584	0.36787595	0.07822961
1991	0.05012184	0.14316279	0.08336874
1992	0.04818396	0.10500764	0.09490711
1993	0.05094968	0.12000950	0.08999486
1994	0.07459786	0.19544439	0.12507907
1995	0.06877803	0.18465024	0.10975249
1996	0.11762841	0.35267059	0.18934292
1997	0.13594527	0.42873201	0.21541732
1998	0.11488517	0.27492552	0.21743113
1999	0.41294527	0.236~0177	0.18862943
2000	0.05757314	0.14832433	0.09543544
Rata-rata	0.09319319	0.69588484	0.12026838

Sumber: Tabel 5.2.
(Data diolah)

Hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa :

a. Jika dilihat dari rasio antara PAD dengan TPD, maka pemerintah daerah Kabupaten Gowa mempunyai kemandirian yang masih rendah (belum mandiri). Dengan kata lain, kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri masih rendah. Apabila kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah dilihat dari tahun ke tahun, maka yang paling rendah terjadi pada tahun 1984 yaitu sebesar 0,0424 atau 4,24 %, sedangkan yang paling tinggi terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 0,4129 atau 41,29 %. Secara rata-rata selama 20 tahun adalah sebesar 0,0931 atau 9,31 %.

b. Jika dilihat dari rasio antara PAD dengan PP, maka pemerintah daerah Kabupaten Gowa mempunyai kemandirian yang sangat pluktuatif (pada tahun tertentu sangat tinggi, dan pada tahun lain menjadi rendah). Yang paling rendah terjadi pada tahun 1992 yaitu sebesar 0,1050 atau 10,50 %, sedangkan yang paling tinggi terjadi pada tahun 1988 yaitu sebesar 6,3920 atau 639,20 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 1988, pemerintah daerah Kabupaten Gowa mempunyai kemampuan dalam pembiayaan pengeluaran pembangunannya lebih enam kali yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara rata-rata selama 20 tahun adalah sebesar 0,6958 atau 69,58 %.

c. Jika dilihat dari rasio antara PAD dengan PR, maka pemerintah daerah Kabupaten Gowa mempunyai tingkat kemandirian yang masih rendah. Apabila tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa

dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah dilihat dari tahun ke tahun, maka yang paling rendah terjadi [illegible] sedangkan yang paling tinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 0,2174 atau 21,74 %. Secara rata-rata selama 20 tahun adalah sebesar 0,1202 atau 12,02 %.

Analisis deskriptif-kualitatif tersebut, menunjukkan bahwa indikator utama kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian, maka pemerintah daerah harus berupaya seoptimal mungkin menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan atau kapasitas fiskal daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan daerah. Dengan demikian, meningkatnya penerimaan daerah Kabupaten Gowa yang bersumber dari pendapatan asli daerah, menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gowa memiliki kemandirian dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis yang telah diajukan, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dianalisis dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 10.1.

BAB 6
PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 1 Januari 2001 adalah untuk mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, dan mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penerapan kedua undang-undang ini menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan daerah di Indonesia. Salah satu aspek yang penting berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah. Aspek pemerataan dapat ditinjau berdasarkan hubungan antar personal, tetapi juga dapat ditinjau menurut antar daerah. Secara interpersonal sangat baik apabila pendapatan antar individu atau antar kelompok anggota masyarakat sudah merata. Sementara itu, pemerataan antar daerah amat baik apabila kesenjangan pendapatan

ADLN - Perpustakaan Unair

antar daerah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota dapat diperkecil.

Selain itu, penerapan kedua undang-undang tersebut, dimungkinkan menimbulkan berbagai masalah di daerah. Hal ini disebabkan karena daerah harus berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri. Khusus mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, terdapat suatu masalah yang akan muncul yaitu kemampuan keuangan atau kapasitas fiskal daerah. Hal ini menjadi sangat penting karena sangat menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan otonomi daerah, menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaiknya daerah yang miskin sumberdaya alam menanggapinya dengan sedikit rasa khawatir dan was-was.

Kekhawatiran beberapa pemerintah daerah tersebut dapat dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah. Di samping itu, alasan klasik seperti kesiapan sumberdaya manusia

(SDM) di daerah, masih lemahnya struktur dan infrastruktur daerah, memang merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, dan dialami oleh beberapa pemerintah daerah.

Terlepas dari kekhawatiran oleh beberapa pemerintah daerah tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal harus dilaksanakan dan disukseskan karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemandirian pemerintah daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu; (1) Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD), (2) Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Pembangunan (PP), (3) Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Rutin (PR).

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, dapat diketahui bahwa indikator utama yang menentukan kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bertitik tolak dari hal tersebut, dan sesuai dengan rumusan masalah, hipotesis, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh bantuan atau subsidi, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ADLN - Perpustakaan Unair

Temuan empiris hasil penelitian yang telah diuji secara statistik dipadukan dan dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya, sehingga diperoleh suatu konsep pengembangan konstruk teori baru.

6.1. Kota Makassar

Kemandirian pemerintah daerah Kota Makassar dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah dianalisis dengan penggunakan pendekatan :

6.1.1. Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Makassar dilihat dari Rasio antara PAD dengan TPD

Nilai rasio ini disajikan pada Tabel 5.3, di mana menunjukkan nilai rasio yang rendah. Hal ini memberikan arti bahwa, pemerintah daerah Kota Makassar belum mandiri sejak tahun 1981-2000. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, maka yang paling rendah terjadi pada tahun 1993 yaitu sebesar 0,1700 atau 17,00 % (kontribusi PAD terhadap total penermaan daerah hanya sebesar 17 %), dan yang paling tinggi terjadi pada tahun 1981 yaitu sebesar 0,3591 atau 35,91 %. Secara rata-rata per tahun selama 20 tahun adalah sebesar 0,2534 atau 25,34 %.

Dengan demikian, secara rata-rata per tahun sumbangan (*share*) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD) hanya sebesar 0,2534 atau 25,34 %.

Rendahnya sumbangan (*share*) PAD terhadap TPD Kota Makassar, menunjukkan kemampuan pembiayaan pembangunan dengan dana asli daerah sangat kecil (tidak mandiri). Atau dengan kata lain,

ADLN - Perpustakaan Unair

sebagian besar pembangunan daerah dibiayai oleh pemerintah pusat. Kurangnya penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena, pajak-pajak yang diserahkan kepada daerah adalah pajak yang kurang potensil dan tergolong kurus. Sedangkan pajak-pajak yang potensil dan tergolong gemuk menjadi hak pusat seperti, pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn-BM) serta pajak penghasilan perorangan maupun badan (PPh), termasuk migas. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan hubungan perpajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memperoleh bagian dari sumber-sumber pajak utama itu melalui mekanisme bagi hasil (*sharing tax*).

Retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah, hasilnya belum maksimal. Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Komponen lain yang diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan dinas-dinas belum dapat berperan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena manajemen BUMD dan dinas-dinas yang belum mampu bekerja secara efektif dan efisien.

6.1.2. Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Makassar dilihat dari Rasio antara PAD dengan PP

Nilai rasio yang dihasilkan sangat bervariasi. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, rasio yang paling rendah terjadi pada tahun 1993 yaitu

ADLN - Perpustakaan Unair

sebesar 0,4070 atau 40,70% (kontribusi PAD terhadap pengeluaran pembangunan sebesar 40,70%). Hal ini memberikan arti bahwa kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi, jika dilihat dari rasio antara PAD dengan PP masih rendah. Atau dengan kata lain, kemampuan pembiayaan dengan dana asli daerah masih kecil. Dengan demikian, pengeluaran pembangunan masih dibiayai oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1985, rasio PAD dengan PP adalah sebesar 1,0072 atau 100,72 %. Rasio ini merupakan yang paling tinggi sejak tahun 1981-2000, ini menunjukkan bahwa, pada tahun 1985 pemerintah daerah Kota Makassar mampu membiayai pengeluaran pembangunannya dengan dana asli daerah (mandiri). Sisanya sebesar 0,72 % digunakan untuk pengeluaran lain yang berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kemampuan pembiayaan pengeluaran pembangunan yang seluruhnya bersumber dari dana asli daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, juga terjadi pada tahun 1984, di mana rasio antara PAD dengan PP adalah 1,43 (100,43 %), tahun 1986 sebesar 1,38 (100,38 %), tahun 1987 sebesar 1,48 (100,48 %), tahun 1988 sebesar 1,22 (100,22 %), dan tahun 2000 sebesar 1,43 (100,43 %). Secara rata-rata per tahun selama 20 tahun (1981-2000) rasio antara PAD dengan PP adalah sebesar 0,9139 (91,39 %). Hal ini memberikan arti bahwa selama 20 tahun, pemerintah daerah Kota Makassar melaksanakan kegiatan pembangunan dengan menggunakan dana asli daerah sendiri. Atau

dengan kata lain, pemerintah daerah Kota Makassar mandiri dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah.

6.1.3. Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Makassar dilihat dari Rasio antara PAD dengan PR

Nilai rasio yang diperoleh secara keseluruhan selama tahun 1981-2000 sangat rendah. Tahun 1994 hanya sebesar 0,2592 atau 25,92 % (kontribusi PAD terhadap pengeluaran rutin sebesar 25,92 %). Ini memberikan arti bahwa pada tahun 1994, pemerintah daerah Kota Makassar tidak mampu membiayai pengeluaran rutinnya yang bersumber dari dana asli daerah atau Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pengeluaran rutin masih dibiayai oleh pemerintah pusat (tidak mandiri). Rasio yang tertinggi terjadi pada tahun 1981, yaitu sebesar 0,4492 atau 44,92 %. Secara rata-rata per tahun selama 20 tahun (1981-2000) adalah sebesar 0,3466 atau sebesar 44,92 %. Hal ini menunjukkan bahwa selama 20 tahun pemerintah daerah Kota Makassar tidak mampu membiayai pengeluaran rutinnya dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (tidak mandiri).

6.1.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar

Berdasarkan ketiga pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kemandirian pemerintah daerah Kota Makassar dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah (telah dianalisis secara deskriptif-kualitatif), dapat diketahui bahwa, yang paling

menentukan kemandirian pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, akan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah tersebut.

a. Pengaruh Bantuan atau Subsidi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 10.1 (Lampiran 1) menunjukkan bahwa, faktor bantuan atau subsidi mempunyai pengaruh negatif dan nyata (signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi –0,204, di mana t_{hitung} –4,323 > t_{tabel} –1,76 (H_0 ditolak pada sisi kiri), dan probabilitas 0,001 < α 0,05. Ini berarti hipotesis yang diajukan bahwa, bantuan atau subsidi mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak terbukti.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi yang diperoleh tersebut, memberikan arti bahwa, apabila bantuan atau subsidi yang diberikan kepada pemerintah daerah Kota Makassar bertambah sebesar Rp 1.000 (satuan yang digunakan dalam perhitungan), maka menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sebesar Rp 204 (dengan asumsi faktor lain dalam model konstan).

Temuan penelitian ini adalah, **bantuan atau subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berpengaruh negatif dan nyata (signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).** Temuan ini sekaligus menolak teori yang dikemukakan oleh **Musgrave, R.A.** and **Musgrave, P.B. (19984), Arsyad (1990), Kirana (2000),** dan **Mahi (2000).** Teori yang dikemukakan tersebut mengatakan bahwa, bantuan atau

subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu atau mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hakikat bantuan atau subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Untuk itu, daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Uppal** dan **Suparmoko (1986)** mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa, bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berhubungan negatif dengan upaya pengumpulan pajak dan kebutuhan fiskal daerah. Seharusnya, bantuan pemerintah pusat berhubungan positif dengan upaya pengumpulan pajak dan kebutuhan fiskal daerah sesuai dengan teori.

Temuan empiris yang dihasilkan dalam penelitian ini, mempunyai kecenderungan mendukung otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Implementasi kedua undang-undang tersebut, dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Sebelum implementasi kedua undang-undang ini, bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari Subsidi Daerah Otonom (SDO), Instruksi Presiden (INPRES), dan Daftar Isian Proyek

(DIP). Ketiga jenis bantuan ini, digolongkan menjadi bantuan khusus dan bantuan umum.

Bantuan khusus (*specific grant/conditional grant*), yaitu bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa-jasa publik yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa, peranan bantuan khusus sangat mendominasi keuangan daerah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa selama ini bantuan yang diterima oleh pemerintah daerah, penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menetapkan prioritas dan pembagian dana, sementara pemerintah daerah hanya berwenang dalam hal penentuan lokasi proyek dan cara melaksanakannya. Bantuan khusus ini diatur secara ketat oleh pemerintah pusat.

Besarnya proporsi bantuan khusus terhadap total bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan arti bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan/keleluasaan di dalam menggunakan dana bantuan tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas dan keinginan masyarakat setempat. Implikasi yang ditimbulkan, bahwa bantuan khusus bukan merupakan instrumen yang dapat memacu atau mendorong peningkatan PAD. Selain itu, bantuan khusus menyebabkan melemahnya tingkat otonomi daerah, karena tidak mempunyai dampak positif terhadap peningkatan PAD. Kondisi seperti ini

menyebabkan daerah-daerah tidak dimungkinkan untuk mandiri selama ini.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, menyebabkan terjadinya perubahan pada bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bantuan pemerintah pusat yang terdiri adri SDO, INPRES, dan DIP yang selanjutnya digolongkan menjadi bantuan khusus dan bantuan umum berubah menjadi dana perimbangan. Perubahan ini membawa implikasi penyerahan sepenuhnya belanja rutin daerah (sebelumnya disebut SDO) kepada pemerintah daerah. Ini berarti dana rutin daerah berubah, dari dana yang memiliki ciri-ciri khusus (penggunaannya ditentukan pemerintah pusat) menjadi dana yang memiliki ciri-ciri umum (penggunaannya ditentukan pemerintah daerah). Perubahan dana SDO yang bersifat bantuan khusus untuk kebutuhan rutin menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), ini berarti bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besar kecilnya organisasi dan jumlah pegawai yang mendukungnya.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, merupakan alat utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai konsekwensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan; (i) kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan

sendiri, dan didukung dengan (ii) perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dana alokasi umum merupakan bantuan umum (*block grants/uncoditional grants*). Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Bantuan umum ini dapat pula dipandang sebagai mekanisme transfer daya beli (*purchasing power transfer*) dari satu tingkat pemerintah ke tingkat yang lain. Karena sifatnya untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, sementara jenis fungsi yang dijalankan tersebut sama pada tiap daerah, maka jenis bantuan seperti ini lebih cocok digunakan untuk mendukung jasa-jasa publik yang tersebar secara merata di seluruh wilayah negara.

Ciri khusus yang menjadi kekuatan utama jenis bantuan umum ini adalah dapat meningkatkan sumberdaya lokal, sekaligus mempertahankan pilihan fiskal (*fiscal choice*) yang ada dalam kewenangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan/keleluasaan dalam mengalokasikan dana yang diterima ke dalam berbagai kemungkinan pengeluaran yang sesuai dengan pilihan dan kepentingan daerah. Oleh karena itu, bantuan umum ini merupakan instrumen yang dapat memacu atau mendorong peningkatan PAD dan memperkuat tingkat otonomi daerah, karena mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan PAD.

Terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretiory power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan pembangunan daerah

atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat, mendorong terwujudnya perkembangan dan kemajuan daerah itu sendiri, yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat.

Melaksanakan demokrasi pada lapisan bahwa (Kabupaten/Kota), akan mendorong otoaktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur, mengurus, dan mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerah masing-masing.

b. Pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil perhitungan yang diperoleh (Lampiran 1) menunjukkan bahwa, pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan nyata (signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi 0,137, di mana t_{hitung} 3,379 > t_{tabel} 1,76 (H_0 ditolak pada sisi kanan) dan probabilitas 0,004 < α (0,05). Ini berarti hipotesis yang diajukan bahwa, pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah terbukti. Hasil perhitungan koefisien regresi tersebut, memberikan arti bahwa, apabila pemerintah daerah Kota

Makassar menambah pengeluaran pembangunannya sebesar Rp 1000 (satuan yang digunakan dalam perhitungan), maka menyebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 137 (dengan asumsi faktor lain dalam model konstan).

Temuan penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh **Mubyarto (2001), Permadi (2000),** dan **Kuncoro (1997),** yang mengatakan bahwa, pengeluaran pembangunan (tercermin dalam APBD) suatu daerah adalah merupakan stimulus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pengeluaran pembangunan, merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pembangunan dibidang sarana dan prasarana serta infrastruktur perekonomian daerah, mempunyai dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, membutuhkan dana (*fiscal needs*) sebanding dengan kegiatan yang harus dijalankan. Semakin banyak kegiatan pelayanan publik yang dilakukan, semakin besar dana yang dibutuhkan. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya semakin ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Hal ini dapat dilakukan, karena pembiayaan pengeluaran pembangunan ini bersumber dari dana asli sendiri. Semakin besar anggaran pembangunan yang dikeluarkan, maka semakin besar pengaruh gandanya (*multiplier*

effect) baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Pengaruh Pengeluaran Rutin terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan yang diperoleh (Lampiran 1) menunjukkan bahwa, faktor pengeluaran rutin mempunyai pengaruh positif dan nyata (signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi 0,248, di mana t_{hitung} 4,227 > t_{tabel} 1,76 (H_0 ditolak pada sisi kanan), dan probabilitas 0,001 < α (0,05). Ini berarti hipotesis yang diajukan bahwa, pengeluaran rutin mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah terbukti. Sedangkan hasil perhitungan koefisien regresi sebesar 0,248 memberikan arti bahwa, apabila pengeluaran rutin bertambah sebesar Rp 1000 (satuan yang digunakan dalam perhitungan), maka menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 248 (dengan asumsi faktor lain dalam model konstan).

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai operasional penyelenggaraan roda pemerintahan, sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Pengeluaran rutin ini berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan pegawai. Dengan demikian, bertambahnya pengeluaran rutin ini menyebabkan kesejahteraan pegawai meningkat, yang selanjutnya berdampak positif pada peningkatan produktivitas dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh **Yuliati (2001)**, mengenai pengaruh pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman Yogyakarta, menyimpulkan bahwa, pengeluaran rutin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena, penghasilan yang diperoleh oleh pegawai, dibelanjakan di luar Kabupaten Sleman.

Temuan penelitian ini, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Yuliati**, bahwa penghasilan yang diperoleh oleh pegawai di Kota Makassar dibelanjakan kembali di Kota Makassar. Dengan demikian, dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, yang selanjutnya mempunyai dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

d. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan yang diperoleh (Lampiran 1) menunjukkan bahwa, faktor produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh positif dan nyata (signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi 0,002441, di mana t_{hitung} 4,460 > t_{tabel} 1,76 (H_0 ditolak pada sisi kanan), dan probabilitas 0,001 < α 0,05. Ini berarti hipotesis yang diajukan bahwa, produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah terbukti. Sedangkan hasil perhitungan koefisien regresi sebesar 0,002441 memberikan arti bahwa, apabila produk domestik regional bruto bertambah sebesar Rp 1000 (satuan yang digunakan

dalam perhitungan), maka menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Rp 2,4 (dengan asumsi faktor lain dalam model konstan).

Penelitian yang dilakukan oleh **Kim (1997)** di Korea mengenai peranan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menyimpulkan bahwa, investasi pemerintah (pengeluaran pembangunan) dan pengeluaran konsumsi pemerintah (pengeluaran rutin), mempunyai pengaruh positif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasi kebijakan yang penting adalah pemerintah daerah terus mendorong peningkatan investasi pemerintah daerah, karena mempunyai efek ganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerimaan pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, temuan empiris dari peneltiian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Kim**.

Temuan empiris dari penelitian ini, mendukung teori yang dikemukakan oleh **Ahmad (1989), Shah et al, (1997)** dan **Kirana (2000)**, yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah (dilihat dari perubahan produk domestik regional bruto) merupakan sumber utama penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan dapat diketahui dengan cara menghitung kapasitas pajak, yaitu perkalian antara basis pajak dan tarif pajak. Oleh karena yang dihitung adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak dan bukan pajak, maka pendekatannya menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai kapasitas PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh **Miller** dan **Russek (1997)** mengenai hubungan antara struktur fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa, permasalahan anggaran yang dihadapi adalah meningkatnya penerimaan pajak di satu sisi, dan berkurangnya pengeluaran pemerintah pada sisi yang lain. Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (*own revenues*), apabila pajak tersebut, digunakan untuk membangun infrastruktur, dan akan berpengaruh negatif jika digunakan untuk pembayaran transfer (*transfer payment*).

Teori-teori yang dikemukakan tersebut, yang mengatakan bahwa, produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam penelitian ini terbukti.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi yang diperoleh, ditemukan bahwa, produk domestik regional bruto (PDRB) mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Apabila PDRB bertambah sebesar Rp 1.000, pertambahan ini menyebabkan peningkatan PAD hanya sebesar Rp 2,3. Hal ini disebabkan oleh karena :

1. PDRB merupakan basis pajak penghasilan perorangan maupun badan (PPh), dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang hasilnya dipungut oleh pusat.
2. Investasi yang ditanam di Kota Makassar, pada umumnya dimiliki oleh investor yang tidak berdomisili di Kota Makassar.

3. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar merupakan perusahaan cabang yang kantor pusatnya berada di luar Kota Makassar.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang indikatornya adalah PDRB hanya sebagian kecil yang dinikmati oleh masyarakat Kota Makassar. Hal ini juga yang menyebabkan rendahnya kontribusi PDRB terhadap PAD di Kota Makassar.

Perkembangan ekonomi suatu daerah pada umumnya ditunjukkan oleh indikator perubaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Bagi pemerintah daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai, dan menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunannya di masa yang akan datang.

Keberhasilan pembangunan ekonomi harus dikaitkan dengan 3 (tiga) nilai pokok yaitu :

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*)
2. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*)
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom of choice*)

e. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan yang diperoleh (Lampiran 1) menunjukkan bahwa, faktor jumlah penduduk berpengaruh positif tetapi tidak nyata (tidak signifikan) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini

ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi 6,261, di mana t_{hitung} 1,527 < t_{tabel} 1,76 (H_0 diterima pada sisi kanan), dan probabilitas 0,149 > α 0,05. Ini berarti hipotesis yang diajukan bahwa, jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah terbukti. Sedangkan hasil perhitungan koefisien regresi sebesar 8,048, memberikan arti bahwa, apabila penduduk bertambah 1 (satu) orang, maka akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp.8.048 (dengan asumsi faktor lain dalam model konstan). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini adalah peningkatan yang bersifat potensil. Artinya, pertambahan jumlah penduduk bukan hanya dalam arti kuantitas, tetapi juga kualitas.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa penduduk merupakan kata kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan, perlu direformasi.

Temuan penelitian ini mempunyai kecenderungan mendukung teori yang dikemukakan oleh **Tjiptodherijanto (2000)**, dan **Kirana (2000)** yang mengatakan bahwa, strategi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tanpa melihat potensi penduduk yang ada nyatanya tidaklah berlangsung secara berkesinambungan (*sustained*). Jika dikaitkan dengan krisis ekonomi dewasa ini, terjadinya krisis tersebut tidak lepas dari kebijakan ekonomi yang kurang mengindahkan dimensi kependudukan. Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi/

ADLN - Perpustakaan Unair

kondisi ataupun potensi penduduk yang ada, menyebabkan pembangunan ekonomi tersebut menjadi sangat rentan terhadap perubahan.

Model pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna yaitu :

1. Pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk.
2. Pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Pembangunan yang dilaksanakan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata.

Temuan empiris ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah Kota Makassar dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi kepada pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM, merupakan modal utama pemerintah daerah dalam memasuki era otonomi daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kemandirian pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penduduk dapat menjadi modal dasar pembangunan daerah apabila penduduk tersebut berkualitas.

6.2. Kabupaten Gowa

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah di Kabupaten Gowa, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu :

1. Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD)
2. Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Pembangunan (PP).
3. Perbandingan atau rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pengeluaran Rutin (PR).

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, dapat diketahui bahwa indikator utama yang menentukan kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah, adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bertitik tolak dari hal tersebut, dan sesuai dengan rumusan masalah, hipotesis, dan tujuan penelitian, adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh bantuan atau subsidi (BD), pengeluaran pembangunan (PP), pengeluaran rutin (PR), produk domestik regional bruto (PDRB), dan jumlah penduduk (POP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Temuan empiris dari hasil penelitian yang telah diuji secara statistik dipadukan dan dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya, sehingga diperoleh suatu konsep pengembangan konstruk teori baru.

Kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah dianalisis dengan menggunakan pendekatan :

6.2.1. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dilihat dari Rasio antara PAD dengan TPD

Nilai rasio ini disajikan pada Ttabel 5.4, di mana menunjukkan nilai rasio yang rendah. Hal ini memberikan arti bahwa, pemerintah daerah Kabupaten Gowa belum mandiri sejak tahun 1981-2000. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, maka yang paling rendah terjadi pada tahun 1984 yaitu sebesar 0,0424 atau sebesar 4,24 % (kontribusi PAD terhadap TPD hanya sebesar 4,24 %), dan yang paling tinggi terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 0,4129 atau 41,29 %. Secara rata-rata per tahun selama 20 tahun adalah sebesar 0,0931 atau 9,31 %. Dengan demikian, secara rata-rata per tahun sumbangan (*share*) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD) hanya sebesar 9,31 %.

Rendahnya sumbangan PAD terhadap TPD Kabupaten Gowa, menunjukkan kemampuan pembiayaan pembangunan dengan dana asli daerah sangat kecil (tidak mandiri). Atau dengan kata lain, sebagian besar pembangunan daerah dibiayai oleh pemerintah pusat. Kurangnya penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daera karena, pajak-pajak yang diserahkan kepada daerah adalah pajak yang kurang potensil dan tergolong kurus. Sedangkan pajak-pajak yang potensil dan tergolong gemuk menjadi hak pusat seperti pajak pertambahan nilai dan

pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn-BM), serta pajak penghasilan perseorangan maupun badan (PPh), termasuk migas. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan hubungan perpajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memperoleh bagian dari sumber-sumber pajak utama itu melalui mekanisme bagi hasil (*sharing tax*).

Retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah hasilnya belum maksimal. Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Komponen lain yang diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dari dinas-dinas, belum dapat berperan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena manajemen BUMD dan dinas-dinas yang belum mampu bekerja secara efektif dan efisien.

6.2.2. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dilihat dari Rasio antara PAD dengan PP

Nilai rasio yang dihasilkan sangat bervariasi dan terdapat nilai rasio yang ekstrim. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, rasio yang paling rendah terjadi pada tahun 1992 yaitu sebesar 0,1050 atau 10,50 %. Hal ini memberikan arti bahwa, pada tahun 1992 kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah, masih sangat rendah (tidak mandiri). Atau dengan kata lain, kemampuan pembiayaan pembangunan dengan dana asli

daerah sangat kecil. Dengan demikian, sebagian besar pengeluaran pembangunan masih dibiayai oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 1988, rasio PAD dengan PP adalah sebesar 6,3920 atau 600,39 %. Rasio ini yang paling tinggi sejak tahun 1981-2000. Hal ini menunjukkan bahwa, pada tahun 1988 pemerintah daerah Kabupaten Gowa mampu membiayai pengeluaran pembangunannya dengan dana asli daerah (mandiri). Kemampuan pembiayaan pembangunan dengan dana asli daerah atau Pendapatan Asli Daerah adalah lebih dari enam kali. Kemampuan pembiayaan pengeluaran pembangunan yang seluruhnya bersumber dari dana asli daerah juga terjadi pada tahun 1987, di mana rasio PAD dengan PP adalah sebesar 2,8271 atau 200,83 %. Secara rata-rata per tahun selama 20 tahun (1981-2000) adalah sebesar 0,6958 atau 69,58 %.

6.2.3. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dilihat dari Rasio antara PAD dengan PR

Nilai rasio yang diperoleh secara keseluruhan selama tahun 1981-2000 sangat rendah (tidak mandiri). Pada tahun 1984, rasio antara PAD dengan PR hanya sebesar 0,0465 atau 4,65 %. Ini memberikan arti bahwa, pada tahun 1984 pemerintah daerah Kabupaten Gowa tidak mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Kemampuan pembiayaan pengeluaran rutin yang bersumber dari Pendapatan Asli Daeah hanya sebesar 4,65 %. Dengan demikian, sebagian besar pengeluaran rutin dibiayai oleh pemerintah pusat.

Rasio antara PAD dengan PR yang tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 0,2174 atau 21,74 %. Secara rata-rata per tahun selama 20 tahun (1981-2000) adalah sebesar 0,1202 atau 12,02 %. Hal ini menunjukkan bahwa, selama 20 tahun pemerintah daerah Kabupaten Gowa tidak mampu membiayai pengeluaran rutinnya dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (tidak mandiri).

6.2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa

Berdasarkan ketiga pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah (telah dianalisis secara deskriptif-kualitatif), dapat diketahui bahwa, yang paling menentukan kemandirian pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, akan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah tersebut.

a. Pengaruh Bantuan atau Subsidi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 10.1 (Lampiran 5) menunjukkan bahwa, bantuan atau subsidi mempunyai pengaruh negatif dan nyata (signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar –0,805, di mana t_{hitung} –6,895 > t_{tabel} –1,76 (H_0 ditolak pada sisi kiri), dan probabilitas 0,000 < α (0,05). Ini berarti hipotesis yang

diajukan bahwa, faktor bantuan atau subsidi mempunyai pengaruh positif peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak terbukti.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi yang diperoleh tersebut, memberikan arti bahwa, apabila bantuan atau subsidi yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Gowa bertambah sebesar Rp.1000 (satuan yang digunakan dalam perhitungan), maka menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa sebesar Rp.805 (dengan asumsi faktor lain dalam model konstan).

Temuan penelitian ini adalah, **bantuan atau subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berpengaruh negatif dan nyata (signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).** Temuan ini sekaligus menolak teori yang dikemukakan oleh **Musgrave, R.A.** and **Musgrave, P.B. (19984), Arsyad (1990), Kirana (2000),** dan **Mahi (2000).** Teori yang dikemukakan tersebut mengatakan bahwa, bantuan atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu atau mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hakikat bantuan atau subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Untuk itu, daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Uppal** dan **Suparmoko (1986)** mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan

bahwa, bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berhubungan negatif dengan upaya pengumpulan pajak dan kebutuhan fiskal daerah. Seharusnya, bantuan pemerintah pusat berhubungan positif dengan upaya pengumpulan pajak dan kebutuhan fiskal daerah sesuai dengan teori.

Temuan empiris yang dihasilkan dalam penelitian ini, mempunyai kecenderungan mendukung otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Implementasi kedua undang-undang tersebut, dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Sebelum implementasi kedua undang-undang ini, bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari Subsidi Daerah Otonom (SDO), Instruksi Presiden (INPRES), dan Daftar Isian Proyek (DIP). Ketiga jenis bantuan ini, digolongkan menjadi bantuan khusus dan bantuan umum.

Bantuan khusus (*specific grant/conditional grant*), yaitu bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa-jasa publik yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa, peranan bantuan khusus sangat mendominasi keuangan daerah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa selama ini bantuan yang diterima oleh pemerintah daerah, penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menetapkan prioritas dan pembagian dana, sementara pemerintah

ADLN - Perpustakaan Unair

daerah hanya berwenang dalam hal penentuan lokasi proyek dan cara melaksanakannya. Bantuan khusus ini diatur secara ketat oleh pemerintah pusat.

Besarnya proporsi bantuan khusus terhadap total bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan arti bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan/keleluasaan di dalam menggunakan dana bantuan tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas dan keinginan masyarakat setempat. Implikasi yang ditimbulkan, bahwa bantuan khusus bukan merupakan instrumen yang dapat memacu atau mendorong peningkatan PAD. Selain itu, bantuan khusus menyebabkan melemahnya tingkat otonomi daerah, karena tidak mempunyai dampak positif terhadap peningkatan PAD. Kondisi seperti ini menyebabkan daerah-daerah tidak dimungkinkan untuk mandiri selama ini.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, menyebabkan terjadinya perubahan pada bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bantuan pemerintah pusat yang terdiri adri SDO, INPRES, dan DIP yang selanjutnya digolongkan menjadi bantuan khusus dan bantuan umum berubah menjadi dana perimbangan. Perubahan ini membawa implikasi penyerahan sepenuhnya belanja rutin daerah (sebelumnya disebut SDO) kepada pemerintah daerah. Ini berarti dana rutin daerah berubah, dari dana yang memiliki ciri-ciri khusus (penggunaannya ditentukan

Ciri khusus yang menjadi kekuatan utama jenis bantuan umum ini adalah dapat meningkatkan sumberdaya lokal, sekaligus mempertahankan pilihan fiskal (*fiscal choice*) yang ada dalam kewenangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan/keleluasaan dalam mengalokasikan dana yang diterima ke dalam berbagai kemungkinan pengeluaran yang sesuai dengan pilihan dan kepentingan daerah. Oleh karena itu, bantuan umum ini merupakan instrumen yang dapat memacu atau mendorong peningkatan PAD dan memperkuat tingkat otonomi daerah, karena mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan PAD.

Terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretiory power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan pembangunan daerah atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat, mendorong terwujudnya perkembangan dan kemajuan daerah itu sendiri, yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat.

Melaksanakan demokrasi pada lapisan bawah (Kabupaten/Kota), akan mendorong otoaktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur, mengurus, dan mengembangkan

daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya masing-masing.

b. Pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan yang diperoleh (Lampiran 5) menunjukkan bahwa, pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan nyata (signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjuk-kan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,718, di mana t_{hitung} 4,635 > t_{tabel} 1,76 (H_0 ditolak pada sisi kanan), dan probabilitas 0,000 < α (0,05). Ini berarti hipotesis yang diajukan bahwa, pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah terbukti. Hasil perhitungan koefisien regresi yang diperoleh tersebut, memberikan arti bahwa, apabila pemerintah daerah Kabupaten Gowa menambah pengeluaran pembangunannya sebesar Rp 1.000 (satuan yang digunakan dalam perhitungan), maka menyebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 718 (dengan asumsi faktor lain dalam model konstan).

Temuan penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh **Mubyarto (2001), Permadi (2000),** dan **Kuncoro (1997)**, yang mengatakan bahwa, pengeluaran pembangunan (tercermin dalam APBD) suatu daerah, adalah merupakan stimulus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pengeluaran pembangunan, merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan

pembangunan dibidang sarana dan prasarana serta infrastruktur perekonomian daerah, mempunyai dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh **Kim (1997)** di Korea mengenai peranan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menyimpulkan bahwa, investasi pemerintah (pengeluaran pembangunan), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (pengeluaran rutin), mempunyai pengaruh positif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasi kebijakan yang penting adalah pemerintah daerah terus mendorong peningkatan investasi pemerintah daerah, karena mempunyai efek ganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerimaan pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, temuan empiris dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Kim**.

Pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, membutuhkan dana (*fiscal needs*) sebanding dengan kegiatan yang harus dijalankan. Semakin banyak kegiatan pelayanan publik yang dilakukan, semakin besar dana yang dibutuhkan. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, seharusnya semakin ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Hal ini dapat dilakukan, karena pembiayaan pengeluaran pembangunan ini sebagian besar bersumber dari dana asli sendiri. Semakin besar anggaran pembangunan yang dikeluarkan, maka semakin besar pengaruh gandanya (*multiplier effect*) baik terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat, maupun terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Pengaruh Pengeluaran Rutin terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan yang diperoleh (Lampiran 5) menunjukkan bahwa, pengeluaran rutin mempunyai pengaruh positif dan nyata (signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,774, di mana t_{hitung} 4,995 > t_{tabel} 1,76 (H_0 ditolak pada sisi kanan), dan probabilitas 0,000 < α (0,05). Ini berarti hipotesis yang diajukan bahwa, pengeluaran rutin mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah terbukti. Sedangkan hasil perhitungan koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,774 memberikan arti bahwa, apabila pengeluaran rutin bertambah sebesar Rp 1.000 (satuan yang digunakan dalam perhitungan), maka menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 774 (dengan asumsi faktor lain dalam model konstan).

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai operasional penyelenggaraan roda pemerintahan, sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Pengeluaran rutin ini berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan pegawai. Dengan demikian, bertambahnya pengeluaran rutin ini menyebabkan kesejahteraan pegawai meningkat, yang selanjutnya berdampak positif pada peningkatan produktivitas dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh **Yuliati (2001),** mengenai pengaruh pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman Yogyakarta menyimpulkan bahwa, pengeluaran rutin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena, penghasilan yang diperoleh oleh pegawai dibelanjakan di luar Kabupaten Sleman.

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Yuliati,** bahwa penghasilan yang diperoleh oleh pegawai di Kabupaten Gowa dibelanjakan kembali di Kabupaten Gowa (tidak di bawah keluar). Dengan demikian, dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, yang selanjutnya mempunyai dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

d. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan yang diperoleh (Lampiran 5) menunjukkan bahwa, Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh positif tetapi tidak nyata (tidak signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,005176, di mana t_{hitung} 1,143 < t_{tabel} 1,76 (H_0 diterima), dan probabilitas 0,272 > α (0,05). Ini berarti hipotesis yang diajukan bahwa, produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah terbukti. Sedangkan hasil perhitungan koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,005176 memberikan arti bahwa, apabila Produk Domestik Regional Bruto bertambah sebesar Rp 1.000 (satuan yang digunakan dalam perhitungan) maka menyebabkan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 5,1 (dengan asumsi faktor lain dalam model konstan).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tidak secara langsung dipengaruhi oleh meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh meningkatnya basis pajak dan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Perkembangan ekonomi suatu daerah pada umumnya ditunjukkan oleh indikator perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Bagi pemerintah daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai, dan menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunannya di masa yang akan datang. Keberhasilan pembangunan ekonomi harus dikaitkan dengan 3 (tiga) nilai pokok yaitu :

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*).
2. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*)
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memiliki (*freedom of choice*)

e. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan yang diperoleh (Lampiran 5) menunjukkan bahwa, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan nyata (signifikan) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar –17,262, di mana t_{hitung} –3,501 > t_{tabel} –1,76

(H_0 ditolak pada sisi kiri), dan probabilitas 0,004 < α (0,05). Ini berarti hipotesis yang diajukan bahwa, jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak terbukti. Sedangkan hasil perhitungan koefisien regresi sebesar –17,262, memberikan arti bahwa, apabila penduduk bertambah 1 (satu) orang, maka akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah berkurang sebesar Rp 17.262 (dengan asumsi faktor lain dalam model konstan).

Temuan penelitian ini adalah terdapatnya kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, jumlah penduduk bukan merupakan modal dasar pembangunan, karena penduduk tersebut tidak berkualitas. Dengan demikian, jumlah penduduk yang besar merupakan beban pembangunan.

Temuan empiris ini mendukung teori yang dikemukakan oleh **Tjiptodherjanto (2000),** dan **Kirana (2000)** yang mengatakan bahwa, strategi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tanpa melihat potensi penduduk yang ada, nyatanya tidaklah berlangsung secara berkesinambungan (*sustained*). Dengan demikian model pembangunan yang sesuai adalah model pembangunan yang berwawasan kependudukan. Model pembangunan yang berwawasan kependudukan mengandung dua makna yaitu :

1. Pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam

proses pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk.

2. Pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Pembangunan yang dilaksanakan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata.

Berdasarkan pada temuan empiris dan teori-teori yang telah disebutkan, maka pemerintah daerah Kabupaten Gowa seharusnya melaksanakan pembangunan yang lebih berorientasi kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah, merupakan titik sentral suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.

6.3. Temuan Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini diharapkan dapat mengemukakan hubungan kausalitas antara faktor-faktor seperti bantuan atau subsidi, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah yang akan menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari hubungan kausalitas antara faktor-faktor seperti bantuan atau subsidi, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah, dikemukakan beberapa

ADLN - Perpustakaan Unair

temuan penelitian yang diharapkan dapat menjadi acuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut pembangunan ekonomi daerah dalam memasuki era otonomi daerah. Temuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara bantuan atau subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya pengaruh yang negatif ini, mempunyai kecenderungan bahwa semakin besar bantuan atau subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka semakin kecil kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Atau dengan kata lain, semakin rendah Pendapatan Asli Daerah. Implikasi psikologis yang muncul adalah pemerintah daerah kurang kreatif dan masa bodoh. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu mengharapkan bantuan atau subsidi yang memang disediakan oleh pemerintah pusat. Kondisi demikian menyebabkan daerah selama ini tidak bisa mandiri.
2. Terdapat pengaruh positif, dan signifikan antara pengeluaran pembangunan dengan Pendapatan Asli Daerah. Adanya pengaruh yang positif ini, mempunyai kecenderungan bahwa semakin besar pengeluaran pembangunan yang diperuntukkan kepada perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur perekonomian daerah, maka semakin besar kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, pengeluaran pembangunan merupakan stimulus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3. Terdapat pengaruh positif, dan signifikan antara pengeluaran rutin dengan Pendapatan Asli Daerah. Adanya pengaruh yang positif ini, mempunyai implikasi bahwa pengeluaran rutin berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mendorong peningkatan produktivitas (peningkatan kualitas sumberdaya manusia). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan faktor utama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
4. Terdapat pengaruh positif, dan signifikan antara produk domestik regional bruto dengan Pendapatan Asli Daerah. Adanya pengaruh yang positif ini, mempunyai kecenderungan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi suatu daerah akan meningkatkan kapasitas pajak. Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan daerah yang terdiri dari pajak dan bukan pajak, maka pendekatannya menggunakan produk domestik regional bruto sebagai kapasitas Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan ekonomi suatu daerah pada umumnya ditunjukkan oleh indikator perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Bagi pemerintah daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai, dan menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Pendapatan Asli Daerah.
5. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara jumlah penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah. Adanya pengaruh positif ini,

mempunyai kecenderungan bahwa, bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan ini tidak signifikan, hal ini mengandung arti bahwa penduduk Kota Makassar mempunyai potensi yang besar (sumberdaya manusia berkualitas) tetapi kurang berperan aktif dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Dengan demikian, temuan penelitian ini mempunyai kecenderungan mendukung otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Artinya, daerah harus diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Kekhawatiran lemahnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh daerah tidak terbukti.

6.4. Keterbatasan Penelitian

Bertitik tolak dari apa yang dihasilkan dari penelitian ini, disadari bahwa temuan yang diperoleh belum mampu memberikan hasil yang benar-benar akurat dalam menjawab seluruh permasalahan yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator utama yang menentukan kemandirian pemerintah daerah dalam memasuki era otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, dan kendala-kendala yang lain berupa :

a. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai laporan resmi instansi pemerintah yang berkaitan dengan

penelitian ini. Kekeliruan melaporkan dan mengambil data, menyebabkan simpulan menjadi bias.

b. Variabel yang digunakan merupakan variabel intervening. Artinya, antara variabel dapat saling mempengaruhi. Menentukan variabel bebas dengan variabel terikat, ditentukan oleh dukungan teori yang tepat. Dengan demikian, kekeliruan menempatkan teori menyebabkan simpulan menjadi bias.

c. Sampel daerah penelitian sangat sedikit, sehingga mempunyai keterbatasan dalam pengambilan simpulan secara induktif.

d. Keterbatasan dukungan teori dan hasil penelitian terdahulu tentang kemandirian pemerintah daerah sangat terbatas, sehingga pembuktian hasil penelitian ini dengan teori pendukungnya relatif sangat terbatas.

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, selanjutnya dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

7.1.1. Kota Makassar

1. Jika dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah (TPD), maka kemandirian pemerintah daerah Kota Makassar dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah masih rendah (belum mandiri).
2. Jika dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengeluaran pembangunan (PP), maka kemandirian pemerintah daerah Kota Makassar dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah cukup tinggi (mandiri).
3. Jika dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengeluaran rutin (PR), maka kemandirian pemerintah daerah Kota Makassar dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah masih rendah (belum mandiri).

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah atau kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Bantuan atau subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mempunyai pengaruh negatif, dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, mempunyai pengaruh positif, dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pengeluaran rutin yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, mempunyai pengaruh positif, dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Meningkatnya penerimaan daerah Kota Makassar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pemerintah daerah Kota Makassar memiliki kemandirian dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah.

7.1.2. Kabupaten Gowa

1. Jika dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah (TPD), maka kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah masih rendah (belum mandiri).

2. Jika dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengeluaran pembangunan (PP), maka kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah cukup tinggi (mandiri).
3. Jika dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengeluaran rutin (PR), maka kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam manajemen pembangunan ekonomi memasuki era otonomi daerah masih rendah (belum mandiri).

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah atau kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Bantuan atau subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mempunyai pengaruh negatif, dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, mempunyai pengaruh positif, dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pengeluaran rutin yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, mempunyai pengaruh positif, dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif, dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

5. Pembangunan daerah lebih berorientasi kepada pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan titik sentral pembangunan, karena merupakan modal dasar dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur.
6. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 harus didasarkan pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dan kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) daerah, serta mempertimbangkan baik *needs equalization* maupun *revenue equalization*, sehingga kemandirian pemerintah daerah akan meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, dan kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah dapat dikurangi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad, Jamaluddin. 1989. Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah : Kasus Di Aceh, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, ***Disertasi tidak dipublikasikan***, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Akamatsu, Shiro. 2000. Community Development and Participative Approach, ***Makalah***, Disajikan dalam Lokakarya Perencanaan Pembangunan dan Implementasi Otonomi Daerah, Tanggal 9 Maret 2000 di Makassar.

Alisjahbana, Armida S. 2000. Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. ***Makalah,*** Disajikan dalam Kongres ISEI Tanggal 22 April 2000 di Makassar.

Arsyad, Lincoln. 1999. ***Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah***, BPFE. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Arsyad, Nurjaman. 1990. Hubungan Fiskal antar Pemerintah di Indonesia, ***Analisa***, tahun XIX, No.3, CSIS, Jakarta.

Azis, Iwan Jaya. 1994. ***Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia***, LPFE, Universitas Indonesia, Jakarta.

Babbie, Earl. 1983. ***The Practice of Social Research***, Wadswoth Publishing Company, California.

Badan Pusat Statistik (BPS). 1999. Propinsi Sulawesi Selatan.

Bahl, R.W. 1971. A Regression Approach To Tax Effort and Tax Ratio Analysis, ***International Monetary Fund Staff***, Volume 38, 570-608

Bawazier, Fuad. 1988. Central-Local Fiscal Relation in Indonesia, ***Disertation Unpublished***, The University of Maryland, USA.

Bird, Richard M. and Vaillancout, Francois. 1998. ***Fiscal Decentralization in Developing Countries***, Canbridge University Press, London.

Budiharsono, Sugeng. 1989. Perencanaan Pembangunan Wilayah: Teori, Model dan Penerapannya, ***PAU - Studi Ekonomi***, Universitas Indonesia, Jakarta.

Boadway, Robin W and Wildasin, David E. 1984. ***Public Sector Economics***, Little, Brown and Company, Boston dan Toronto.

Booth, Anne. 1977. Interprovincial Comparisons of Taxable Capacity, Tax Effort and Developing Needs in Indonesia, ***Malayan Economic Review***, Volume 22.

Bratakusuma, Deddy Supriady. 2000. Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22/99, ***Makalah***, Disajikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan dan Implementasi Otonomi Daerah, Tanggal 9 Maret 2000 di Makassar.

Browning, E.K. and Browning, J.M. 1979. ***Fublic Finance and the Price System***, Macmillan Publishing Co, Inc. New York.

Chelliah, R. J. and Sinha, N. 1982. State Finance in India, ***World Bank Staff Working Paper***, Washington DC. Volume 3, No.523.

Chenery, H. B. and L. Taylor. 1968. Development Pattern Among Countries Overtime, ***Review of Economics and Statistics***, Volume 50.

Devas, N. 1988. ***Local Taxation in Indonesia*** : Opportunities for Reform, ***BIES***, Volume 24, Nomor 2.

Djojohadikusumo, Soemitro. 1994. ***Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan***, LP3ES, Jakarta.

Emory, C. William, and Cooper, Donalr R. 1991. ***Business Research Methods***, Fourth Edition, Richard D. Irwin Inc., USA.

Eriyatno, 2001. ***Sistem Pengembangan Perekonomian Daerah Berdasarkan Kemampuan Sumber Daya Lokal; dalam Manajemen Otonomi Daerah***, Penyunting Luthfi Pattimura, Pustaka LSKPI, Jakarta.

Fisher, Ronald C. 1988. ***State and Local Public Finance***, Scott, Foresman and Company, London.

Ferber, Robert. 1967. ***Research Methods in Economic and Business***, The Macmillan, Company, New York.

Gujarati, Damodar. 1990. ***Basic Econometric***, Mc Graw-Hill Book, Singapore.

Hirawan, S.B. 1986. Analisa Tentang Keuangan Daerah di Indonesia, ***Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia***, Volume XXXIV, Nomor 1, Jakarta.

Henley, D.Likierman, A.Peirin, J.Evans, M.Lapsley, I., and Whiteoak, J. 1992. ***Public Sector Accounting and Financial Control***, 4th Ed, Chapman & Hall, London.

Jones, Bernard. 1996. ***Financial Management in the Public Sector***, Mc Graw-Hill Companies, London.

Kamaluddin, Rustian. 1998. ***Pengantar Ekonomi Pembangunan***, LPFE. Universitas Indonesia, Jakarta.

Karseno, Arief Ramelan. 2000. Mambangun Keuangan Pemerintah Daerah yang Efisien, ***Makalah Disajikan pada Kongres ISEI***, Makassar.

Kerlinger Fred N. 1990. ***Foundation of Behavioral Research***, 3rd Edition, (Terjemahan oleh L.R.Simatupang), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Kim, Sung Tai. 1997. The Role of Local Public Sectors In Regional Economic Growth In Korea, ***Asian Economic Journal***, Vol.11, No.21, 166-168

Kirana, Wihana. et al. 2000. Kajian Profil Daerah Tingkat II Ditinjau dari Aspek Potensi Penerimaan Daerah, ***PAU-Studi Ekonomi***, UGM, Yogyakarta.

Koutsoyiannis, A. 1985. ***Theory of Econometrics***, Macmillan Published Ltd. London.

Kristiadi, J.B. 1986. Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah, ***Prisma***, LP3ES, Jakarta.

Lains, A. 1974. Local Finance and Regional Development in Indonesia: The West Sumatra Case, ***Thesis Unpublished***, University of the Philippines, Pilipina.

Litvack, Jennie, Junaid Ahmad, and Richard Bird. 1998. Rethinking Decentralization in Developing Countries, ***Sector Studies Series***, The World Bank, Washinton, D.C.

Mahi, Raksaka. 2000. Kebijakan Bantuan Pusat ke Daerah: Implikasinya Terhadap Pertumbuhan dan Pemerataan Antar Daerah, ***Makalah, Disajikan pada Kongres ISEI***, Makassar.

Mangkoesoebroto, Guritno. 1991. ***Ekonomi Publik***, Edisi Keempat, BPFE, UGM, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2001. Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam Era Otonomi Daerah, ***KEBI-STIKERS***, Surabaya.

Miller, Stephen M. and Russek, Frank S., 1997. Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Lokal Level, ***Public Finance Review***, Vol.25, No.2, 213-237.

Mubyarto. 2000. ***Otonomi Daerah dan Ekonomi Kerakyatan*** : Otonomi atau Federalisme: Dampaknya Terhadap Perekonomian, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

_____. 2001. ***Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia***, BPFE, UGM, Yogyakarta.

Musgrave, R.A. and Musgrave, P.B. 1984. ***Public Finance : Theory and Practice***, McGraw-Hill Book Company, Singapore.

Nanga, Muana. 1991. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II: Kasus Kabupaten Malang, Probolinggo, dan Trenggalek, ***Tesis Tidak Dipublikasikan***, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Nasir, Muhammad. 1985. ***Metode Penelitian***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nasution, Anwar. 1988. Penyesuaian Internal Untuk Menghadapi Kesulitan Eksternal, ***Prisma***, No.IX, LP3ES, Jakarta.

Nugroho, Riant D. 2000. ***Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi***, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Prasetiantono, Tony A. 1995. ***Agenda Ekonomi Indonesia***, STIE, Yogyakarta.

Prud'homme. 1995. Sources of Local Finance in Zaire, ***World Bank, Urban and Regional Report.***

Radianto, Elia. 1996. Peranan Otonomi Daerah Dalam Era Globalisasi, ***Kompas***, Jakarta.

Rasyid, Ryaas. 2000. ***Perspektif Otonomi Luas : Otonomi atau Federalisme; Dampaknya Terhadap Perekonomian***, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Ray, David. 1999. Indonesia in the Emerging Global Knowledge Economy Demand Side Pressures to Upgrade, ***Journal of Business***, Volume 1, No.2.

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. ***Ekonomika Publik***, BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Republik Indonesia, Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998. Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaat-an Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan : Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

----------, Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1999-2004

----------, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

----------, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

----------, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas).

----------, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salim, Emil. 2000. ***Otonomi dan Masalahnya: Otonomi atau Federalisme; Dampaknya Terhadap Perekonomian***, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sanders, M. 1977. Regional Finance in Indonesia, ***Journal BIES***, Volume 6, No.2.

Santosa, Singgih. 2002. ***Mengolah Data Statistik Secara Profesional Dengan SPSS Versi 10***, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.

Siagian, S.P. 1983. ***Administrasi Pembangunan***, Gunung Agung, Jakarta.

Sidik, Machfud. 2001. ***Perumusan Formula Perimbangan Fiskal Antar Daerah; dalam Manajemen Otonomi Daerah*** Penyunting Luthfi Pattimura, Pustaka LSKPI, Jakarta.

Sukirno, Sadono. 2000. ***Ekonomi Makro: Perkembangan Pemikiran Ekonomi dari Klasik Hingga Keynesian***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shah, Anwar. 1994. The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies, ***Policy and Research Series***, The World Bank, Washington DC.

Sjafrizal. 2000. Ketimpangan Ekonomi Daerah: Tendensi, Penyebab, dan Kebijakan Penanggulangan, ***Makalah***, Kongres ISEI, Makassar.

Smith, R.S. 1973. Financing Ceties in Developing Countries, ***International Monetary Fund Staff***, *Papers*, Volume 21, 329-388

Spiegel, Murray R. 1988. ***Theory and Poblems of Statistics***, Mc Graw-Hill, Inc, New York.

Tambunan, Tulus, 1999. ***Perekonomian Indonesia : Beberapa Isu Penting***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

----------, 2000. Desentralisasi Fiskal Membuat Daerah Tambah Baik atau Tambah Buruk, ***Kompas***, Jakarta.

Todaro, Michael P. 1997. ***Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga***, Alih Bahasa Burhanuddin Abdullah, Erlangga, Jakarta.

Tjiptodherijanto, Prijono. 2000. Pembangunan Berwawasan Kependudukan : Alternatif Strategi Pasca Krisis, ***Makalah***, Disajikan pada Kongres XIV ISEI, Tanggal 21-23 April 2000 di Makassar.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1991. ***Manajemen Pembangunan***, Haji Masagung, Jakarta.

Uppal, J.S. 1983. ***India's Economic Problems: An Analitical Approach***, Mc Graw-Hill Publishing Company Limited, New York.

----------, and Suparmoko, M. 1986. Inter-Governmental Fiscal Relation in Indonesia, ***Fakultas Ekonomi UGM***, Yogyakarta.

Wuryanto, Luky Eko. 1997. ***Desentralisasi Fiscal dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia*** : Aplikasi Pendekatan Model CGE Interregional; Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Weiss, John. 1995. ***Economic Policy in Developing Countries***: The Reform Agenda, Prentice Hall, London.

Yamane, Taro. 1973. ***Statistics An Introduction Analysis***, Harper International, Singapore.

Yuliati, Asnafiah. 2001. Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menyongsong Otonomi Daerah, ***KEBI-STIKERS***, Surabaya.

Yusuf, Maulana. 1999. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, ***(EKI) Ekonomi dan Keuangan Indonesia***, Vol.XLVII, Nomor 2.

Zadjuli, Soroso Imam. 1985. Pola Pembangunan Berimbang dalam Struktur Ekonomi Jawa Timur, ***Disertasi Tidak Dipublikasikan***, Program Pascasarjana UNAIR, Surabaya.

Lampiran 1: Uji Goodness of Fit dan Uji Regresi Kota Makassar

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	1.1E+07	8422711.3438	20
BD	3.2E+07	27475317.58	20
PP	1.4E+07	11422308.95	20
PR	3.4E+07	28978388.80	20
PDRB	1.8E+09	1859116506	20
POP	931521.8	168308.4853	20

Correlations

		PAD	BD	PP	PR	PDRB	POP
Pearson Correlation	PAD	1.000	.958	.831	.981	.978	.891
	BD	.958	1.000	.800	.987	.963	.896
	PP	.831	.800	1.000	.779	.736	.919
	PR	.981	.987	.779	1.000	.982	.872
	PDRB	.978	.963	.736	.982	1.000	.828
	POP	.891	.896	.919	.872	.828	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000	.000	.000	.000	.000
	BD	.000	.	.000	.000	.000	.000
	PP	.000	.000	.	.000	.000	.000
	PR	.000	.000	.000	.	.000	.000
	PDRB	.000	.000	.000	.000	.	.000
	POP	.000	.000	.000	.000	.000	.
N	PAD	20	20	20	20	20	20
	BD	20	20	20	20	20	20
	PP	20	20	20	20	20	20
	PR	20	20	20	20	20	20
	PDRB	20	20	20	20	20	20
	POP	20	20	20	20	20	20

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	POP, PDRB, PP, BD, PR[a]	.	Enter

a. All requested variables entered

b. Dependent Variable: PAD

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.997[a]	.994	.991	787535.4621	.994	431.858	5	14	.000	1.275

a. Predictors: (Constant), POP, PDRB, PP, BD, PR

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.34E+15	5	2.678E+14	431.858	.000[a]
	Residual	8.68E+12	14	6.202E+11		
	Total	1.35E+15	19			

a. Predictors: (Constant), POP, PDRB, PP, BD, PR

b. Dependent Variable: PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3134111	2743728		-1.142	.272		
	BD	-.204	.047	-.665	-4.323	.001	.019	51.376
	PP	.137	.040	.185	3.379	.004	.153	6.542
	PR	.248	.059	.854	4.227	.001	.011	88.780
	PDRB	2.441E-03	.001	.539	4.460	.001	.032	31.724
	POP	6.261	3.774	.125	1.659	.119	.081	12.358

a. Dependent Variable: PAD

Collinearity Diagnostics

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	BD	PP	PR	PDRB	POP
1	1	5.353	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.504	3.258	.00	.00	.00	.00	.01	.00
	3	.124	6.578	.00	.00	.37	.00	.01	.00
	4	1.466E-02	19.106	.00	.26	.09	.01	.50	.00
	5	3.167E-03	41.113	.00	.56	.01	.98	.47	.01
	6	1.473E-03	60.277	.99	.17	.53	.01	.01	.99

a. Dependent Variable: PAD

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3398612	2.9E+07	1.1E+07	8395538.5764	20
Residual	-1264127	1680696	6.752E-10	676016.5623	20
Std. Predicted Value	-.888	2.148	.000	1.000	20
Std. Residual	-1.605	2.134	.000	.858	20

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 2 : Uji Backward Elimination Kota Makassar

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	1.1E+07	8422711.3438	20
BD	3.2E+07	27475317.58	20
PP	1.4E+07	11422308.95	20
PR	3.4E+07	28978388.80	20
PDRB	1.8E+09	1859116506	20
POP	931521.8	168308.4853	20

Correlations

		PAD	BD	PP	PR	PDRB	POP
Pearson Correlation	PAD	1.000	.958	.831	.981	.978	.891
	BD	.958	1.000	.800	.987	.963	.896
	PP	.831	.800	1.000	.779	.736	.919
	PR	.981	.987	.779	1.000	.982	.872
	PDRB	.978	.963	.736	.982	1.000	.828
	POP	.891	.896	.919	.872	.828	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000	.000	.000	.000	.000
	BD	.000	.	.000	.000	.000	.000
	PP	.000	.000	.	.000	.000	.000
	PR	.000	.000	.000	.	.000	.000
	PDRB	.000	.000	.000	.000	.	.000
	POP	.000	.000	.000	.000	.000	.
N	PAD	20	20	20	20	20	20
	BD	20	20	20	20	20	20
	PP	20	20	20	20	20	20
	PR	20	20	20	20	20	20
	PDRB	20	20	20	20	20	20
	POP	20	20	20	20	20	20

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	POP, PDRB, PP, BD, PR[a]	.	Enter
2	.	POP	Backward (criterion: Probability of F-to-remove >= .100).

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

Model Summary[c]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.997[a]	.994	.991	787535.4621	.994	431.858	5	14	.000	
2	.996[b]	.992	.990	832265.1091	-.001	2.752	1	16	.119	1.191

a. Predictors: (Constant), POP, PDRB, PP, BD, PR

b. Predictors: (Constant), PDRB, PP, BD, PR

c. Dependent Variable: PAD

ANOVA[c]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.34E+15	5	2.678E+14	431.858	.000[a]
	Residual	8.68E+12	14	6.202E+11		
	Total	1.35E+15	19			
2	Regression	1.34E+15	4	3.344E+14	482.740	.000[b]
	Residual	1.04E+13	15	6.927E+11		
	Total	1.35E+15	19			

a. Predictors: (Constant), POP, PDRB, PP, BD, PR

b. Predictors: (Constant), PDRB, PP, BD, PR

c. Dependent Variable: PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3134111	2743728		-1.142	.272		
	BD	-.204	.047	-.665	-4.323	.001	.019	51.376
	PP	.137	.040	.185	3.379	.004	.153	6.542
	PR	.248	.059	.854	4.227	.001	.011	88.780
	PDRB	2.441E-03	.001	.539	4.460	.001	.032	31.724
	POP	6.261	3.774	.125	1.659	.119	.081	12.358
2	(Constant)	1382320	361063.2		3.828	.002		
	BD	-.178	.047	-.582	-3.785	.002	.022	45.928
	PP	.187	.029	.253	6.526	.000	.342	2.926
	PR	.249	.062	.855	4.005	.001	.011	88.779
	PDRB	2.318E-03	.001	.512	4.044	.001	.032	31.135

a. Dependent Variable: PAD

Collinearity Diagnostics

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions (Constant)	BD	PP	PR	PDRB	POP
1	1	5.353	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.504	3.258	.00	.00	.00	.00	.01	.00
	3	.124	6.578	.00	.00	.37	.00	.01	.00
	4	1.466E-02	19.106	.00	.26	.09	.01	.50	.00
	5	3.167E-03	41.113	.00	.56	.01	.98	.47	.01
	6	1.473E-03	60.277	.99	.17	.53	.01	.01	.99
2	1	4.488	1.000	.01	.00	.01	.00	.00	
	2	.371	3.476	.55	.00	.00	.00	.01	
	3	.123	6.032	.15	.00	.82	.00	.01	
	4	1.460E-02	17.531	.11	.30	.18	.01	.52	
	5	3.127E-03	37.884	.18	.70	.00	.99	.46	

a. Dependent Variable: PAD

Excluded Variables[b]

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics: Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
2	POP	.125[a]	1.659	.119	.405	8.092E-02	12.358	1.126E-02

a. Predictors in the Model: (Constant), PDRB, PP, BD, PR

b. Dependent Variable: PAD

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3579824	2.9E+07	1.1E+07	8390186.2568	20
Residual	-1134682	1694856	4.889E-10	739486.9551	20
Std. Predicted Value	-.867	2.185	.000	1.000	20
Std. Residual	-1.363	2.036	.000	.889	20

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 3 : Uji Forward Elimination Kota Makassar

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	1.1E+07	8422711.3438	20
BD	3.2E+07	27475317.58	20
PP	1.4E+07	11422308.95	20
PR	3.4E+07	28978388.80	20
PDRB	1.8E+09	1859116506	20
POP	931521.8	168308.4853	20

Correlations

		PAD	BD	PP	PR	PDRB	POP
Pearson Correlation	PAD	1.000	.958	.831	.981	.978	.891
	BD	.958	1.000	.800	.987	.963	.896
	PP	.831	.800	1.000	.779	.736	.919
	PR	.981	.987	.779	1.000	.982	.872
	PDRB	.978	.963	.736	.982	1.000	.828
	POP	.891	.896	.919	.872	.828	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000	.000	.000	.000	.000
	BD	.000	.	.000	.000	.000	.000
	PP	.000	.000	.	.000	.000	.000
	PR	.000	.000	.000	.	.000	.000
	PDRB	.000	.000	.000	.000	.	.000
	POP	.000	.000	.000	.000	.000	.
N	PAD	20	20	20	20	20	20
	BD	20	20	20	20	20	20
	PP	20	20	20	20	20	20
	PR	20	20	20	20	20	20
	PDRB	20	20	20	20	20	20
	POP	20	20	20	20	20	20

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PR		Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050)
2	PP		Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050)
3	PDRB		Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050)
4	BD		Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050)

a. Dependent Variable: PAD

Model Summary [e]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.981[a]	.962	.960	1689007.47	.962	454.492	1	18	.000	
2	.986[b]	.973	.970	1460818.57	.011	7.063	1	17	.017	
3	.992[c]	.985	.982	1126803.01	.012	12.572	1	16	.003	
4	.996[d]	.992	.990	832265.1091	.007	14.329	1	15	.002	1.191

a. Predictors: (Constant), PR

b. Predictors: (Constant), PR, PP

c. Predictors: (Constant), PR, PP, PDRB

d. Predictors: (Constant), PR, PP, PDRB, BD

e. Dependent Variable: PAD

ANOVA[e]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.30E+15	1	1.297E+15	454.492	.000[a]
	Residual	5.13E+13	18	2.853E+12		
	Total	1.35E+15	19			
2	Regression	1.31E+15	2	6.558E+14	307.317	.000[b]
	Residual	3.63E+13	17	2.134E+12		
	Total	1.35E+15	19			
3	Regression	1.33E+15	3	4.425E+14	348.534	.000[c]
	Residual	2.03E+13	16	1.270E+12		
	Total	1.35E+15	19			
4	Regression	1.34E+15	4	3.344E+14	482.740	.000[d]
	Residual	1.04E+13	15	6.927E+11		
	Total	1.35E+15	19			

a. Predictors: (Constant), PR

b. Predictors: (Constant), PR, PP

c. Predictors: (Constant), PR, PP, PDRB

d. Predictors: (Constant), PR, PP, PDRB, BD

e. Dependent Variable: PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1213684	589256.8		2.060	.054		
	PR	.285	.013	.981	21.319	.000	1.000	1.000
2	(Constant)	734564.0	540594.9		1.359	.192		
	PR	.247	.018	.849	13.378	.000	.393	2.546
	PP	.124	.047	.169	2.658	.017	.393	2.546
3	(Constant)	1597163	482765.8		3.308	.004		
	PR	6.808E-02	.053	.227	1.248	.230	.028	35.208
	PP	.158	.037	.214	4.228	.001	.368	2.718
	PDRB	2.706E-03	.001	.597	3.546	.003	.033	30.135
4	(Constant)	1382320	361063.2		3.828	.002		
	PR	.249	.062	.855	4.005	.001	.011	88.779
	PP	.187	.029	.253	6.526	.000	.342	2.926
	PDRB	2.318E-03	.001	.512	4.044	.001	.032	31.135
	BD	-.178	.047	-.582	-3.785	.002	.022	45.928

a. Dependent Variable: PAD

Excluded Variables

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	BD	-.417[a]	-1.477	.158	-.337	2.491E-02	40.139	2.491E-02
	PP	.169[a]	2.658	.017	.542	.393	2.546	.393
	PDRB	.418[a]	1.816	.087	.403	3.543E-02	28.221	3.543E-02
	POP	.149[a]	1.668	.114	.375	.240	4.171	.240
2	BD	-.693[b]	-3.275	.005	-.633	2.250E-02	44.452	2.250E-02
	PDRB	.597[b]	3.546	.003	.663	3.318E-02	30.135	2.640E-02
	POP	-.049[b]	-.364	.721	-.091	9.384E-02	10.657	9.384E-02
3	BD	-.582[c]	-3.785	.002	-.699	2.177E-02	45.928	1.126E-02
	POP	.019[c]	.180	.859	.046	9.052E-02	11.048	2.437E-02
4	POP	.125[d]	1.659	.119	.405	8.092E-02	12.358	1.126E-02

a. Predictors in the Model: (Constant), PR

b. Predictors in the Model: (Constant), PR, PP

c. Predictors in the Model: (Constant), PR, PP, PDRB

d. Predictors in the Model: (Constant), PR, PP, PDRB, BD

e. Dependent Variable: PAD

Collinearity Diagnostics

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	PR	PP	PDRB	BD
1	1	1.768	1.000	.12	.12			
	2	.232	2.758	.88	.88			
2	1	2.647	1.000	.04	.02	.02		
	2	.266	3.153	.94	.12	.07		
	3	8.685E-02	5.520	.01	.86	.91		
3	1	3.521	1.000	.02	.00	.01	.00	
	2	.351	3.167	.56	.00	.00	.01	
	3	.121	5.386	.15	.01	.84	.02	
	4	6.949E-03	22.509	.28	.99	.15	.97	
4	1	4.488	1.000	.01	.00	.01	.00	.00
	2	.371	3.476	.55	.00	.00	.01	.00
	3	.123	6.032	.15	.00	.82	.01	.00
	4	1.460E-02	17.531	.11	.01	.18	.52	.30
	5	3.127E-03	37.884	.18	.99	.00	.46	.70

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 4 : Uji Stepwise Method Kota Makassar

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	1.1E+07	8422711.3438	20
BD	3.2E+07	27475317.58	20
PP	1.4E+07	11422308.95	20
PR	3.4E+07	28978388.80	20
PDRB	1.8E+09	1859116506	20
POP	931521.8	168308.4853	20

Correlations

		PAD	BD	PP	PR	PDRB	POP
Pearson Correlation	PAD	1.000	.958	.831	.981	.978	.891
	BD	.958	1.000	.800	.987	.963	.896
	PP	.831	.800	1.000	.779	.736	.919
	PR	.981	.987	.779	1.000	.982	.872
	PDRB	.978	.963	.736	.982	1.000	.828
	POP	.891	.896	.919	.872	.828	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000	.000	.000	.000	.000
	BD	.000	.	.000	.000	.000	.000
	PP	.000	.000	.	.000	.000	.000
	PR	.000	.000	.000	.	.000	.000
	PDRB	.000	.000	.000	.000	.	.000
	POP	.000	.000	.000	.000	.000	.
N	PAD	20	20	20	20	20	20
	BD	20	20	20	20	20	20
	PP	20	20	20	20	20	20
	PR	20	20	20	20	20	20
	PDRB	20	20	20	20	20	20
	POP	20	20	20	20	20	20

Variables Entered/Removed [a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PR		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
2	PP		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
3	PDRB		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
4		PR	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

a. Dependent Variable: PAD

Model Summary[e]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.981[a]	.962	.960	1889007.47	.962	454.492	1	18	.000	
2	.986[b]	.973	.970	1460818.57	.011	7.083	1	17	.017	
3	.992[c]	.985	.982	1126803.01	.012	12.572	1	16	.003	
4	.992[d]	.983	.982	1145165.13	-.001	1.559	1	18	.230	1.221

a. Predictors: (Constant), PR

b. Predictors: (Constant), PR, PP

c. Predictors: (Constant), PR, PP, PDRB

d. Predictors: (Constant), PP, PDRB

e. Dependent Variable: PAD

ANOVA[e]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.30E+15	1	1.297E+15	454.492	.000[a]
	Residual	5.13E+13	18	2.853E+12		
	Total	1.35E+15	19			
2	Regression	1.31E+15	2	6.558E+14	307.317	.000[b]
	Residual	3.63E+13	17	2.134E+12		
	Total	1.35E+15	19			
3	Regression	1.33E+15	3	4.425E+14	348.534	.000[c]
	Residual	2.03E+13	16	1.270E+12		
	Total	1.35E+15	19			
4	Regression	1.33E+15	2	6.628E+14	505.415	.000[d]
	Residual	2.23E+13	17	1.311E+12		
	Total	1.35E+15	19			

a. Predictors: (Constant), PR

b. Predictors: (Constant), PR, PP

c. Predictors: (Constant), PR, PP, PDRB

d. Predictors: (Constant), PP, PDRB

e. Dependent Variable: PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1213684	589256.6		2.060	.054		
	PR	.285	.013	.981	21.319	.000	1.000	1.000
2	(Constant)	734564.0	540594.9		1.359	.192		
	PR	.247	.018	.849	13.378	.000	.393	2.546
	PP	.124	.047	.169	2.658	.017	.393	2.546
3	(Constant)	1597163	482765.8		3.308	.004		
	PR	6.608E-02	.053	.227	1.248	.230	.028	35.208
	PP	.158	.037	.214	4.228	.001	.368	2.718
	PDRB	2.706E-03	.001	.597	3.546	.003	.033	30.135
4	(Constant)	1916802	415948.8		4.608	.000		
	PP	.179	.034	.242	5.258	.000	.459	2.179
	PDRB	3.624E-03	.000	.800	17.375	.000	.459	2.179

a. Dependent Variable: PAD

Excluded Variables[e]

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	BD	-.417[a]	-1.477	.158	-.337	2.491E-02	40.139	2.491E-02
	PP	.169[a]	2.658	.017	.542	.393	2.546	.393
	PDRB	.418[a]	1.816	.087	.403	3.543E-02	28.221	3.543E-02
	POP	.149[a]	1.668	.114	.375	.240	4.171	.240
2	BD	-.693[b]	-3.275	.005	-.633	2.250E-02	44.452	2.250E-02
	PDRB	.597[b]	3.546	.003	.663	3.318E-02	30.135	2.840E-02
	POP	-.049[b]	-.364	.721	-.091	9.384E-02	10.657	9.384E-02
3	BD	-.582[c]	-3.785	.002	-.699	2.177E-02	45.928	1.126E-02
	POP	.019[c]	.180	.859	.046	9.052E-02	11.048	2.437E-02
4	BD	-.104[d]	-.769	.453	-.189	5.490E-02	18.214	5.490E-02
	POP	.061[d]	.621	.543	.153	.106	9.479	.106
	PR	.227[d]	1.248	.230	.298	2.840E-02	35.208	2.840E-02

a. Predictors in the Model: (Constant), PR

b. Predictors in the Model: (Constant), PR, PP

c. Predictors in the Model: (Constant), PR, PP, PDRB

d. Predictors in the Model: (Constant), PP, PDRB

e. Dependent Variable: PAD

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PR	PP	PDRB
1	1	1.768	1.000	.12	.12		
	2	.232	2.758	.88	.88		
2	1	2.647	1.000	.04	.02	.02	
	2	.266	3.153	.94	.12	.07	
	3	8.685E-02	5.520	.01	.86	.91	
3	1	3.521	1.000	.02	.00	.01	.00
	2	.351	3.167	.56	.00	.00	.01
	3	.121	5.386	.15	.01	.84	.02
	4	6.949E-03	22.509	.28	.99	.15	.97
4	1	2.575	1.000	.05		.02	.03
	2	.314	2.863	.77		.02	.24
	3	.110	4.830	.19		.96	.72

a. Dependent Variable: PAD

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3718756	2.8E+07	1.1E+07	8352766.3464	20
Residual	-1979644	1980796	2.328E-11	1083217.7725	20
Std. Predicted Value	-.855	2.060	.000	1.000	20
Std. Residual	-1.729	1.730	.000	.946	20

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 5: Uji Goodness of Fit dan Uji Regresi Kabupaten Gowa

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	2045091	2376935.6563	20
BD	2.0E+07	20914640.04	20
PP	8750289	10258239.96	20
PR	1.4E+07	13882003.00	20
PDRB	3.6E+08	330811294.1	20
POP	427612.6	48357.8890	20

Correlations

		PAD	BD	PP	PR	PDRB	POP
Pearson Correlation	PAD	1.000	.875	.891	.894	.926	.834
	BD	.875	1.000	.989	.993	.988	.868
	PP	.891	.989	1.000	.971	.985	.857
	PR	.894	.993	.971	1.000	.990	.890
	PDRB	.926	.988	.985	.990	1.000	.906
	POP	.834	.868	.857	.890	.906	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000	.000	.000	.000	.000
	BD	.000	.	.000	.000	.000	.000
	PP	.000	.000	.	.000	.000	.000
	PR	.000	.000	.000	.	.000	.000
	PDRB	.000	.000	.000	.000	.	.000
	POP	.000	.000	.000	.000	.000	.
N	PAD	20	20	20	20	20	20
	BD	20	20	20	20	20	20
	PP	20	20	20	20	20	20
	PR	20	20	20	20	20	20
	PDRB	20	20	20	20	20	20
	POP	20	20	20	20	20	20

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	POP, PP, PR[a], PDRB, BD	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.990[a]	.981	.974	381005.0289	.981	145.096	5	14	.000	2.361

a. Predictors: (Constant), POP, PP, PR, PDRB, BD

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.05E+14	5	2.106E+13	145.096	.000[a]
	Residual	2.03E+12	14	1.452E+11		
	Total	1.07E+14	19			

a. Predictors: (Constant), POP, PP, PR, PDRB, BD

b. Dependent Variable: PAD

Lampiran 6 : Uji Backward Elimination Kabupaten Gowa

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	2045091	2376935.6563	20
BD	2.0E+07	20914640.04	20
PP	8750289	10258239.96	20
PR	1.4E+07	13882003.00	20
PDRB	3.6E+08	330811294.1	20
POP	427612.6	48357.6890	20

Correlations

		PAD	BD	PP	PR	PDRB	POP
Pearson Correlation	PAD	1.000	.875	.891	.894	.926	.834
	BD	.875	1.000	.989	.993	.988	.868
	PP	.891	.989	1.000	.971	.985	.857
	PR	.894	.993	.971	1.000	.990	.890
	PDRB	.926	.988	.985	.990	1.000	.906
	POP	.834	.868	.857	.890	.906	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000	.000	.000	.000	.000
	BD	.000	.	.000	.000	.000	.000
	PP	.000	.000	.	.000	.000	.000
	PR	.000	.000	.000	.	.000	.000
	PDRB	.000	.000	.000	.000	.	.000
	POP	.000	.000	.000	.000	.000	.
N	PAD	20	20	20	20	20	20
	BD	20	20	20	20	20	20
	PP	20	20	20	20	20	20
	PR	20	20	20	20	20	20
	PDRB	20	20	20	20	20	20
	POP	20	20	20	20	20	20

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	POP, PP, PR, PDRB, BD[a]	.	Enter
2	.	PDRB	Backward (criterion: Probability of F-to-remove >= .100).

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

Model Summary[c]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.990[a]	.981	.974	381005.0289	.981	145.096	5	14	.000	
2	.990[b]	.979	.974	384867.6402	-.002	1.306	1	16	.272	2.244

a. Predictors: (Constant), POP, PP, PR, PDRB, BD

b. Predictors: (Constant), POP, PP, PR, BD

c. Dependent Variable: PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6383938	1826302		3.496	.004		
	BD	-.805	.117	-7.084	-6.895	.000	.001	780.616
	PP	.718	.155	3.098	4.635	.000	.003	330.322
	PR	.774	.155	4.521	4.995	.000	.002	605.799
	PDRB	5.176E-03	.005	.720	1.143	.272	.003	293.872
	POP	-17.262	4.931	-.351	-3.501	.004	.134	7.441
2	(Constant)	5812066	1774196		3.276	.005		
	BD	-.900	.083	-7.919	-10.843	.000	.003	386.528
	PP	.870	.080	3.755	10.920	.000	.012	85.678
	PR	.922	.086	5.386	10.753	.000	.005	181.822
	POP	-15.164	4.622	-.308	-3.281	.005	.156	6.409

a. Dependent Variable: PAD

ANOVA[c]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.05E+14	5	2.106E+13	145.096	.000[a]
	Residual	2.03E+12	14	1.452E+11		
	Total	1.07E+14	19			
2	Regression	1.05E+14	4	2.628E+13	177.428	.000[b]
	Residual	2.22E+12	15	1.481E+11		
	Total	1.07E+14	19			

a. Predictors: (Constant), POP, PP, PR, PDRB, BD

b. Predictors: (Constant), POP, PP, PR, BD

c. Dependent Variable: PAD

Collinearity Diagnostics

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions (Constant)	BD	PP	PR	PDRB	POP
1	1	5.297	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.681	2.789	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	3	1.532E-02	18.591	.00	.00	.06	.02	.00	.00
	4	6.039E-03	29.616	.02	.03	.00	.00	.14	.01
	5	8.470E-04	79.080	.97	.02	.01	.00	.13	.99
	6	2.686E-04	140.416	.00	.95	.93	.97	.73	.00
2	1	4.335	1.000	.00	.00	.00	.00		.00
	2	.647	2.589	.00	.00	.00	.00		.00
	3	1.517E-02	16.905	.00	.00	.23	.08		.00
	4	1.989E-03	46.693	.32	.19	.17	.08		.31
	5	5.944E-04	85.406	.68	.80	.60	.85		.69

a. Dependent Variable: PAD

Excluded Variables[b]

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics: Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
2	PDRB	.720[a]	1.143	.272	.292	3.403E-03	293.872	1.281E-03

a. Predictors in the Model: (Constant), POP, PP, PR, BD

b. Dependent Variable: PAD

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-229941	6842249	2045091	2352208.2868	20
Residual	-654894	890509.3	1.374E-09	341963.8721	20
Std. Predicted Value	-.967	2.039	.000	1.000	20
Std. Residual	-1.702	2.314	.000	.889	20

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 7 : Uji Forward Elimination Kabupaten Gowa

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	2045091	2376935.6563	20
BD	2.0E+07	20914640.04	20
PP	8750289	10258239.96	20
PR	1.4E+07	13882003.00	20
PDRB	3.6E+08	330811294.1	20
POP	427612.6	48357.8890	20

Correlations

		PAD	BD	PP	PR	PDRB	POP
Pearson Correlation	PAD	1.000	.875	.891	.894	.926	.834
	BD	.875	1.000	.989	.993	.988	.868
	PP	.891	.989	1.000	.971	.985	.857
	PR	.894	.993	.971	1.000	.990	.890
	PDRB	.926	.988	.985	.990	1.000	.906
	POP	.834	.868	.857	.890	.906	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000	.000	.000	.000	.000
	BD	.000	.	.000	.000	.000	.000
	PP	.000	.000	.	.000	.000	.000
	PR	.000	.000	.000	.	.000	.000
	PDRB	.000	.000	.000	.000	.	.000
	POP	.000	.000	.000	.000	.000	.
N	PAD	20	20	20	20	20	20
	BD	20	20	20	20	20	20
	PP	20	20	20	20	20	20
	PR	20	20	20	20	20	20
	PDRB	20	20	20	20	20	20
	POP	20	20	20	20	20	20

Variables Entered/Removed [a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB	.	Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050)
2	BD	.	Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050)
3	POP	.	Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050)

a. Dependent Variable: PAD

Model Summary[d]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.926[a]	.858	.850	920292.8962	.858	108.747	1	18	.000	
2	.964[b]	.928	.920	672299.8478	.070	16.729	1	17	.001	
3	.973[c]	.947	.937	594694.1317	.019	5.726	1	16	.029	2.394

a. Predictors: (Constant), PDRB

b. Predictors: (Constant), PDRB, BD

c. Predictors: (Constant), PDRB, BD, POP

d. Dependent Variable: PAD

ANOVA[d]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.21E+13	1	9.210E+13	108.747	.000[a]
	Residual	1.52E+13	18	8.469E+11		
	Total	1.07E+14	19			
2	Regression	9.97E+13	2	4.983E+13	110.250	.000[b]
	Residual	7.68E+12	17	4.520E+11		
	Total	1.07E+14	19			
3	Regression	1.02E+14	3	3.390E+13	95.843	.000[c]
	Residual	5.66E+12	16	3.537E+11		
	Total	1.07E+14	19			

a. Predictors: (Constant), PDRB

b. Predictors: (Constant), PDRB, BD

c. Predictors: (Constant), PDRB, BD, POP

d. Dependent Variable: PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-357270	308898.7		-1.157	.263		
	PDRB	6.655E-03	.001	.926	10.428	.000	1.000	1.000
2	(Constant)	-855017	256382.8		-3.335	.004		
	PDRB	1.898E-02	.003	2.641	6.225	.000	.023	42.763
	BD	-.197	.048	-1.736	-4.090	.001	.023	42.763
3	(Constant)	5705329	2750851		2.074	.055		
	PDRB	2.429E-02	.003	3.381	6.954	.000	.014	71.728
	BD	-.245	.047	-2.156	-5.202	.000	.019	52.114
	POP	-17.589	7.350	-.358	-2.393	.029	.147	6.788

a. Dependent Variable: PAD

Excluded Variables[d]

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	BD	-1.736[a]	-4.090	.001	-.704	2.338E-02	42.763	2.338E-02
	PP	-.671[a]	-1.351	.194	-.311	3.056E-02	32.722	3.056E-02
	PR	-1.126[a]	-1.932	.070	-.424	2.017E-02	49.569	2.017E-02
	POP	-.028[a]	-.131	.897	-.032	.180	5.570	.180
2	PP	.330[b]	.711	.487	.175	2.009E-02	49.772	1.537E-02
	PR	.278[b]	.435	.670	.108	1.079E-02	92.685	1.079E-02
	POP	-.358[b]	-2.393	.029	-.513	.147	6.788	1.394E-02
3	PP	.047[c]	.108	.915	.028	1.833E-02	54.564	1.134E-02
	PR	.688[c]	1.216	.243	.300	9.993E-03	100.069	9.619E-03

a. Predictors in the Model: (Constant), PDRB

b. Predictors in the Model: (Constant), PDRB, BD

c. Predictors in the Model: (Constant), PDRB, BD, POP

d. Dependent Variable: PAD

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PDRB	BD	POP
1	1	1.746	1.000	.13	.13		
	2	.254	2.621	.87	.87		
2	1	2.633	1.000	.04	.00	.00	
	2	.361	2.700	.68	.00	.01	
	3	5.551E-03	21.781	.28	1.00	.99	
3	1	3.503	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.490	2.674	.00	.00	.01	.00
	3	5.908E-03	24.352	.02	.49	.72	.01
	4	9.209E-04	61.676	.97	.51	.27	.99

a. Dependent Variable: PAD

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-81735.5	7397390	2045091	2313439.6971	20
Residual	-839266	1461206	7.800E-10	545728.7626	20
Std. Predicted Value	-.919	2.314	.000	1.000	20
Std. Residual	-1.411	2.457	.000	.918	20

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 8 : Uji Stepwise Method Kabupaten Gowa

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	2045091	2376935.6563	20
BD	2.0E+07	20914640.04	20
PP	8750289	10258239.96	20
PR	1.4E+07	13882003.00	20
PDRB	3.6E+08	330811294.1	20
POP	427612.6	48357.8890	20

Correlations

		PAD	BD	PP	PR	PDRB	POP
Pearson Correlation	PAD	1.000	.875	.891	.894	.926	.834
	BD	.875	1.000	.989	.993	.988	.868
	PP	.891	.989	1.000	.971	.985	.857
	PR	.894	.993	.971	1.000	.990	.890
	PDRB	.926	.988	.985	.990	1.000	.906
	POP	.834	.868	.857	.890	.906	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000	.000	.000	.000	.000
	BD	.000	.	.000	.000	.000	.000
	PP	.000	.000	.	.000	.000	.000
	PR	.000	.000	.000	.	.000	.000
	PDRB	.000	.000	.000	.000	.	.000
	POP	.000	.000	.000	.000	.000	.
N	PAD	20	20	20	20	20	20
	BD	20	20	20	20	20	20
	PP	20	20	20	20	20	20
	PR	20	20	20	20	20	20
	PDRB	20	20	20	20	20	20
	POP	20	20	20	20	20	20

Variables Entered/Removed [a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
2	BD		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
3	POP		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

a. Dependent Variable: PAD

Model Summary [d]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.926[a]	.858	.850	920292.8962	.858	108.747	1	18	.000	
2	.964[b]	.928	.920	672299.8478	.070	16.729	1	17	.001	
3	.973[c]	.947	.937	594694.1317	.019	5.728	1	16	.029	2.394

a. Predictors: (Constant), PDRB

b. Predictors: (Constant), PDRB, BD

c. Predictors: (Constant), PDRB, BD, POP

d. Dependent Variable: PAD

ANOVA[d]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.21E+13	1	9.210E+13	108.747	.000[a]
	Residual	1.52E+13	18	8.469E+11		
	Total	1.07E+14	19			
2	Regression	9.97E+13	2	4.983E+13	110.250	.000[b]
	Residual	7.68E+12	17	4.520E+11		
	Total	1.07E+14	19			
3	Regression	1.02E+14	3	3.390E+13	95.843	.000[c]
	Residual	5.66E+12	16	3.537E+11		
	Total	1.07E+14	19			

a. Predictors: (Constant), PDRB

b. Predictors: (Constant), PDRB, BD

c. Predictors: (Constant), PDRB, BD, POP

d. Dependent Variable: PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-357270	308898.7		-1.157	.263		
	PDRB	6.655E-03	.001	.926	10.428	.000	1.000	1.000
2	(Constant)	-855017	256382.8		-3.335	.004		
	PDRB	1.898E-02	.003	2.641	6.225	.000	.023	42.763
	BD	-.197	.048	-1.736	-4.090	.001	.023	42.763
3	(Constant)	5705329	2750851		2.074	.055		
	PDRB	2.429E-02	.003	3.381	6.954	.000	.014	71.728
	BD	-.245	.047	-2.156	-5.202	.000	.019	52.114
	POP	-17.589	7.350	-.358	-2.393	.029	.147	6.788

a. Dependent Variable: PAD

Excluded Variables[d]

Model		Beta In	t	Sig	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	BD	-1.736[a]	-4.090	.001	-.704	2.338E-02	42.763	2.338E-02
	PP	-.671[a]	-1.351	.194	-.311	3.056E-02	32.722	3.056E-02
	PR	-1.126[a]	-1.932	.070	-.424	2.017E-02	49.569	2.017E-02
	POP	-.028[a]	-.131	.897	-.032	.180	5.570	.180
2	PP	.330[b]	.711	.487	.175	2.009E-02	49.772	1.537E-02
	PR	.278[b]	.435	.670	.108	1.079E-02	92.685	1.079E-02
	POP	-.358[b]	-2.393	.029	-.513	.147	6.788	1.394E-02
3	PP	.047[c]	.108	.915	.028	1.833E-02	54.564	1.134E-02
	PR	.688[c]	1.216	.243	.300	9.993E-03	100.069	9.619E-03

a. Predictors in the Model: (Constant), PDRB

b. Predictors in the Model: (Constant), PDRB, BD

c. Predictors in the Model: (Constant), PDRB, BD, POP

d. Dependent Variable: PAD

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PDRB	BD	POP
1	1	1.746	1.000	.13	.13		
	2	.254	2.621	.87	.87		
2	1	2.633	1.000	.04	.00	.00	
	2	.361	2.700	.68	.00	.01	
	3	5.551E-03	21.781	.28	1.00	.99	
3	1	3.503	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.490	2.674	.00	.00	.01	.00
	3	5.908E-03	24.352	.02	.49	.72	.01
	4	9.209E-04	61.676	.97	.51	.27	.99

a. Dependent Variable: PAD

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-81735.5	7397390	2045091	2313439.6971	20
Residual	-839266	1461206	7.800E-10	545728.7626	20
Std. Predicted Value	-.919	2.314	.000	1.000	20
Std. Residual	-1.411	2.457	.000	.918	20

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 9 : Elemen-Elemen Penerimaan Daerah Pada Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal (Berdasarkan UU No.25 Tahun 1999)

I. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas :

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang Sah

II. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain Penerimaan yang Sah

III. Dana Perimbangan

a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Penghasilan Perorangan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hask Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Penerimaan dari Sumberdaya alam (SDA).

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam struktur APBD baru dengan penekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi :

a. Pajak Provinsi terdiri atas: (i) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air, (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan Di Atas Air, (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan (vii) Pajak Parkir..
c. Retribusi dirinci menjadi : (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, dan (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.

Bagian daerah yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumberdaya alam (SDA) sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk daerah, dengan perincian sebagai berikut :

1. Sektor Kehutanan

Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) sebesar 80% dengan rincian :

- Provinsi 16 %
- Kabupaten/Kota Penghasil 64 %

Penerimaan Provinsi dari sumberdaya hutan sebesar 80 % dibagi sebagai berikut :

- Provinsi 16%
- Kabupaten/Kota Penghasil 32 %
- Kabupaten/Kota lain 32 %

2. Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan iuran tetap (land rent) sebesar 80 % dibagi sebagai berikut :

- Provinsi 16%
- Kabupaten/Kota Penghasil 32 %
- Kabupaten/Kota lain 32 %

3. Sektor Perikanan

Pungutan dari sektor perikanan dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota. Bagian pendapatan pemerintah pusat untuk pertambangan minyak bumi adalah 85 %, sedangkan bagian untuk daerah adalah 15 % yang dibagi sebagai berikut :

- Provinsi 3 %
- Kabupaten/Kota Penghasil 6 %
- Kabupaten/Kota lain 6 %

4. Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Alam

Bagian pendapatan pemerintah pusat untuk pertambangan gas alam adalah sebesar 70 %, dan untuk pemerintah daerah sebesar 30 % yang dibagi sebagai berikut :

- Provinsi 6 %
- Kabupaten/Kota Penghasil 12 %
- Kabupaten/Kota lain 12 %

Selanjutnya, pemerintah daerah mendapatkan bagian Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh) sebesar 20 %, dan 80 % untuk pemerintah pusat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 90 % untuk pemerintah daerah, dan 10 % untuk pemerintah pusat. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 80 % untuk pemerintah daerah, dan 20 % untuk pemerintah pusat.

Penerimaan pemerintah pusat dari bagi hasil PBB dan BPHTB tersebut akan dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Gota.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25 % dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10 % dan 90 %. Dana ini dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah. Pembagian DAU dilakukan dengan memperhatikan :

a. Potensi Daerah (PAD, PBB, BPHTB, dan bagian daerah dari penerimaan sumberdaya alam).
b. Kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
d. Tersedianya dana APBN

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program/kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Program/kegiatan yang dibiayai dengan DAK harus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBD.

Lampiran 10. Struktur APBD dengan Pendekatan Kinerja (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

I		**PENDAPATAN**			Rp.
	1	Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Bagian Laba dari BUMD d. Bagian Laba dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan e. Lain-lain PAD yang sah	 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp.	
	2.	Dana Perimbangan a. Bagian Daerah b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	 Rp. Rp. Rp.	Rp.	
	3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah		Rp.	
II		**BELANJA**			Rp.
	1.	Belanja Administrasi Umum a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan e. Belanja Lain-lain	 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp.	
	2.	Belanja Operasional, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum		Rp.	
	3.	Belanja Modal a. Belanja Aparatur b. Belanja Publik	 Rp. Rp.	Rp.	
	4.	Belanja Transfer		Rp.	
	5.	Belanja Tidak Terduga		Rp.	
III.		**Surplus/Defisit Anggaran (I-II)**			Rp.